



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kebijakan pembangunan daerah bidang irigasi-pertanian, tata ruang, status penetapan daerah irigasi, pengelolaan kelembagaan irigasi guna mewujudkan program ketahanan pangan dibutuhkan sinergitas dan keterpaduan satu data dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dengan menyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, menyebutkan bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi harus melibatkan peran serta semua pihak yang berkepentingan baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan masyarakat petani pemakai air;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Tahun 2022-2026, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI TAHUN 2022-2026.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM PERTANIAN DAN IRIGASI

BAB III : RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

BAB IV : PENJADWALAN PENANGANAN DAERAH IRIGASI SESUAI SKALA PRIORITAS

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-6-2022

Pj. BUPATI BANJARNEGARA
Cap ttd,
TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 27-6-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 16

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2022 – 2026

BAB I
PENDAHULUAN

Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi) adalah dokumen yang memuat aspek legalitas dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, dimana Bupati atau pihak lain yang membutuhkan dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sebagai acuan rencana strategis pelaksanaan irigasi di wilayah kewenangan masing - masing menanda tangani dokumen dimaksud. Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi memuat rencana pengembangan dan pengelolaan seluruh daerah irigasi (DI) dan urutan prioritas penanganannya per tahun sesuai kewenangannya masing-masing.

Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi disusun berdasarkan perubahan Paradigma Pembangunan (perencanaan dari topdown menuju bottom up, sentralistik ke desentralistik dll) lebih diarahkan pada pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif melalui musyawarah pembangunan daerah, adanya perubahan kebijakan dan regulasi di Pemerintahan daerah dan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi, dimana telah diterbitkannya beberapa legal aspek sehingga mendasari pelaksanaan program Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) dengan melibatkan masyarakat setempat dan lembaganya, disamping itu perlu adanya kejelasan arah perencanaan pembangunan daerah termasuk perencanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi di daerah dalam Kerangka Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi).

A. LATAR BELAKANG

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan merupakan Tujuan Dua dari target SDG's 2030 yang juga menjadi target yang harus dimasukkan kedalam dokumen perencanaan daerah dan untuk menunjang Tujuan SDG's tersebut, Pengelolaan irigasi merupakan kegiatan yang sangat penting untuk ditingkatkan terlebih-lebih dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sistem irigasi perlu dikelola dengan baik, dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipasi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut kembalinya pelaksanaan irigasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan di bidang irigasi dengan menerbitkan serangkaian Peraturan Pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

Tujuan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan irigasi di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kewenangan kabupaten ini telah disusun pada tahun 2021 oleh Tim Penyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Banjarnegara yang beranggotakan sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
- Sekretaris I : Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara
- Sekretaris II : Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

- Anggota :
1. Kepala Bidang PSDA DPUPR Kabupaten Banjarnegara
 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara.
 4. Kasubag. Perencanaan dan Keuangan DPUPR Kabupaten Banjarnegara
 5. Kasubag. Keuangan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
 6. Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
 7. Kasubag Keuangan Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
 8. Kepala Seksi Usaha Tanaman Pangan Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
 9. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
 10. Kepala Seksi Infrastruktur Wilayah Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
 11. Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
 12. Kepala Seksi Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bidang PSDA DPUPR Kabupaten Banjarnegara
 13. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air Bidang PSDA DPUPR Kabupaten Banjarnegara

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi adalah sebagai instrumen perencanaan yang diperlukan oleh B/BWS, Provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan daerah di bidang pertanian, serta pengelolaan irigasi secara partisipatif, dengan tujuan untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

Sedangkan tujuannya dibuat dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi adalah untuk membantu Kabupaten Banjarnegara terutama Dinas PUPR, Dintankan KP dan Baperlitbang serta pelaku pengelolaan irigasi lainnya (Kelembagaan Pengelola Irigasi) di Kabupaten Banjarnegara dalam menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan terkoordinasi di Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini terbatas kepada:

Dokumen Pelaporan

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup

BAB II. Gambaran Umum Pertanian dan Irigasi

- A. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Irigasi
- B. Kondisi Geografis
 1. Geografi
 2. Topografi
 3. Cuaca dan Musim
 4. Keadaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 5. Ketersediaan Air untuk Irigasi
 6. Penggunaan Tanah dan Kesesuaian Tanah untuk Irigasi
- C. Kondisi Demografi
 1. Jumlah, Kepadatan, dan Pendidikan Penduduk
 2. Mata Pencaharian dan Tingkat Kemiskinan
 3. Peran Serta Wanita dalam Kegiatan Irigasi
- D. Kondisi Sistem Irigasi
 1. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KP)
 2. Kondisi Aset Irigasi
 3. Kondisi Kinerja Sistem Irigasi
- E. Pendapatan Petani
 1. Penguasaan dan Kepemilikan Lahan Irigasi
 2. Pola Tanam dalam 5 Tahun Terakhir
 3. Produksi dan Produktivitas Tanaman dalam 5 Tahun Terakhir
 4. Pengelohan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 5. Pendapatan dan Pola Pendapatan Petani Sawah Irigasi

BAB III. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

- A. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 1. Rencana Pengembangan Irigasi
 - a. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru
 - b. Peningkatan Jaringan Irigasi
 2. Rencana Pengelolaan Irigasi
 - a. Operasi Jaringan Irigasi
 - b. Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
 - d. Persiapan Operasi dan Pemeliharaan
 - e. Penyusunan Tata Tanam Global
 - f. Penyusunan Tata Tanam Detail
- B. Bidang Baperlitbang
 1. Pemberdayaan KPI
 - a. Penyiapan Kerangka Hukum untuk PPSI
 - b. Penguatan KPI
 - c. Penyusunan Rencana PPSI (Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi)
 - d. KOMIR
 - e. Evaluasi Kinerja PPSI
 2. Pemberdayaan TPM
 - a. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
 - b. Pelatihan KTPM dan TPM

3. Pelatihan dan Penyusunan PSETK
 - a. Pelatihan PSETK
 - b. Pelaksanaan PSETK
- C. Bidang Pertanian
 1. Pemberdayaan KPI
 - a. Pengembangan Pertanian
 - b. Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan
 2. Peningkatan Pendapatan Usaha Tani
 - a. Fasilitasi Akses Informasi dan Kredit Pertanian
 - b. Bantuan Teknis Sistem Stimulan (Benih, Pupuk, dan lain-lain)
 3. Jaminan Keberlanjutan Pertanian
 - a. Peningkatan Daya Guna Lahan dan Air
 - b. Menyusun Mekanisme Insentif/Disinsentif Alih Fungsi Lahan
 - c. Penegakan Hukum untuk Mencegah Alih Fungsi Lahan
 - d. Melaksanakan Usaha Tani Hemat Air
 - e. Melaksanakan Gerakan Hemat Air

BAB IV. Penjadwalan Penanganan DI sesuai Skala Prioritas

- A. Data DI Sesuai Kewenangan
- B. Jadwal Pelaksanaan DI Berbasis Skala Prioritas

BAB V. Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran.

BAB II GAMBARAN UMUM PERTANIAN DAN IRIGASI

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERTANIAN DAN IRIGASI

Kinerja pembangunan nasional Indonesia secara umum, dan khususnya kinerja pembangunan di sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis, baik yang berasal dari faktor-faktor perubahan di dalam negeri, maupun faktor-faktor dari luar negeri, atau bahkan faktor-faktor perubahan yang di luar kendali manusia (faktor alam dan lingkungan global) yang dikenal sebagai *external factors*. Faktor-faktor tersebut secara sendiri-sendiri, atau secara bersamaan secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kinerja sektor pertanian, yang pada gilirannya akan berdampak kepada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Di samping itu, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mendorong pertumbuhan pembangunan pertanian, agar pembangunan pertanian dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai negara yang menganut keterbukaan ekonomi seperti Indonesia, sudah barang tentu, bahwa pembangunan ekonomi secara umum dan khususnya pembangunan sektor pertanian, tidak dapat lepas dari pengaruh perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan oleh negara, atau kelompok negara lain yang mempunyai hubungan perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia, termasuk pengaruh dari kesepakatan-kesepakatan bilateral, multilateral dan global dengan Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022 pada salah satu Indikator Kinerjanya yaitu Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkesinambungan dan Berbasis pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan dalam sasaran kinerjanya adalah Meningkatkan Pelayanan dan Ketersediaan Jaringan Keirigasian.

Berdasarkan Visi Misi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah “BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”. Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

1. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

2. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

Melalui kedua pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Tabel 2.1. Visi Misi RPJMD Banjarnegara Tahun 2017-2022

NO	POKOK VISI		MISI
1	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang bermartabat	Pemenuhan hak dasar	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
			Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar
2	Kabupaten Banjarnegara menjadi Kabupaten yang sejahtera	Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
			Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional

NO	POKOK VISI	MISI
	Peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan

Dari uraian visi misi diatas, maka misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara adalah Misi ke 3 yaitu : Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

B. Kondisi Fisik Kabupaten Banjarnegara

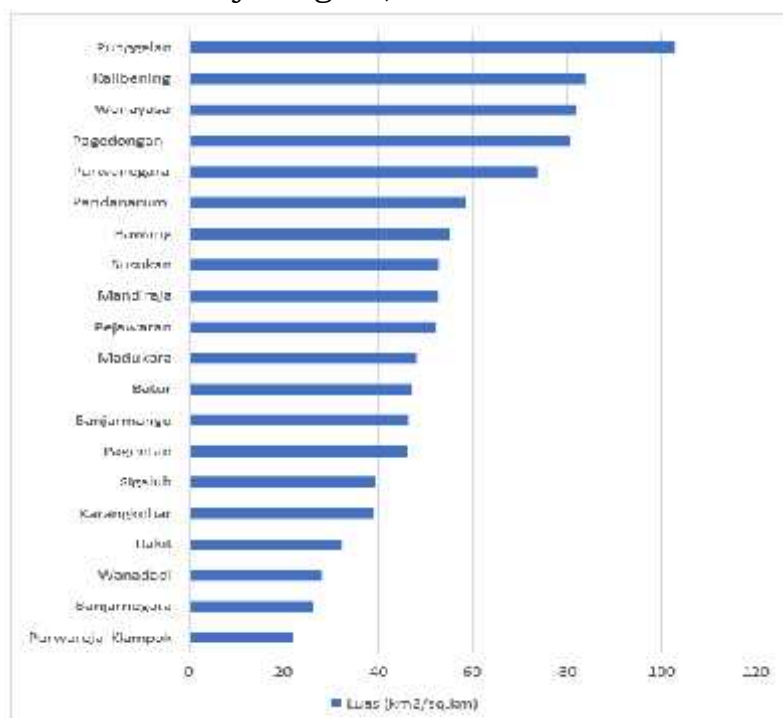
1. Kondisi Geografis dan Letak Administratif

Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7°12' – 7°31' Lintang Selatan dan 109°29'–109°45'50" Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

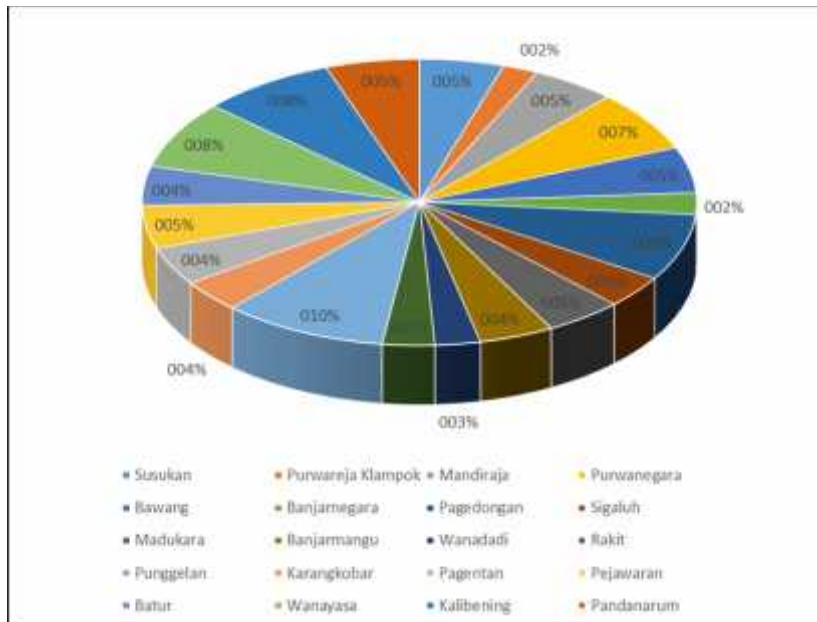
- Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki luas 114.460,88 Ha. Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam 20 Kecamatan yang terdiri dari 259 desa dan 12 kelurahan.

Tabel Grafik 2.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, 2020



negara.



Sumber: Hasil Olahan Data Kabupaten Banjarnegara dalam Angka, 2016

Gambar 2. 1 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016

2. Topografi

Kabupaten Banjarnegara mempunyai ketinggian yang bervariasi, meskipun kebanyakan berada pada ketinggian 100 m dpl karena letaknya yang berada pada jalur pegunungan; yang sebagian besar berada pada ketinggian 100–500 mdpl (37,04%); 500–1.000 mdpl (28,74%); dan >1.000 mdpl (24,4%); sedangkan wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl hanya seluas 9,82% saja.

Ketinggian topografi setiap daerah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- Kurang dari 100 mdpl meliputi luas 9,82 % dari luas wilayah Kabupaten yang meliputi Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara dan Bawang.
- Antara 100-500 mdpl, meliputi luas 37,04 % luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Banjarmangu, Banjarnegara, Wanadadi, Rakit, Punggelan dan Madukara.
- Antara 500-1.000 mdpl, meliputi luas 28,74 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Banjarmangu, Sigaluh dan sebagian Banjarnegara.
- Lebih dari 1.000 mdpl, meliputi luas 24,4 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang meliputi Kecamatan Karangkoobar, Wanayasa, Kalibening, Pageotan, Pejawaran dan Batur.

Ditinjau dari segi kemiringan, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kemiringan, yaitu:

- Antara 0–15% meliputi luas 24,6% dari luas wilayah Kabupaten banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang dan Rakit.
- Diatas 15–40%, meliputi luas 45,04% dari luas wilayah kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkoobar, Pageotan, Wanayasa dan Kalibening.

- c. Lebih dari 40% meliputi luas 30,35% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran dan Batur.

Berikut merupakan tabel ketinggian wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Kabupaten Banjarnegara.

No.	Ketinggian	Kecamatan	Keterangan
1.	< 100 mdpl	<ul style="list-style-type: none"> • Susukan • Purwareja • Klampok • Mandiraja • Purwanegara 	luas 9,82 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara
2.	100-500 mdpl	<ul style="list-style-type: none"> • Susukan • Mandiraja • Purwanegara • Bawang • Banjarmangu • Banjarnegara • Wanadadi • Rakit • Punggelan • Madukara 	luas 37,04 % luas wilayah Kabupaten Banjarnegara
3.	500-1.000 mdpl	<ul style="list-style-type: none"> • Banjarmangu • Sigaluh • Banjarnegara • Pagedongan 	luas 28,74 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara
4.	> 1.000 mdpl	<ul style="list-style-type: none"> • Karangkoobar • Wanayasa • Wanayasa • Kalibening • Pagentan • Pandanarum • Pejawaran • Batur 	luas 24,4 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2009

Apabila ditinjau dari kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki tiga jenis tingkat kemiringan. Berikut merupakan tingkat kemiringan di Banjarnegara.

Tabel 2.4 Kelerengan Wilayah Kabupaten Banjarnegara

No.	Kelerengan	Kecamatan	Keterangan
1.	Antara 0–15%	<ul style="list-style-type: none"> • Susukan • Purwareja • Klampok • Mandiraja • Purwanegara • Pagedongan • Bawang • Rakit 	luas 24,61% dari luas wilayah Kabupaten banjarnegara

No.	Kelerengan	Kecamatan	Keterangan
2.	Diatas 15-40%	<ul style="list-style-type: none"> • Madukara • Banjarmangu • Wanadadi • Punggelan • Karangkoobar • Pagentan • Wanayasa • Kalibening 	meliputi luas 45,04 % dari luas wilayah kabupaten Banjarnegara
3.	Lebih dari 40%	<ul style="list-style-type: none"> • Susukan • Banjarnegara • Sigaluh • Banjarmangu • Pejawaran • Batur 	luas 30,35 % dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2009

3. Kondisi Geologi

Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geologi meliputi: jenis tanah, struktur geologi dan gerakan tanah yang sangat berpengaruh dalam kondisi lingkungan fisik di Kabupaten Banjarnegara.

a. Jenis Tanah

Sedangkan jenis tanah pada Kabupaten Banjarnegara terdiri dari:

- 1) Tanah aluvial : dengan asosiasinya, berwarna kelabu coklat dan hitam, sifatnya bera neka ragam. Produktivitas tanah rendah hingga tinggi sesuai untuk pertanian. terdapat pada Kecamatan Batur, Kalibening, Rakit, Punggelan, Susukan, Purwareja Klampok, dan Wanadadi.
- 2) Tanah latosol : berarsosiasi dengan andosol, sifatnya agak asam hingga netral, warnanya beraneka ragam yaitu kelabu, coklat, hitam coklat kemerah-merahan. Tingkat kesuburan tanah sedang sampai tinggi. Sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran dan hutan. Terdapat pada Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran, Kalibening, Karangkoobar, Banjarmangu, Pagedongan, Mandiraja, Punggelan, Pandanarum ,dan Pagentan
- 3) Tanah andosol : dengan asosiasi berwarna coklat, coklat kekuning-kuningan, bersifat netral sampai asam. Produktivitas tanah sedang hingga tinggi, cocok untuk tegalan, kebun campuran dan hutan. Terdapat di Kecamatan Wanayasa, Pejawaran, Pagentan, dan Batur.
- 4) Tanah grumosol : asosiasinya dengan tanah mediteran, sifatnya agak netral, warna kelabu hingga hitam, merah kekuning-kuningan, merah hingga coklat. Produktivitasnya rendah sampai sedang, cocok dipergunakan untuk usaha-usaha persawahan dan tegalan. terdapat di Kecamatan Kalibening, Karangkoobar, Pagentan, Wanadadi, Wanayasa, Madukara, dan Banjarmangu
- 5) Tanah podsolik merah kuning : tanah bertekstur liat, struktur blok di lapisan bawah, konsistensi teguh, bersifat asam dengan pH kurang dari 5,5. Terbentuk pada daerah

dengan curah hujan antara 2500 sampai 3000 mm tiap tahun serta biasanya berada pada ketinggian di atas 25 meter di atas permukaan laut. Terdapat di sekitar tegalan pada Kecamatan Pandarum, Kalibening, dan Punggelan.

- 6) Tanah litosol : tanah yang beraneka sifat dan warnanya. Jenis tanah ini kurang baik untuk pertanian, terdapat di Kecamatan Banjarmangu.

Jenis tanah yang cenderung berbeda pada sebagian besar wilayah di Kabupaten Banjarnegara memerlukan penanganan yang berbeda. Berikut merupakan tabel jenis tanah dan penyebarannya di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2.5 Jenis Tanah Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009

No.	Jenis Tanah	Persebaran
1.	Aluvial kelabu coklat dan hitam	Batur, Kalibening, Rakit, Punggelan, Susukan, Purwareja Klampok, dan Wanadadi
2.	Latosol kelabu, coklat, hitam coklat kemerah-merahan	Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran, Kalibening, Karangobar, Banjarmangu, Pagedongan, Mandiraja, Punggelan, Pandanarum ,dan Pegentan
3.	Andosol coklat, coklat kekuning-kuningan	Wanayasa, Pejawaran, Pagentan, dan Batur.
4.	Grumosol kelabu hingga hitam, merah kekuning-kuningan, merah hingga coklat	Kalibening, Karangobar, Pagentan, Wanadadi, Wanayasa, Madukara, dan Banjarmangu
5.	Podsolik Merah Kuning	Pandanarum, Kalibening, dan Punggelan
6.	litosol	Banjarmangu

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2008

4. Struktur Patahan

Berdasarkan peta geologi Kabupaten Banjarnegara dapat dijelaskan mengenai kondisi geologi sebagai berikut :

a. Pembagian Formasi Endapan

Berdasarkan hasil survey nasional tentang geologi regional, Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi pegunungan Serayu Selatan. Adapun Stratigrafi Daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu batuan molion (metamorf) yang terdiri dari : Sekis Kristalin, Sabak, Serpil Hitam, Filit, Kwarsit dan batuan batu Gamping.

b. Formasi Batuan

Formasi batuan di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- 1) Batuan Grewake dan Lempung Hitam tersingkap di daerah Kalitengah sampai Merden
- 2) Batuan Metasedimen tersingkap di daerah Kalitengah hingga daerah Kebutuhan Duwur
- 3) Batuan Filit dan Sekis singkapannya banyak ditemukan di lereng selatan pegunungan Serayu Selatan.

5. Keadaan Iklim

Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis, musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Bulan basah umumnya lebih banyak dari bulan kering. Curah hujan pada Bulan Desember tahun 2020 sebanyak 19.80 mm

6. Jenis Tanah

Jenis Tanah yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara antara lain :

a. Tanah Alluvial :

Terdapat di Kecamatan: Batur, Karangkoar, Purwareja Klampok dan Wanadadi

b. Tanah Latosol:

Terdapat di Kecamatan: Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran dan Pagentan.

c. Tanah Andosol:

Terdapat di Kecamatan: Kalibening, Wanayasa, Pejawaran dan Batur.

d. Tanah Grumosol:

Terdapat di Kecamatan: Purwanegara, Mandiraja, Kalibening, Karangkoar, Pagentan dan Banjarnegara.

e. Tanah Organosol:

Terdapat di Kecamatan: Batur.

f. Tanah Litosol:

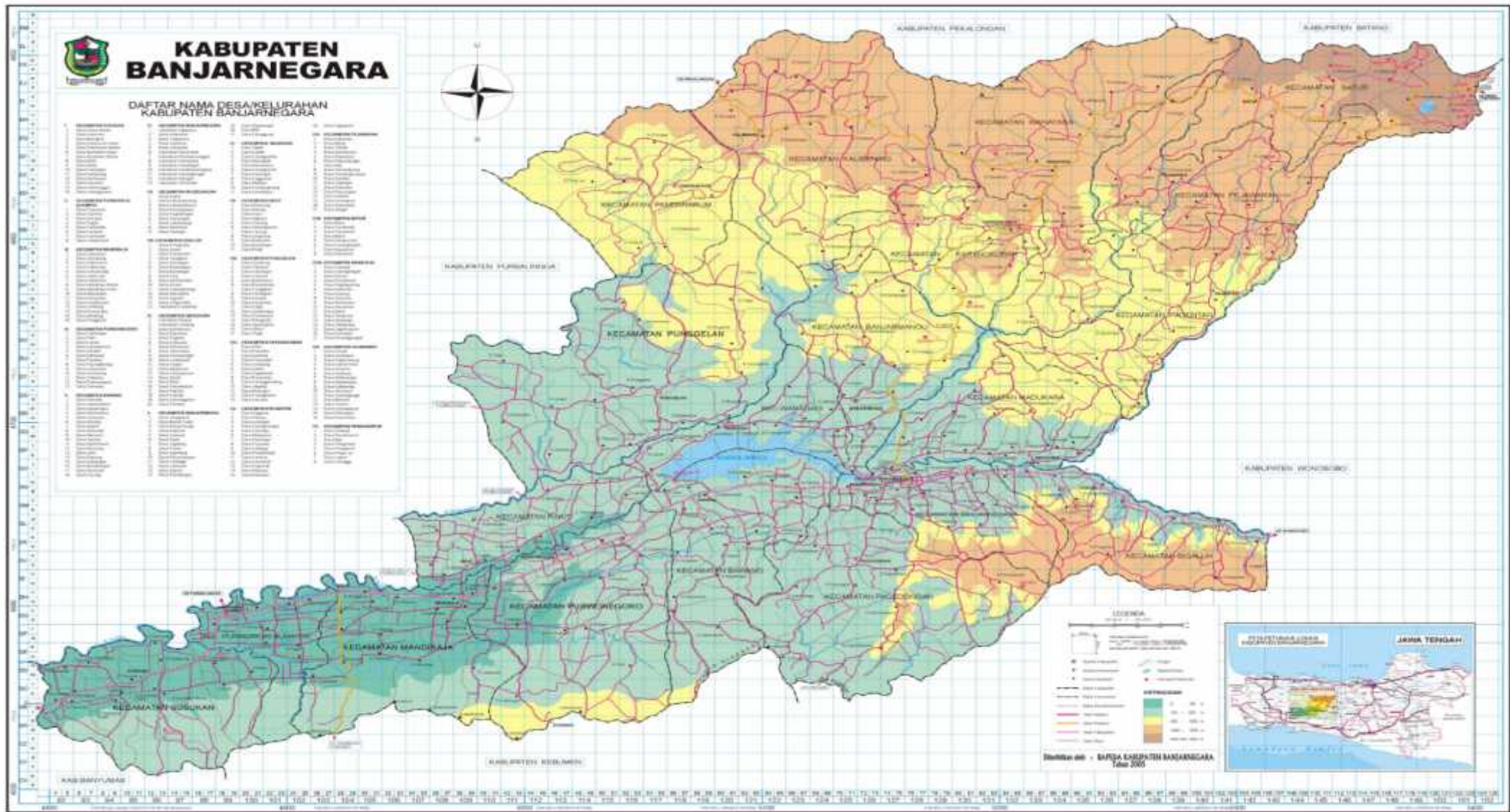
Terdapat di Kecamatan Banjarnegara dan Punggelan.

Bila ditinjau dari bentuk tata alam dan penyebaran geografis, maka Kabupaten Banjarnegara dapat digolongkan dalam tiga wilayah yaitu:

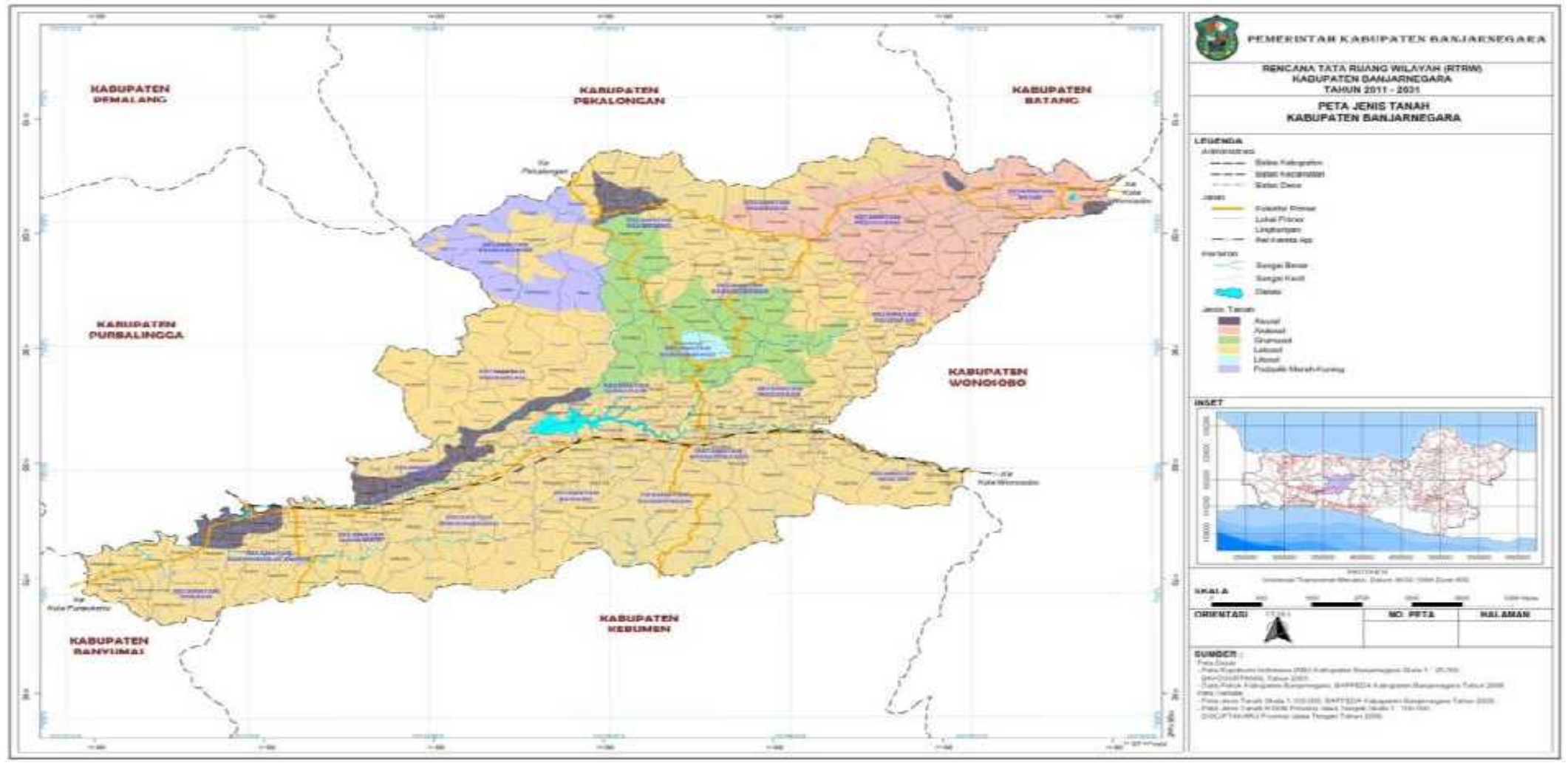
a. Bagian utara, terdiri dari daerah pegunungan Kendeng dengan relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan Kalibening, Karangkoar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara, Banjarmangu dan Punggelan;

b. Bagian tengah, terdiri wilayah dengan relief yang datar merupakan lembah sungai Serayu yang subur mencakup sebagian wilayah Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja Klampok, Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu;

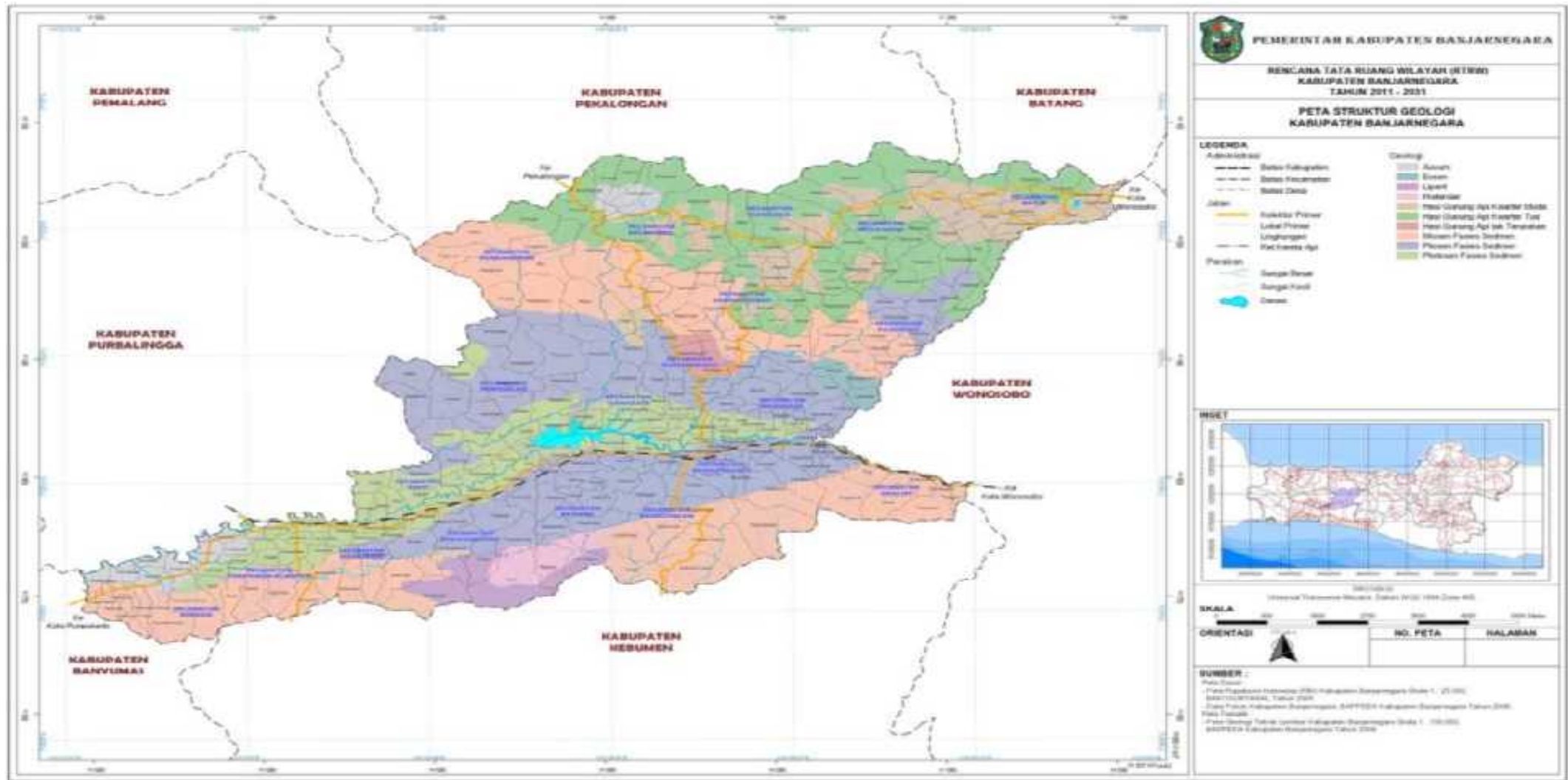
c. Bagian selatan, terdiri dari wilayah dengan relief yang curam merupakan bagian dari pegunungan Serayu meliputi Kecamatan Banjarnegara, Bawang, Purwanegara, Mandiraja Purwareja Klampok dan Susukan.



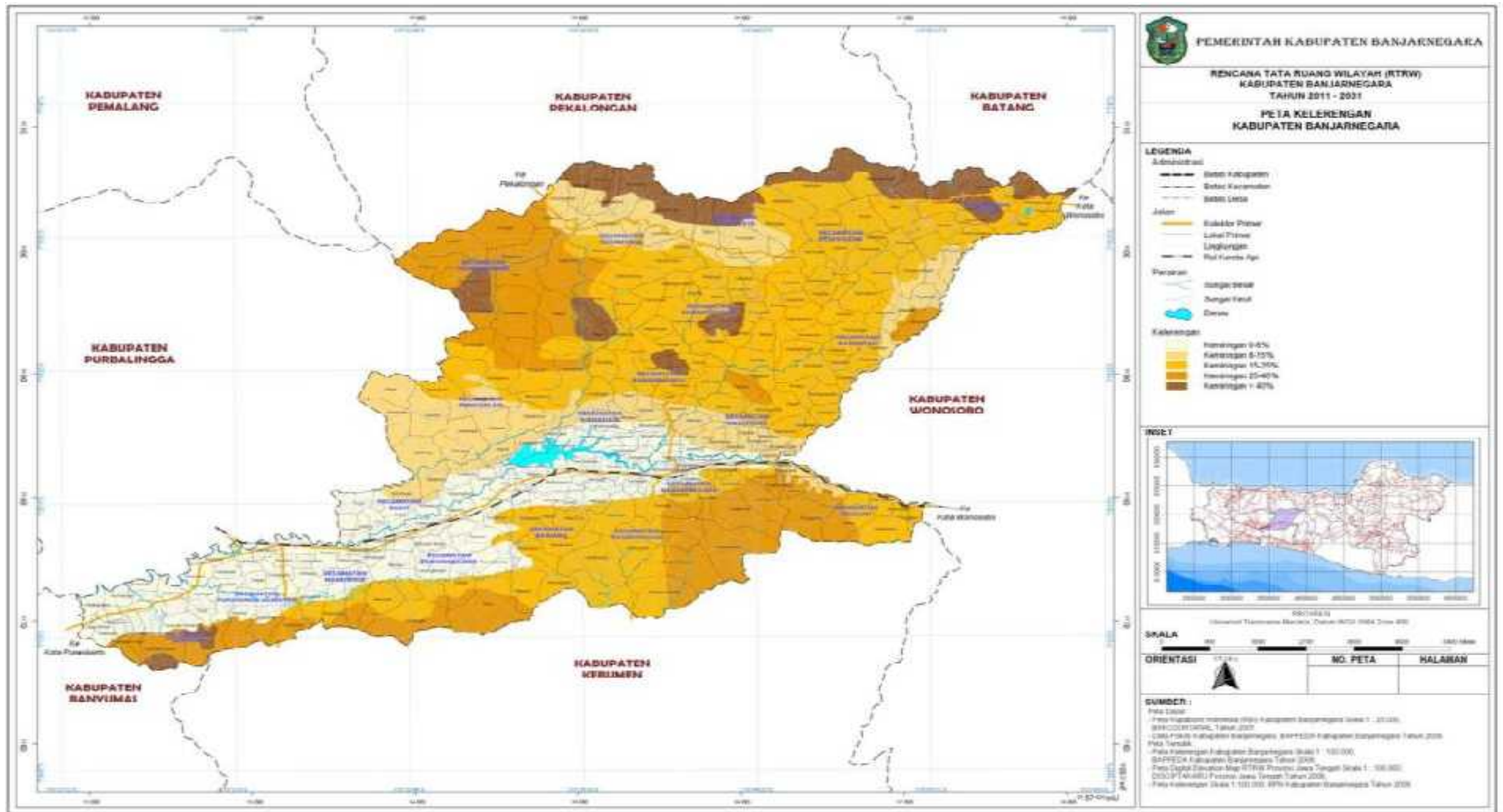
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Banjarnegara



Gambar 2.3 Peta Kelerangan Kabupaten Banjarnegara



Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Banjarnegara



Gambar 2.5 Peta Struktur Geologi Kabupaten Banjarnegara

7. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Kabupaten Banjarnegara seperti halnya kebanyakan wilayah di Indonesia yang beriklim tropis, dengan bulan basah umumnya lebih banyak daripada bulan kering. Temperatur udara berkisar antara 20–26°C, temperatur terdingin yaitu 3–18°C dengan temperatur terdingin tercatat pada musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng. Kelembaban udara berkisar antara 80%–85 % dengan curah hujan tertinggi rata-rata 3.000 mm/tahun. Semakin tinggi tempat itu dari permukaan air laut, maka curah hujan dan frekwensi hujannya semakin tinggi. Pada umumnya bulan basah terjadi antara bulan September–Maret, sedangkan bulan kering berkisar antara April–Agustus. Puncak musim hujan berada pada bulan Desember–Januari.

Curah hujan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2.6. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Banjarnegara, 2020

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Minim um	Rata- rata	Maksim um	Minim um	Rata- rata	Maksimu m
Januari	20,80	27,76	30,60	58,00	82,55	97,00
Februari	21,00	25,11	30,60	61,00	82,03	96,00
Maret	29,80	24,60	20,40	60,00	84,22	97,00
April	20,80	24,95	29,80	67,00	83,72	93,00
Mei	21,40	24,80	31,20	56,00	85,12	95,00
Juni	19,60	24,11	29,60	64,00	83,54	95,00
Juli	14,20	22,30	29,00	51,00	81,49	96,00
Agustus	15,60	22,40	27,00	50,00	79,50	98,00
September	16,00	23,70	30,20	53,00	78,80	96,00
Oktober	19,80	23,70	29,20	67,00	87,00	97,00
November	19,80	24,40	30,00	67,00	85,60	96,00
Desember	19,80	24,20	30,40	57,00	83,90	96,00

Lanjutan Tabel 2.4

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata- rata	Maksimum	Minimum	Rata- rata	Maksimum
Januari		10,90			943,93	
Februari		11,75			944,22	
Maret		10,00			944,11	
April		10,83			944,32	
Mei		9,54			944,01	
Juni		10,90			943,93	
Juli		9,39			945,90	
Agustus		10,65			946,50	
September		11,47			946,70	
Oktober		10,76			944,30	
November		11,97			944,40	
Desember		7,16			942,50	

Lanjutan Tabel 2.4

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	29,12	24,00	48,90
Februari	17,19	22,00	40,24
Maret	19,14	25,00	44,06
April	13,88	19,00	38,66
Mei	8,79	16,00	40,16
Juni	0,20	24,00	48,90
Juli	0,30	5,00	50,20
Agustus	0,30	2,00	51,20
September	1,50	9,00	46,60
Oktober	26,10	20,00	31,30
November	17,30	24,00	47,60
Desember	19,80	25,00	34,10

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas III Banjarnegara

Dari data yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang mendapatkan iklim yang paling sesuai untuk budidaya padi adalah daerah topografi datar dan sedang yang terletak dalam Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Banjarmangu, Banjarnegara, Wanadadi, Rakit, Punggelan, Madukara, Sigaluh dan Pagedongan. Daerah topografi berbukit/bergunung lebih sesuai untuk tanaman perkebunan yaitu Kecamatan Karangobar, Wanayasa, Wanayasa, Kalibening, Pagentan, Pandanarum, Pejawaran dan Batur

8. Perubahan Iklim (Climate Change)

Perubahan iklim menjadi fenomena yang penting untuk dipertimbangkan. di Kabupaten Banjarnegara kerana kabupaten banjarnegara wilayah dengan topografi yang berbukit dan akan menyebabkan :

- a. Pemanfaatan lahan budidaya, berupa penurunan atau bahkan kegagalan berproduksi usaha pertanian.
- b. Penyimpangan iklim berupa curah hujan yang cukup tinggi, memicu terjadinya gerakan tanah (longsor) yang berpotensi menimbulkan bencana alam, berupa: banjir dan tanah longsor.
- c. Penyimpangan iklim berupa curah hujan yang sangat rendah dibarengi peningkatan suhu udara, menyebabkan terjadinya kekeringan

C. KEADAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Sumberdaya air memiliki komponen berupa air tanah dan air permukaan. Aspek hidrometeorologi berupa suhu udara, kelembaban udara dan curah hujan merupakan bagian terpenting dalam menganalisis sumberdaya air. Sungai yang notabene sebagai sumber air permukaan utama adalah Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu dan Sungai Tulis dengan anak-anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya adalah prenil (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu.

Berikut merupakan jumlah mata air dan sungai yang mengalir di daerah resapan Kabupaten Banjarnegara

Tabel 2.7. Jumlah Mata Air dan Sungai yang Mengalir di Daerah Resapan Kabupaten Banjarnegara

No.	Kecamatan	Mata Air	Nama Sungai
1.	Rakit	42	Serayu, Pekacangan
2.	Punggelan.	6	Pekacangan Kedawun, Pandanaran, Wujil, Cacaban, Gintung
3.	Wanadadi	4	Serayu, Pekacangan
4.	Banjarmangu	9	Serayu, Merawu, Kandangwangi, Lumajang, Pekacangan
5.	Madukara	20	Serayu, Merawu, Langkrang, Bangbang
6.	Pagentan	9	Merawu, Bojong, Jawar
7.	Pejawaran	13	Bojong, Panaraban, Putih, Dalak
8.	Batur	5	Anget, Panaraban, Putih, Dalak
9.	Wanayasa	10	Panaraban, Gondang, Sibebek, Merawu, Sigembol
10.	Karangkobor	5	Urang, Pandanarum, Jrampang, Ragajaya
11.	Kalibening	3	Gintung, tarsana, Bangbang Duwur, Brukah

Sumber : Laporan Rencana Identifikasi Lokasi DPP-KTP2D Kabupaten Banjarnegara, 2007 dan Data Kegiatan DAK Kab, Banjarnegara Tahun 2005-2009

D. KETERSEDIAAN AIR UNTUK IRIGASI

Ketersediaan air irigasi berdasarkan hasil Perhitungan dalam Standar Pelayanan Minimum /SPM Pelayanan Irigasi di Kabupaten Banjarnegara Ketersediaan air permukaan pada sungai-sungai utama untuk Irigasi pada Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara diringkas sebagai berikut ;

Tabel 2.8. Ketersediaan Air untuk Irigasi (Lt/det)

No	Sungai	Bendung	JAN I	JAN II	FEB I	FEB II	MAR I	MAR II	APR I	APR II	MEI I	MEI II	JUN I	JUN II
1	Tulis	DI LIMBANGAN	1402	1402	1402	1402	1121	1402	1402	1402	1402	1402	1402	1402
2	Merawu	DI CLANGAP	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
3	Pekacangan	DI LIANGAN	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
4	Gumelem	DI KRIKIL	261	252	245	246	254	252	238	247	267	283	261	252
5	Gumelem	DI BRENGKUT	184	191	166	168	154	152	153	153	162	161	156	146

No	Sungai	Bendung	JUL I	JUL II	AGT I	AGT II	SEP I	SEP II	OKT I	OKT II	NOP I	NOP II	DES I	DES II	DEBIT MAX	DEBIT MIN
1	Tulis	DI LIMBANGAN	1402	1402	1310	1402	1310	1310	1402	1402	1402	1402	1402	1139	1402	1121
2	Merawu	DI CLANGAP	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
3	Pekacangan	DI LIANGAN	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035	4035
4	Gumelem	DI KRIKIL	233	135	261	252	261	252	46	46	99	53	330	331	283	238
5	Gumelem	DI BRENGKUT	141	130	119	119	119	119	119	119	159	132	169	174	191	146

Tabel 2.9. a.Indek Kinerja Sistem Irigasi DI Liangan

Nama DI	Luas Baku (Ha)	Indeks Kinerja Sistim Irigasi (%)			
		MT I	MT II	MT III	Rata-Rata
DI LIANGAN	599	100	100	100	100
Keterangan	Pada DI Liangan diperoleh nilai SPM pada saat periode MT I = 100 %, MT II = 100 %, dan MT III = 100 %, Nilai SPM Rata-rata diperoleh nilai 100% (Kinerja Jaringan Irigasi Sangat Baik)				

Tabel 2.9. b.Indek Kinerja Sistem Irigasi DI Limbangan

Nama DI	Luas Baku (Ha)	Indeks Kinerja Sistim Irigasi (%)			
		MT I	MT II	MT III	Rata-rata
DI LIMBANGAN	581	97	99	99	98
Keterangan	Pada DI Limbangan diperoleh nilai SPM pada saat periode MT I = 97 %, MT II = 99 %, dan MT III = 99%, Nilai SPM Rata-rata diperoleh nilai 98% (Kinerja Jaringan Irigasi Baik)				

Tabel 2.9. c.Indek Kinerja Sistem Irigasi DI Clangap

Nama DI	Luas Baku (Ha)	Indeks Kinerja Sistim Irigasi (%)			
		MT I	MT II	MT III	Rata-Rata
DI CLANGAP	326	100	100	100	100
Keterangan	Pada DI Clangap diperoleh nilai SPM pada saat periode MT I = 100 %, MT II = 100 %, dan MT III = 100 %, Nilai SPM Rata-rata diperoleh nilai 100% (Kinerja Jaringan Irigasi Sangat Baik)				

Tabel 2.9. d.Indek Kinerja Sistem Irigasi DI Brengkut

Nama DI	Luas Baku (Ha)	Indeks Kinerja Sistim Irigasi (%)			
		MT I	MT II	MT III	Rata-Rata
DI BRENGKUT	28	88	96	95	93

Keterangan	Pada DI Brengkut diperoleh nilai SPM pada saat periode MT I = 88 %, MT II = 96 %, dan MT III = 95 % ,Nilai SPM Rata-rata diperoleh nilai 93 %(kinerja baik), faktor yang dapat menyebabkan penurunan nilai SPM ini diakibatkan debit sungai menurun
------------	---

Tabel 2.9. e.Indek Kinerja Sistem Irigasi DI Krikil

Nama DI	Luas Baku (Ha)	Indeks Kinerja Sistim Irigasi (%)			
		MT I	MT II	MT III	Rata-Rata
DI KRIKIL	168	85	99	78	87
Keterangan	Pada DI Krikil diperoleh nilai SPM pada saat periode MT I = 85%, MT II = 99 %, dan MT III = 78 % , Nilai SPM Rata-rata diperoleh nilai 87 % (kinerja Kurang) faktor yang menyebabkan penurunan nilai SPM ini diakibatkan ketersediaan air di sungai / sumbernya mengalami penurunan debit atau surut.				

Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 diatas di simpulkan bahwa ketersediaan air untuk irigasi Liangan, Limbangan dan Clangap memiliki Indeks Kinerja sistem Irigasi yang baik sehingga diketahui Sumber Air Untuk Irigasi mencukupi dan untuk Irigasi Krikil dan Brengkut memiliki nilai SPM yang cukup yaitu pada MT III kondisi sungai pada musim kemarau surut dan bahkan mengalami kekeringan.

E. PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIAN TANAH UNTUK IRIGASI

1. Penggunaan Lahan

Luas Wilayah tercatat 106.970,997 Ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Luas tersebut terbagi atas lahan sawah sebesar 14.128 Ha atau 13,90% dari wilayah keseluruhan Kabupaten Banjarnegara dan bukan lahan sawah sebesar 73.765 Ha atau 67,83% dari total kabupaten. Sedangkan lahan bukan pertanian sebesar 19.079 Ha atau 18,26%. Penggolongan penggunaan lahan ini merupakan penggunaan lahan utama yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 2.10. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Banjarnegara 2016-2020

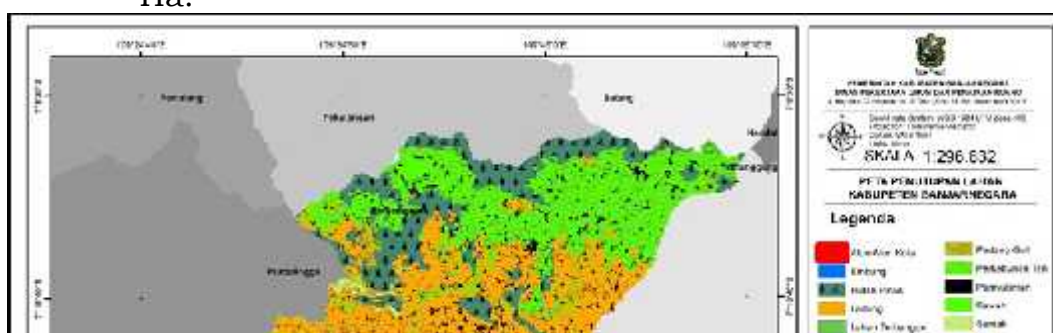
Penggunaan Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
I. Lahan Sawah	14 269,00	14 127,80	14 127,80	14 054,10	14 049,07
a. Lahan Irigasi	11 021,00	11 134,90	11 134,90	11 046,10	11 101,11
b. Lahan Tadah Hujan	2 991,00	2 939,20	2 939,20	2 942,30	2 882,76
c. Lahan Pasang Surut	257,00	53,70	53,70	65,70	65,20
II. Bukan lahan sawah	72 789,00	73 765,20	73 765,20	74 507,80	72 140,12
a. Tegak/kebun	45 488,00	44 538,40	44 538,40	45 899,20	42 820,13
b. Perkebunan	3 626,00	3 193,70	3 193,70	2 798,90	3 088,92
c. Hutan rakyat	6 325,00	7 400,80	7 400,80	6 609,60	7 362,85
d. lainnya ¹	17 348,00	18 621,30	18 621,30	19 189,10	18 857,22
e. Lahan yang tidak diusahakan	2,00	11,00	11,00	11,00	11,00
III. Lahan bukan pertanian	19 913,00	19 078,70	19 078,70	18 409,80	20 782,51
Total Luas Penggunaan Lahan	106 971	106 971	106 971	106 971	106 971

Catatan:

Kolam/Tebat/Empang dan lahan yang sementara tidak diusahakan Bangunan/pekarangan, hutan negara, rawa-rawa tidak ditanami padi, jalan, kuburan, sungai, danau, dan lain-lain

Sumber/Source: Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara

Tabel 2.10 diatas dapat dilihat bahwa kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 memiliki total penggunaan lahan dengan luas yaitu 106.971 Ha dengan penggunaan lahan terluas yaitu untuk tegalan/kabun yaitu 42.820 Ha sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu sawah pasang surut seluas 65,20 Ha.



en Banjarnegara

Kawasan peruntukan pertanian yang telah dirancang Pemerintah Daerah dalam Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011–2031 meliputi :

a. Kawasan Peruntukan Lindung

1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air

- Lindung Kawasan hutan

Kawasan hutan lindung berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung. Kawasan hutan lindung di Daerah kurang lebih 2.739,93 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) hektar meliputi Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Batur, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkojar, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Purwanegara

- Kawasan resapan air

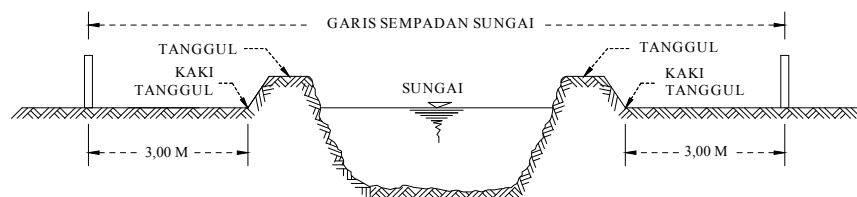
Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria penggunaan lahan yang didominasi hutan, curah hujan >3000 mm/tahun, tekstur tanah berupa pasir, dan kelerengan >40%. Luas kawasan resapan air kurang lebih 24,77 (dua puluh empat koma tujuh puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkojar, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pandanarum dan Kecamatan Sigaluh.

2) Kawasan Perlindungan Setempat

- Sempadan Sungai

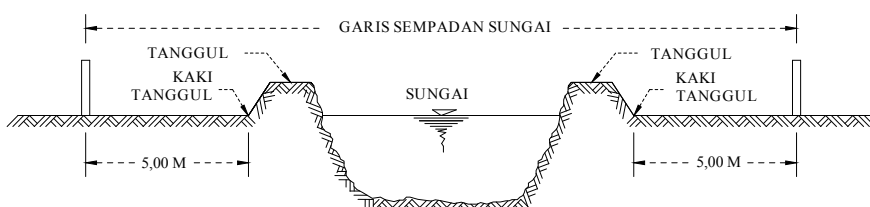
Kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai. Kriteria Kawasan Sempadan Sungai terdiri atas:

- ❖ Sempadan sungai bertanggul
Di Kawasan Perkotaan



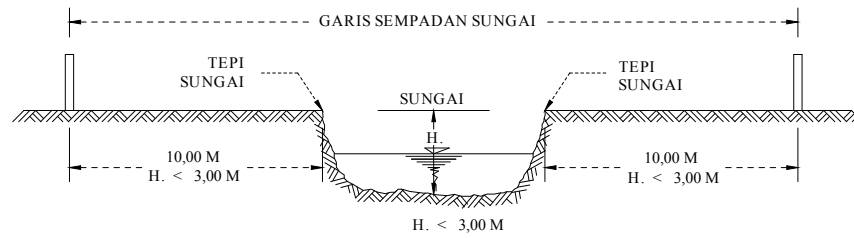
Gambar 2.7 Sempadan Sungai Bertanggul Kawasan Perkotaan

Di Luar Kawasan Perkotaan

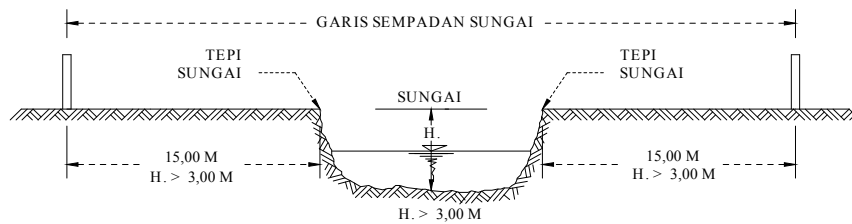


Gambar 2.8 Sempadan Sungai Bertanggul Kawasan Luar Perkotaan

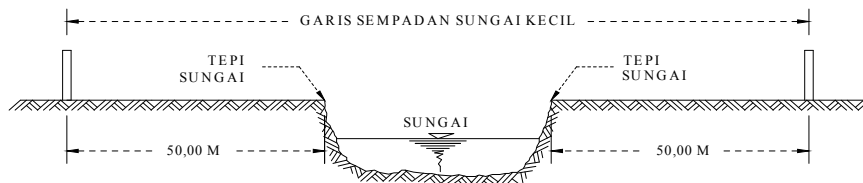
❖ Sempadan sungai tidak bertanggul



Gambar 2.9. Sempadan Sungai Tak bertanggul di Kawasan Perkotaan kedalaman kurang dari 3 meter



Gambar 2.10 Sempadan Sungai Tak bertanggul Di Kawasan Perkotaan kedalaman lebih dari 3 meter



Gambar 2.11 Sempadan Sungai Tak Bertanggul Di Luar Kawasan Perkotaan

• Sempadan Saluran Irigasi

Sempadan saluran irigasi meliputi 358 daerah Irigasi yang terdapat di Daerah, termasuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi.

• Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

Kawasan sekitar waduk memiliki luas 222,44 hektar, terdiri atas Waduk Mrica (Panglima Besar Jenderal Sudirman), Telaga Merdada, Telaga Sewiwi, Telaga Balekambang dan Waduk, telaga serta situ lainnya.

• Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas:

- ❖ Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan
- ❖ Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman dan hutan kota
- ❖ Ruang Terbuka Hijau (RTH) jalur hijau jalan
- ❖ Ruang Terbuka Hijau (RTH) fungsi tertentu

Pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan direncanakan memiliki luas sekitar 20% dari luas wilayah perkotaan.

3) Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi di Kabupaten Banjarnegara berupa kawasan cagar alam dengan luas kurang lebih 113,13 hektar meliputi:

- Cagar Alam Pringamba I di Desa Sawal Kecamatan Sigaluh dengan luas kurang lebih 53,92 hektar
- Cagar Alam Pringamba II di Desa Tlagawera, Kecamatan Banjarnegara dengan luas kurang lebih 10,63 hektar

- Cagar Alam Tlogo Dringo di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur dengan luas kurang lebih 28,63 hektar
 - Cagar Alam Tlogo Sumurup di Desa Bakal, Kecamatan Batur dengan luas kurang lebih 19,95 hektar.
- 4) Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan cagar budaya di Kabupaten Banjarnegara meliputi komplek Candi Dieng yang berada di Kecamatan Batur dengan luas 35,45 hektar.
- 5) Kawasan Rawan Bencana
- Kawasan rawan banjir meliputi: Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Madukara, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Rakit, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Wanayasa.
 - Kawasan rawan longsor meliputi seluruh wilayah Daerah.
 - Kawasan rawan gunung api berupa gas beracun meliputi Kecamatan Batur dan Kecamatan Pejawaran
 - Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Daerah.
 - Kawasan rawan kekeringan, meliputi Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Madukara, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Rakit, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Wanayasa
- 6) Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:
- Kawasan cagar alam geologi berada di Kecamatan Batur dan Kecamatan Pagedongan
 - Kawasan imbunan air tanah berada di Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Air Tanah Karangkoobar, dan Cekungan Air Tanah Wonosobo.
 - Sempadan mata air berupa daratan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air meliputi:
 - ❖ 8 sumber mata air di Kecamatan Banjarnegara;
 - ❖ 21 sumber mata air di Kecamatan Pagedongan;
 - ❖ 10 sumber mata air di Kecamatan Sigaluh;
 - ❖ 21 sumber mata air di Kecamatan Madukara;
 - ❖ 9 sumber mata air di Kecamatan Pagentan;
 - ❖ 13 sumber mata air di Kecamatan Pejawaran;
 - ❖ 7 sumber mata air di Kecamatan Punggelan;
 - ❖ 6 sumber mata air di Kecamatan Wanadadi;
 - ❖ 36 sumber mata air di Kecamatan Rakit;
 - ❖ 10 sumber mata air di Kecamatan Banjarmangu;
 - ❖ 35 sumber mata air di Kecamatan Bawang;
 - ❖ 2 sumber mata air di Kecamatan Karangkoobar;
 - ❖ 3 sumber mata air di Kecamatan Kalibening; dan
 - ❖ 6 sumber mata air di Kecamatan Batur.

- Sumber mata air
- b. Kawasan Peruntukan Budi Daya

1) Kawasan Hutan Produksi

Berdasarkan SK diatas, luas kawasan hutan produksi baik tetap maupun terbatas kurang lebih 15.616,87 hektar.

- kawasan hutan produksi terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 15.232,44 hektar meliputi, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Batur, Kecamatan Bawang, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Madukara, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Wanayasa.

- kawasan hutan produksi tetap.

Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 384,43 hektar meliputi Kecamatan Batur, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Sigaluh dan Kecamatan Wanayasa.

2) Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan budi daya yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang dimaksud terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

Rencana pengembangan kawasan pertanian meliputi :

- kawasan pertanian diarahkan untuk budi daya tanaman pangan
- peningkatan sistem irigasi
- pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau melalui peningkatan saluran irigasi.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

a) kawasan tanaman pangan terdiri atas:

- lahan basah memiliki luas kurang lebih 9.827,5 hektar, meliputi Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Madukara, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Rakit, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pandanarum dan Kecamatan Pejawaran
- Lahan kering memiliki luas kurang lebih 3.845,38 hektar, meliputi Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit dan Kecamatan Wanayasa.

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) meliputi pertanian tanaman pangan basah dan pertanian lahan kering dengan total luas 13.672,93 hektar.
 - Ketentuan lebih lanjut tentang KP2B dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- b) kawasan hortikultura memiliki luas kurang lebih 42.220,7 hektar, meliputi, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Batur, Kecamatan Bawang, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Madukara, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Rakit, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Wanayasa.
- c) kawasan perkebunan
Kawasan perkebunan memiliki luas kurang lebih 20.271,18 hektar berupa perkebunan rakyat, meliputi Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Batur, Kecamatan Bawang, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Madukara, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Wanayasa.
- 3) Kawasan Pertambangan dan Energi
Arahan pengelolaan Kawasan Pertambangan di wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah:
- a) Kawasan pertambangan mineral, meliputi:
- Kawasan mineral logam meliputi beberapa wilayah Kecamatan Yang termasuk dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), antara lain Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Batur, Kecamatan Bawang, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkoobar, Kecamatan Madukara, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Wanayasa.
 - Kawasan mineral bukan logam meliputi beberapa wilayah Kecamatan Yang termasuk dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), antara lain Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Batur, Kecamatan Bawang, Kecamatan Madukara, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit,

Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Wanadadi.

- Kawasan batuan meliputi beberapa wilayah Kecamatan Yang termasuk dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), antara lain Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Batur, Kecamatan Bawang, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkoar, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Wanayasa.
- b) Pengusahaan panas bumi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi Dieng, meliputi Kecamatan Batur, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Wanayasa.
- c) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
- Daerah terbuka, meliputi Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Batur, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Karangkoar, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Wanayasa.
 - Wilayah kerja kontraktor kontrak kerjasama blok Banyumas, meliputi Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Madukara, Kecamatan Pagedongan, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Wanadadi.
- 4) Kawasan Peruntukan Industri
- Rencana Pengembangan Kegiatan Industri meliputi:
- a) Kawasan peruntukan Industri dengan luas kurang lebih 330,28 meliputi:
- Kecamatan Bawang dengan luas kurang lebih 68,35 ha;
 - Kecamatan Punggelan dengan luas kurang lebih 4,87 ha;
 - Kecamatan Purwanegara luas kurang lebih 21,78 ha;
 - Kecamatan Purwareja Klampok luas kurang lebih 11,92 ha;
 - Kecamatan Rakit dengan luas kurang lebih 3,5 ha;
 - Kecamatan Sigaluh dengan luas kurang lebih 13,83 ha;
 - Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih 203,13 ha;
 - Kecamatan Wanadadi dengan luas kurang lebih 2,9 ha.
- b) Industri menengah dan industri besar yang akan menjalankan usahanya wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
- c) Kewajiban berlokasi di kawasan peruntukan industri dikecualikan yaitu industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan secara luas dan kegiatan industri

yang mengolah hasil pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan setempat.

- d) Kegiatan industri yang mengolah hasil pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertambangan setempat dapat berlokasi didekat sumber bahan baku dengan mempertimbangkan kondisi fisik alam, akses dan kelas jalan dan nilai manfaat.

5) Kawasan Pariwisata

- a) kawasan pariwisata, terdiri dari:

- Kawasan Kota Banjarnegara dan sekitarnya
- Kawasan Jalur Banjarmangu Karangobar
- Kawasan Wisata Kota Pusaka Banjarnegara
- Kawasan Wisata Minapolitan Rajapurbawa
- Kawasan Wisata Sungai Serayu.

- b) kawasan daya tarik wisata khusus, terdiri dari:

- Kawasan Komplek Candi Arjuna
- Kawasan Jeruji
- Kawasan Curug Tumpuk
- Kawasan Batur
- Kawasan Agropolitan Wanayasa Kalibening Pandanarum (WKP).

6) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan. Pada prinsipnya pengembangan kegiatan permukiman dapat dialokasikan pada lahan-lahan yang kurang produktif dan memiliki kemiringan lereng dibawah 15%.

Kawasan peruntukan permukiman dengan luas kurang lebih 15.928,75 hektar meliputi:

- a) kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

- PKL Banjarnegara dengan luas 988,63 ha;
- PKL Purwareja Klampok dengan luas 919,56 ha;
- PPK Banjarmangu dengan luas 134,62 ha;
- PPK Batur dengan luas 364,29 ha;
- PPK Bawang dengan luas 308,49 ha;
- PPK Kalibening dengan luas 132,89 ha.
- PPK Karangobar dengan luas 247,41 ha;
- PPK Madukara dengan luas 639,9 ha;
- PPK Mandiraja dengan luas 280,68 ha;
- PPK Pagedongan dengan luas 62,32 ha;
- PPK Pagentan dengan luas 83,11 ha;
- PPK Pandanarum dengan luas 31 ha;
- PPK Pejawaran dengan luas 198,23 ha;
- PPK Punggelan dengan luas 52,49 ha;
- PPK Purwanegara dengan luas 181,93 ha;
- PPK Rakit dengan luas 189,15 ha;
- PPK Sigaluh dengan luas 47,69 ha;
- PPK Susukan dengan luas 87,86 ha;
- PPK Wanadadi dengan luas 65,35 ha; dan
- PPK Wanayasa dengan luas 209,89 ha.

- b) kawasan permukiman perdesaan terdapat di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan pola penyebaran.

7) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

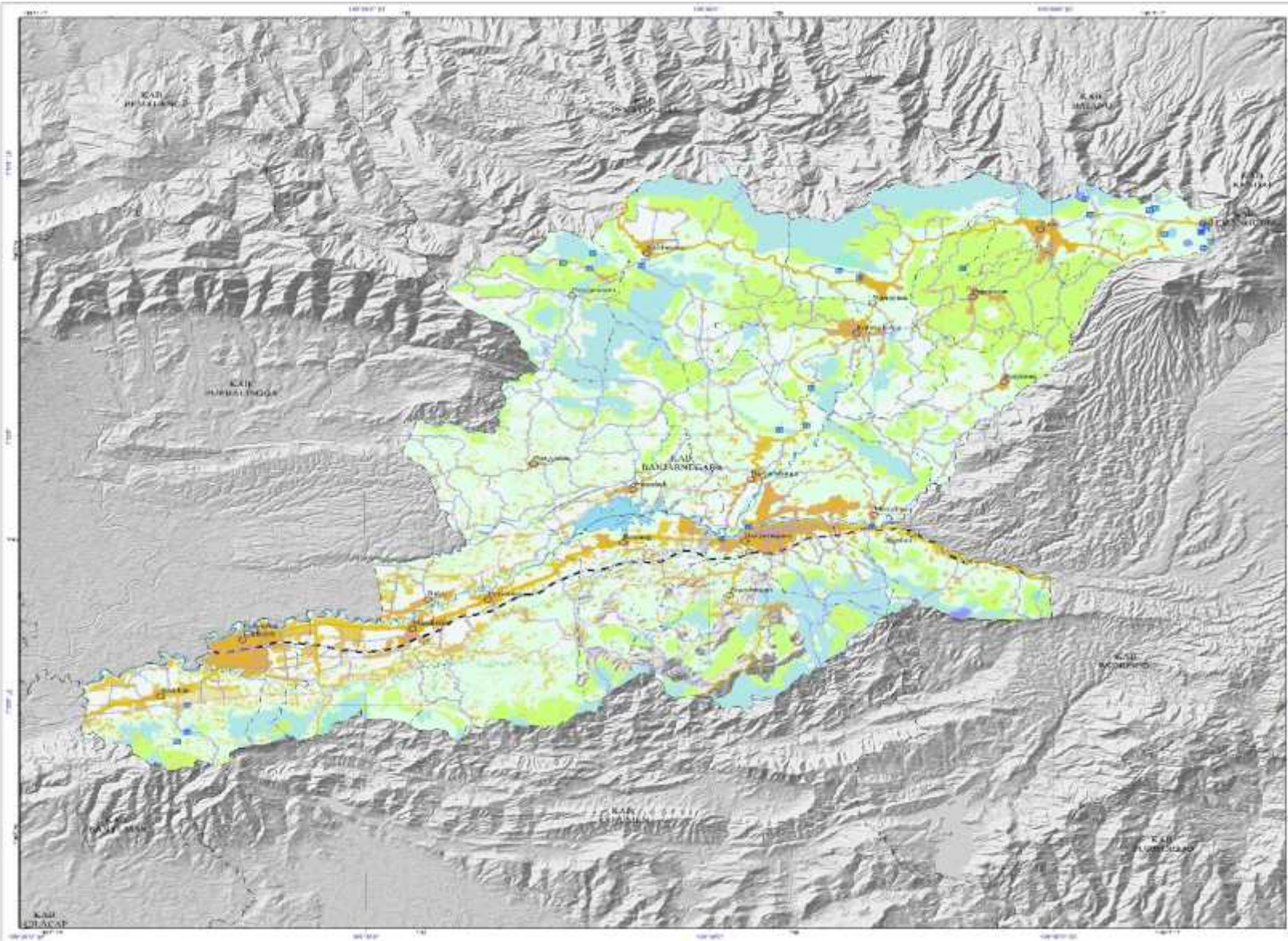
Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

a) Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi:

- kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Kecamatan; dan
- kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Banjarnegara.

b) Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:

- kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan
- kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Banjarnegara.




KABUPATEN BANJARNEGARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 - 2039
PETA RENCANA POLA RUANG


 U
 SKALA 1:110.000

Projeksi:  UTM
 Datum:  WGS 1984
 Sistem Koordinat:  UTM

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas-batas Pemerintahan	Batas Administratif	Perairan
<ul style="list-style-type: none">  Kabupaten Banjarnegara  Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none">  Desa  Desa 	<ul style="list-style-type: none">  Sungai  Perairan

STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Jaringan Jalan Nasional

-  Jalan Kolektor Primer (JKP)

Jaringan Jalan Provinsi

-  Jalan Kolektor Sekunder (JKS)

Jaringan Jalan Kabupaten

-  Jalan Lokal Primer
-  Jalan Lokal Sekunder
-  Jalan Lokal Tersier
-  Jalan Lokal Quaternary

Jalan Desa

-  Jalan Desa

Jaringan Jalan Kerata Api

-  Jaringan Kerata Api

POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

-  Kawasan Hutan Lindung
-  Kawasan Perikanan

KAWASAN PERINDUSTRIAN

-  Kawasan Industri
-  Kawasan Perumahan Perkotaan
-  Kawasan Perumahan Perdesaan

KAWASAN PERDAGANGAN

-  Kawasan Perdagangan
-  Kawasan Perdagangan
-  Kawasan Perdagangan

KAWASAN PERUMAHAN

-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan
-  Kawasan Perumahan

SUMBER DATA

1. Permenlog No. 41 tahun 2012 tentang Kebijakan Kelangkaan dengan Kabupaten Banjarnegara
2. Permenlog No. 75 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara
3. Permenlog No. 75 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara
4. Permenlog No. 75 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara
5. Permenlog No. 14 tahun 2013 tentang Kebijakan Kelangkaan dengan Kabupaten Banjarnegara
6. Permenlog No. 75 tahun 2013 tentang Kebijakan Kelangkaan dengan Kabupaten Banjarnegara
7. Data administratif dan lain-lain yang berkaitan dengan RTM dan RTRM Kabupaten Banjarnegara 2019/20
8. Laporan Tahunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2019
9. Data PIR Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
10. Hasil Analisis TSP Persebaran KTRK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR TAHUN 2019 - 2019
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Tahun 2019 - 2039
BUPATI BANJARNEGARA

BUDI SARWONO

F. KONDISI DEMOGRAFI

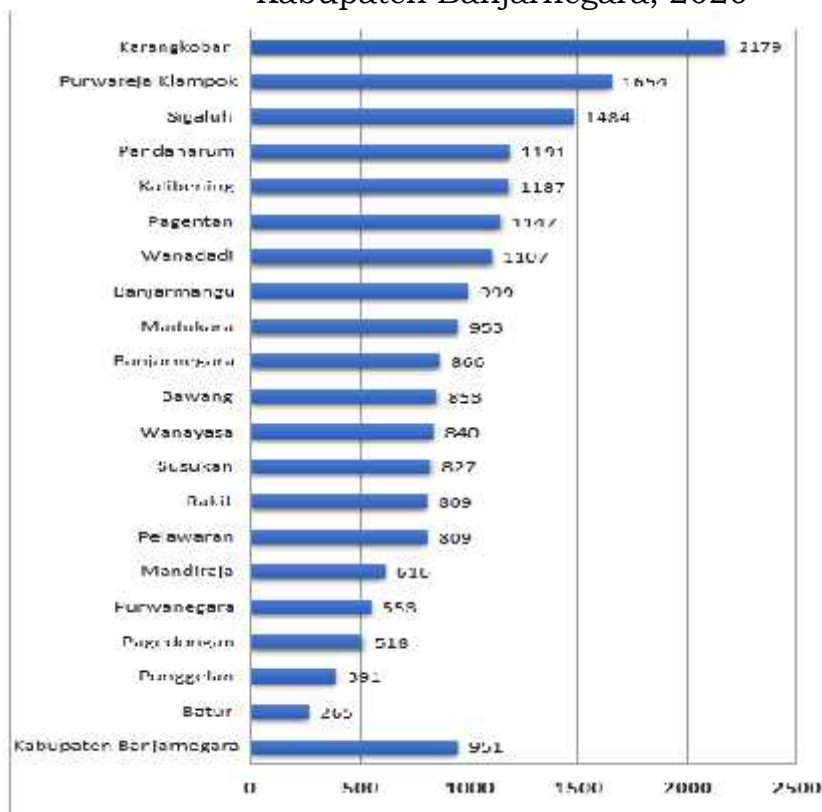
1. Jumlah, kepadatan dan Pendidikan Penduduk

a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Jumlah Penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 1.017.767 jiwa, terdiri dari 517,056 laki-laki dan 500,711 perempuan, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 148,854 jiwa atau sebesar 1,54 persen dari jumlah penduduk hasil sensus 2010 sebanyak 868.913 jiwa.

Kepadatan penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebesar 951 jiwa per km², yang berarti bahwa setiap 1 km² luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, dihuni oleh sekitar 951 orang.

Tabel Grafik 2.11 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun,

Tabel 2.12. Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, 2020

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020
1. Susukan	62 706	1,80
2. Purwareja Klampok	47 657	1,69
3. Mandiraja	78 090	1,99
4. Purwanegara	81 764	1,95
5. Bawang	63 335	1,68
6. Banjarnegara	69 543	0,97
7. Pagedongan	41 736	2,05
8. Sigaluh	31 993	1,26
9. Madukara	45 952	1,33

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020
10. Banjarmangu	46 301	1,48
11. Wanadadi	33 553	1,54
12. Rakit	53 686	1,51
13. Punggelan	86 419	1,83
14. Karangkoobar	31 599	1,28
15. Pagentan	38 221	1,13
16. Pejawaran	44 571	1,16
17. Batur	40 826	1,12
18. Wanayasa	50 533	1,27
19. Kalibening	46 356	1,51
20. Pandanarum	22 926	1,41
Kabupaten Banjarnegara	1 017 767	1,54

b. Sex Ratio Penduduk

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Tabel 2.13. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, 2020

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020
1. Susukan	62 706	1,80
2. Purwareja Klampok	47 657	1,69
3. Mandiraja	78 090	1,99
4. Purwanegara	81 764	1,95
5. Bawang	63 335	1,68
6. Banjarnegara	69 543	0,97
7. Pagedongan	41 736	2,05
8. Sigaluh	31 993	1,26
9. Madukara	45 952	1,33
10. Banjarmangu	46 301	1,48
11. Wanadadi	33 553	1,54
12. Rakit	53 686	1,51
13. Punggelan	86 419	1,83
14. Karangkoobar	31 599	1,28
15. Pagentan	38 221	1,13
16. Pejawaran	44 571	1,16
17. Batur	40 826	1,12
18. Wanayasa	50 533	1,27
19. Kalibening	46 356	1,51
20. Pandanarum	22 926	1,41
Kabupaten Banjarnegara	1 017 767	1,54

Lanjutan Tabel 2.13

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1. Susukan	6,16	1 191
2. Purwareja Klampok	4,68	2 179
3. Mandiraja	7,67	1 484
4. Purwanegara	8,03	1 107
5. Bawang	6,22	1 147
6. Banjarnegara	6,83	2 650
7. Pagedongan	4,10	518
8. Sigaluh	3,14	809
9. Madukara	4,51	953
10. Banjarmangu	4,55	999
11. Wanadadi	3,30	1 187
12. Rakit	5,27	1 654
13. Punggelan	8,49	840
14. Karangobar	3,10	809
15. Pagentan	3,76	827
16. Pejawaran	4,38	853
17. Batur	4,01	866
18. Wanayasa	4,97	616
19. Kalibening	4,55	553
20. Pandanarum	2,25	391
Kab.Banjarnegara	100,00	951

Lanjutan Tabel 2.13

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
1. Susukan	102,03
2. Purwareja Klampok	101,13
3. Mandiraja	101,33
4. Purwanegara	101,65
5. Bawang	101,80
6. Banjarnegara	101,29
7. Pagedongan	104,10
8. Sigaluh	101,73
9. Madukara	103,81
10. Banjarmangu	104,37
11. Wanadadi	102,38
12. Rakit	102,28
13. Punggelan	104,01
14. Karangobar	107,25
15. Pagentan	103,12
16. Pejawaran	106,62
17. Batur	106,86
18. Wanayasa	106,63
19. Kalibening	104,21
20. Pandanarum	104,86
Kabupaten Banjarnegara	103,26

Catatan:

1 Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/ Juni)/

Sumber Badan Pusat Statistik

Tabel 2.14. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara, 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	37,871	36,767	74,638
5-9	39,660	37,823	77,483
10-14	40,152	37,968	78,120
15-19	40,164	37,936	78,100
20-24	40,269	37,765	78,034
25-29	42,364	40,270	82,634
30-34	41,283	39,124	80,407
35-39	40,270	38,810	79,080
40-44	37,033	35,993	73,026
45-49	34,139	34,198	68,337
50-54	31,140	30,861	62,001
55-59	27,076	27,319	54,395
60-64	22,964	22,789	45,753
65-69	17,824	17,678	35,502
70-74	12,747	12,280	25,027
75+	12,100	13,130	25,230
Kabupaten Banjarnegara	517,056	500,711	1,017,767

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2020

c. Pendidikan Penduduk

Pada tahun 2020, jumlah guru pada sekolah negeri sebesar: SD (3.766), SMP (1.478), SMA (414). Sedangkan jumlah guru pada sekolah swasta adalah sebesar: SD (131), SMP (162), SMA (58).

Jumlah murid pada sekolah negeri, sebanyak SD (69.434), SMP (26.590), SMA (6.673). Sedangkan jumlah murid pada sekolah swasta sebesar SD (3.625), SMP (3.074), SMA (851).

Jumlah guru pada sekolah MI (1.706), MTS (828), MA (393). Sedangkan Jumlah murid pada sekolah MI (23.732), MTS (11.563), MA (4.465) Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2019 untuk tingkat SD sebesar 102,48 persen, SLTP sebesar 95,10 persen dan SLTA sebesar 71,90 persen.

Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2019 untuk SD sebesar 96,75 persen, SLTP sebesar 76,53 persen dan SLTA sebesar 51,76 persen

Tabel 2.15. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara, 2020

Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
1. Susukan	15	6	-	1	-
2. Purwareja Klampok	8	3	2	2	-
3. Mandiraja	16	6	-	2	-
4. Purwanegara	13	7	1	1	-
5. Bawang	18	7	3	2	-
6. Banjarnegara	13	7	5	6	2
7. Pagedongan	9	7	2	-	-
8. Sigaluh	15	4	2	1	-
9. Madukara	20	6	2	-	1
10. Banjarmangu	17	6	-	1	-

Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
11. Wanadadi	11	3	2	1	–
12. Rakit	11	5	1	1	–
13. Punggelan	17	8	–	1	–
14. Karangobar	13	4	2	2	–
15. Pagentan	16	5	–	–	–
16. Pejawaran	17	7	–	2	–
17. Batur	8	2	1	–	–
18. Wanayasa	17	7	1	1	–
19. Kalibening	16	6	2	1	–
20. Pandanarum	8	4	–	1	–
Kabupaten Banjarnegara	278	110	26	26	3

Sumber data : : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)

Tabel 2.16 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Banjarnegara, 2020

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Presentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
0	274 456	9 946	284 402	96,50
1	79 897	7 394	87 291	91,53
2	78 875	9 962	88 837	88,79
3	32 945	1 692	34 637	95,12
Jumlah	466 173	28 994	495 167	94,14

Catatan : 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)

1. Sekolah Menengah Pertama/ Junior High School
2. Sekolah Menengah Atas
3. Perguruan Tinggi
1. Mencari pekerjaan
2. Mempersiapkan usaha
3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

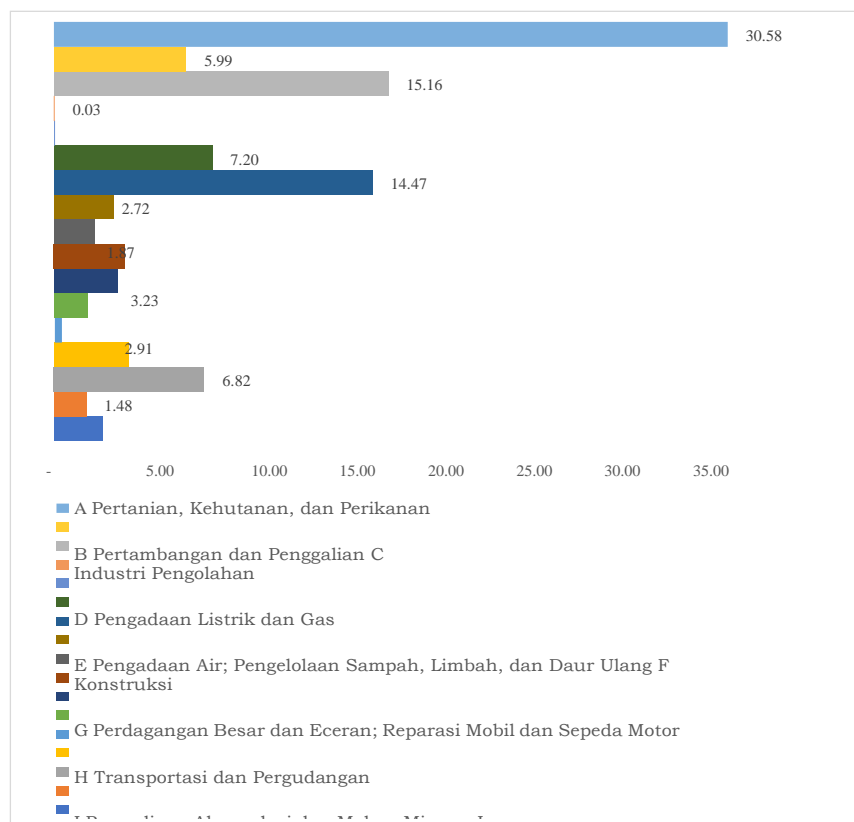
Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

d. Mata Pencaharian Penduduk

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan kontraksi sebesar 1,32 persen (2019 = 5,60 persen).

Lapangan usaha yang mendominasi di Kabupaten Banjarnegara adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan proporsi sebesar 30,58 persen dari total PDRB.

Tabel Grafik 2.17. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banjarnegara, 2016–2020



Sumber data : Kabupaten Banjarnegara dalam angka 2021

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari penduduk Kabupaten Banjarnegara bekerja pada sektor pertanian.

e. Tingkat Kemiskinan

Jumlah keluarga dan jumlah keluarga Pra Sejahtera dalam tiap kecamatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18. Jumlah rumah tangga dan individu, menurut status kesejahteraan Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, 2020

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Total
	Kesejahteraan 1	Kesejahteraan 2	Kesejahteraan 3	Kesejahteraan 4	Kesejahteraan 5	
1. Susukan	835	1 675	1 994	2 732	1 646	8 882
2. Purwareja Klampok	542	986	1 268	1 817	1 181	5 794
3. Mandiraja	706	1 374	1 647	2 377	1 332	7 436
4. Purwanegara	662	1 422	2 016	3 224	1 854	9 178
5. Bawang	703	1 343	1 534	2 238	1 139	6 957
6. Banjarnegara	336	807	1 191	1 967	1 378	5 679
7. Pagedongan	590	1 095	1 191	1 558	690	5 124
8. Sigaluh	270	627	764	1 106	634	3 401
9. Madukara	440	862	1 104	1 856	1 113	5 375
10. Banjarmangu	355	996	1 531	2 240	1 071	6 193
11. Wanadadi	327	801	1 167	2 039	1 143	5 477
12. Rakit	426	946	1 404	2 446	1 409	6 631
13. Punggelan	1 223	2 227	2 875	4 282	2 075	12 682
14. Karangkobor	405	803	1 021	1 427	626	4 282

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					
	Kesejahteraan 1	Kesejahteraan 2	Kesejahteraan 3	Kesejahteraan 4	Kesejahteraan 5	Total
15. Pagentan	530	898	989	1 354	718	4 489
16. Pejawaran	574	1 353	1 731	2 578	1 649	7 885
17. Batur	69	313	738	2 285	1 828	5 233
18. Wanayasa	425	1 176	1 834	2 904	2 183	8 522
19. Kalibening	246	669	1 053	1 982	1 878	5 828
20. Pandanarum	50	214	380	994	1 017	2 655
Kabupaten Banjarnegara	9 714	20 587	27 432	43 406	26 564	127 703

Lanjutan Tabel 2.18

Kecamatan	Jumlah Individu					
	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 4+	Total
1. Susukan	4 733	7 871	7 915	8 261	3 257	32 037
2. Purwareja Klampok	3 052	4 488	4 928	5 184	2 351	20 003
3. Mandiraja	4 145	6 325	6 328	6 773	2 875	26 446
4. Purwanegara	3 623	6 196	7 336	9 145	3 867	30 167
5. Bawang	3 925	5 866	5 470	5 988	2 343	23 592
6. Banjarnegara	1 940	4 007	4 944	6 518	3 193	20 602
7. Pagedongan	3 064	4 455	3 916	3 868	1 384	16 687
8. Sigaluh	1 543	2 882	2 944	3 232	1 245	11 846
9. Madukara	2 453	3 931	4 181	5 420	2 291	18 276
10. Banjarmangu	1 987	4 671	5 897	6 346	2 158	21 059
11. Wanadadi	1 851	3 639	4 447	6 158	2 482	18 577
12. Rakit	2 257	4 383	5 490	6 948	2 957	22 035
13. Punggelan	6 740	9 719	10 439	12 213	4 592	43 703
14. Karangobar	2 222	3 599	3 875	4 330	1 536	15 562
15. Pagentan	2 715	3 636	3 369	3 541	1 446	14 707
16. Pejawaran	2 997	5 578	6 064	7 700	4 189	26 528
17. Batur	396	1 544	3 215	8 041	4 391	17 587
18. Wanayasa	2 471	5 614	7 458	10 083	6 427	32 053
19. Kalibening	1 368	3 212	4 402	7 106	4 788	20 876
20. Pandanarum	285	1 006	1 515	3 261	2 368	8 435
Kabupaten Banjarnegara	53 767	92 622	104 133	130 116	60 140	440 778

Catatan :

Desil 1 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)

Desil 2 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia)

Desil 3 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia)

Desil 4 (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% - 40% terendah di Indonesia)

Sumber data : BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang paling tinggi persentase keluarga Pra Sejahtera adalah Kecamatan Punggelan yang terletak pada wilayah Utara Banjarnegara, disebabkan oleh Daerah Punggelan mempunyai Topografi pegunungan yang masih sulit dijangkau.

2. Peran Sera Wanita dalam Kegiatan Irigasi

Pada Kabupaten Banjarnegara peran wanita dalam kegiatan pengelolaan irigasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.19: Peran Wanita dalam kegiatan Irigasi di Kabupaten

No	Kegiatan Irigasi	Peran dan Keterlibatan Wanita
1	Garapan lahan sawah	10% berperan dalam garapan lahan sawah
2	Penanaman	90% berperan dalam membantu proses penanaman
3	Pemberian pupuk	15% membantu pemberian pupuk
4	Pembersihan rumput	80% berpartisipasi dalam pembersihan rumput
5	Pemberantasan hama	10% berperan dalam pemberantasan hama
6	Panen	65% ikut membantu dalam panen
7	Pengolahan hasil panen	45% berperan dalam pengolahan panen
8	Pemasaran hasil panen	10% berperan dalam pemasaran hasil panen
9	Pengurus P3A/GP3A	10% menjadi pengurus seperti Bendahara, Sekretaris, Anggota.
10	Anggota P3A/GP3A	30% keanggotaan terdiri dari wanita

Sumber data: Analisis 2021.

G. KONDISI SISTEM IRIGASI

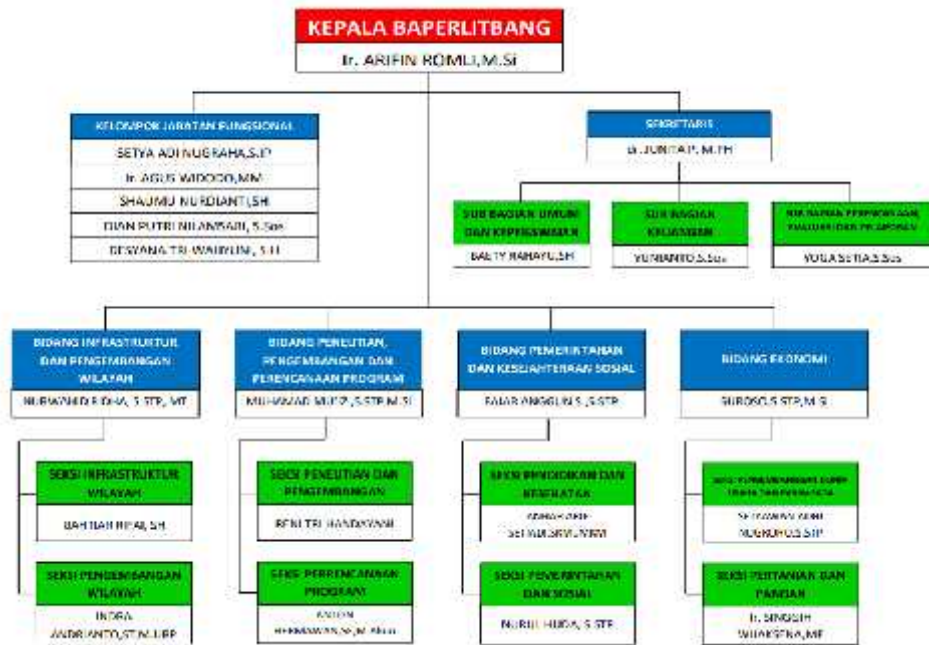
1. Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI)

Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) merupakan sebuah wadah yang dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi. KPI terdiri dari tiga unsur yaitu Instansi Pemerintah yang membidangi Irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan Komisi Irigasi.

a. Instansi Pemerintah yang membidangi Irigasi

Instansi pemerintah yang membidangi irigasi di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari tiga unsur yaitu BAPERLITBANG, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Gambar gambar struktur organisasi dari masing-masing Dinas sebagai berikut.

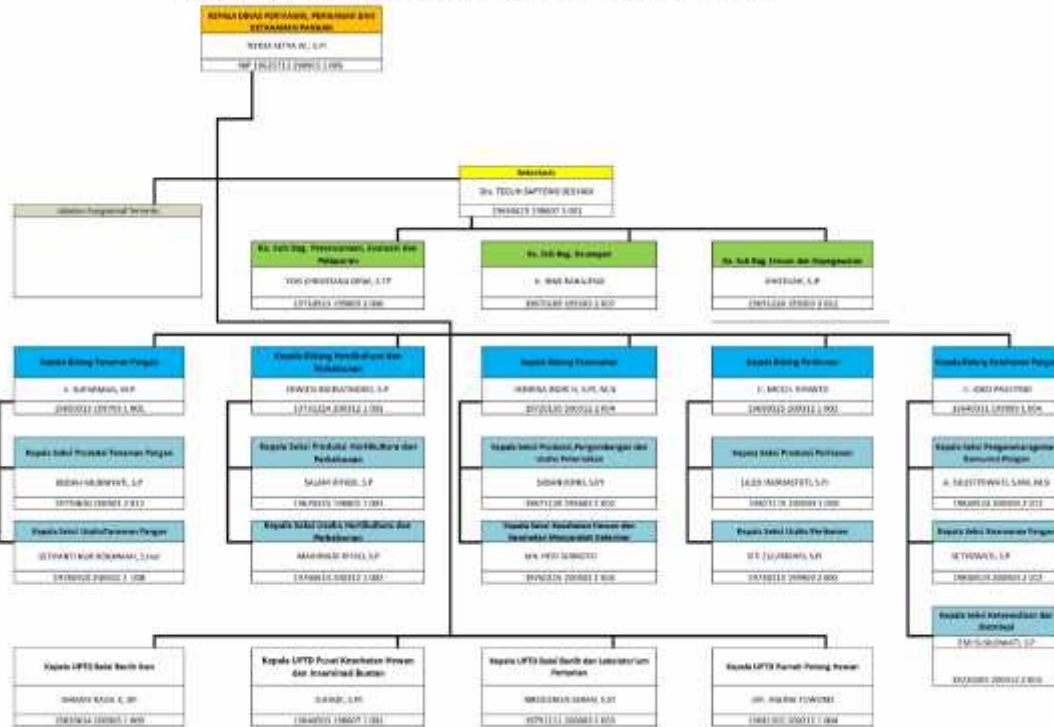


Gambar 2.13 Struktur Organisasi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara



Gambar 2.14 Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Banjarnegara

PETA JABATAN DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN



Gambar 2.15 Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Kabupaten Banjarnegara

Kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan irigasi, sesuai dengan role sharing yang dikeluarkan oleh BAPPENAS adalah sbb:

- 1) Baperlitbang bertanggung jawab dalam urusan koordinasi dan kelembagaan irigasi.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air bertanggung jawab dalam urusan teknis irigasi sedangkan
- 3) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DINTANKAN dan KP) bertanggung jawab dalam urusan teknis pertanian.

Ketiga unsur tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.

- 1) Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara KPI mempunyai Peran dan fungsi sebagai berikut:

- Mewujudkan pembagian kewenangan pusat dan daerah dan pengalihan sumber dana pengairan dan irigasi;
- Mendorong adanya koordinasi antar dinas terkait/ sektor;
- Menata kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di daerah;
- Meningkatkan Sumberdaya Manusia dalam pengelolaan irigasi;
- Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah sehingga tersedia pembiayaan yang memadai untuk pengelolaan irigasi;

- 2) Sementara Dinas PUPR mempunyai tugas dan fungsi yang sentral dalam KPI karena Istansi ini merupakan tempat pelaksanaan Pengembangan dan Pengeloaan Irigasi. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, konservasi dan pembuangannya melalui kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi . Secara keseluruhan kegiatan operasi dilakukan sebagai berikut:
 - Pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, dll);
 - Pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit;
 - Pekerjaan membuat Rencana Penyediaan Air Tahunan, pembagian dan pemberian Air Tahunan, Rencana Tata Tanam Tahunan, Rencana Pengeringan, dll.;
 - Pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air (termasuk pekerjaan: membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu);
 - Pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir;
 - Pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur;
 - Koordinasi antar instansi terkait;
 - Monitoring dan Evaluasi kegiatan Operasi Jaringan Irigasi.
- 3) Sedangkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan fokus terhadap petani, pengembangan pertanian, dan pemberdayaan Poktan dan Gapoktan. Selain itu, Dinas yang membidangi Pertanian ini menyusun Jaminan Keberlanjutan Pertanian.

b. Informasi dan Kinerja Komisi Irigasi

Tugas Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara yang tertuang dalam SK Bupati Banjarnegara Nomor : 050/232 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara. membantu Bupati dengan tugas :

- 1) Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- 2) Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
- 3) Merekomendasikan prioritas alokasi dan pengelolaan irigasi melalui form musyawarah perencanaan pembangunan;
- 4) Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi dan lahan beririgasi;
- 5) Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serra rencana pembagian dan pemberian air;

- 6) Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana Pemeliharaan dan rehabilitasi;
- 7) Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
- 8) Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- 9) Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- 10) Membahas memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- 11) Memberi masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- 12) Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- 13) Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, selama melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara:

1) Ketua Komir :

- Membantu Bupati dalam mengelola jaringan irigasi pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengkoordinasikan penyusunan akan kebijakan kondisi dan fungsi irigasi, rencana tahunan air irigasi, prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi, rencana tanam, rencana pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi serta evaluasi aset irigasi.
- Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara berbagai usulan dan masukan dari Ketua Harian.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Pelaksanaan Kegiatan.

2) Ketua Harian Komir :

- Membantu Ketua Komisi Irigasi dalam mengelola jaringan irigasi pada daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang.
- Menyusun dan menyempurnakan pelaksanaan kewenangan Ketua Komisi Irigasi Kabupaten.
- Menyelenggarakan arahan, bimbingan, kepada Anggota Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara.
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya kepada Ketua Komisi Irigasi Kabupaten.

3) Sekretaris Komir :

- Menyusun dan menyempurnakan Standar Penyelenggaraan Urusan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Pemberdayaan Anggota.
- Merencanakan pengadaan kebutuhan internal maupun administratif.

- Merencanakan, mengelola dan meningkatkan pemberdayaan anggota.
- Menerima Petunjuk/Arahan sesuai disposisi atasan.
- Mendisposisikan Surat Kepada anggota/sekretariat Komisi Irigasi sesuai dengan Bidang Tugasnya.

4) Anggota :

- Ikut Serta dalam Pelaksanaan Rapat Komisi Irigasi.
- Melaksanakan Tugas Sesuai dengan bidang masing masing.
- Memberikan Pendapat dalam Pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi di Komisi Irigasi.

Hak Dan Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara :

1) Hak Anggota Komisi Irigasi

- Mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
- Menyampaikan aspirasi dan pendapat;
- Mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
- Ikut dalam proses pengambilan keputusan;
- Mempunyai hak suara yang sama; dan
- Dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam dewan sumber daya air kabupaten/kota;

2) Kewajiban Anggota Komisi Irigasi

- Membantu Bupati dalam Mengelola Jaringan Irigasi pada daerah irigasi yang pengelolaannya;
- Menjadi Wewenang dan tanggung Jawab Perintah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengkoordinasikan Penyusunan akan kebijakan kondisi dan fungsi irigasi, rencana tahunan air irigasi, prioritas alokasi dana;
- Pengelolaan irigasi, rencana tanam, rencana pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi serta evaluasi aset irigasi;
- Menyelenggarakan Kerjasama dan Koordinasi dengan pihak lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

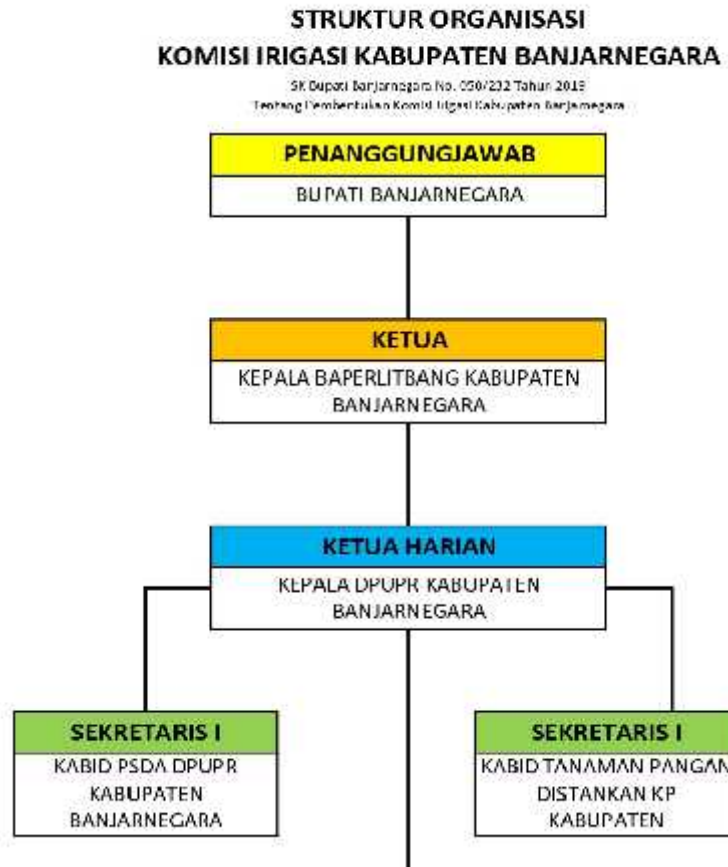
Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara telah dibentuk sesuai SK Bupati No.050/232 Tahun 2019. Komisi Irigasi mempunyai total 51 anggota, terdiri dari wakil instansi pemerintah, Swasta dan wakil P3A/GP3A/IP3A sbb :

Tabel 2.12 Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara

No.	Anggota yang Mewakili	Orang
1	Instansi Pemerintah	40
2	Swasta	4
2	P3A/GP3A/IP3A	7
	TOTAL	52

Struktur organisasi Komisi Irigasi, yang memperlihatkan berapa anggota berasal dari instansi pemerintah, dan berapa anggota non-pemerintah.

Berikut Susunan Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara :



TABEL ANGGOTA			
1	Kaporles Banjarnegara	23	Camat Rakit
2	Dandim Banjarnegara	24	Camat Punggelan
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banjarnegara	25	Camat Karangkoobar
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banjarnegara	26	Camat Pagentan
5	Kepala Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara	27	Camat Pejawaran
6	Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara	28	Camat Batur
7	Kepala Disperindakop UMK Kabupaten Banjarnegara	29	Camat Wanayasa
8	Kepala DPKPLH Kabupaten Banjarnegara	30	Camat Kalibening
9	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara	31	Camat Pandanarum
10	Kepala Kantor BPN Kabupaten Banjarnegara	32	Kepala BBWS Serayu Opak
11	Kepala Balai PU SDA TARU Serayu Citanduy	33	Perum Perhutani Kabupaten Banjarnegara

TABEL ANGGOTA			
12	Camat Susukan	34	Pimpinan UBP Mrica Indonesia Power Banjarnegara
13	Camat Purwareja Klampok	35	Direktur PDAM Banjarnegara
14	Camat Mandiraja	36	Ketua HKTI Kabupaten Banjarnegara
15	Camat Purwanegara	37	Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi DPUPR Kabupaten Banjarnegara
16	Camat Bawang	38	Ketua GP3A GUNA TIRTA
17	Camat Banjarnegara	39	Ketua GP3A JAMBE TIRTA
18	Camat Pagedongan	40	Ketua GP3A SERAYU JAYA
19	Camat Sigaluh	41	Ketua GP3A BANJARCAHYANA
20	Camat Madukara	42	Ketua GP3A LESTARI
21	Camat Banjarmangu	43	Ketua GP3A CLANGAP JAYA
22	Camat Wanadadi	44	Ketua GP3A GAJAH ULING
		45	Ketua GP3A TIRTA MAKMUR

Gambar 2.16 Struktur Organisasi Kepengurusan Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara

c. Informasi dan Kinerja P3A/GP3A

Secara keseluruhan P3A di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 120 P3A dimana hampir sebagian besar diantaranya membutuhkan revitalisasi dan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Selain itu terdapat 5 GP3A di Kabupaten Banjarnegara yang masuk menjadi Anggota Komisi Irigasi dan telah dilaksanakan kegiatan Reorganisasi dan Pembentukan pada tahun 2021. Hasil PSETK menunjukkan secara umum masih banyak Daerah Irigasi yang memerlukan reorganisasi dan pembentukan P3A dan GP3A serta hanya memiliki Poktan dan Gapoktan terutama pada Daerah Irigasi yang memiliki luas dibawah 100 Hektar. Secara detail penjabaran P3A tersebut diuraikan dalam Form 2.01.

2. Kondisi Aset Irigasi

Kondisi Aset Irigasi dilihat dari beberapa bagaian diantaranya kondisi bendung, intake, kantong lumpur, kolam olak, pintu air, semua kondisi jenis saluran, bangunan bagi. Bangunan sadap, jembatan, gorong-gorong, siphon, terjunan dan got miring. Secara umum kesemua bagian aset irigasi tersebut mengalami Rusak Berat (RB) dan Rusak Sedang (RS). Secara detail kondisi aset tersebut diuraikan dalam Form 3.01, Form 3.02, Form 3.03 dan Form 3.04.

3. Kondisi Kinerja Sistem Irigasi

Kinerja Daerah Irigasi Kabupaten Banjarnegara secara umum masih didominasi oleh dalam kategori kurang dan jelek. Secara Kinerja terdapat satu DI yang berkinerja Sangat baik dan tiga DI yang berkinerja baik. Secara detail penjabaran Daerah Irigasi tersebut diuraikan dalam Form 3.06.

Tabel. 2.16 Ringkasan Indek Kinerja Sistem Irigasi

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
1	Adiresa	18	58.43	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.17	Kinerja Jelek
2	Adisara	18	57.08	Kinerja Jelek	41.92	Kinerja Jelek	49.50	Kinerja Jelek
3	Anjatan	30	54.79	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	44.39	Kinerja Jelek
4	Arus I	74	57.38	Kinerja Jelek	41.65	Kinerja Jelek	49.52	Kinerja Jelek
5	Arus II	100	54.13	Kinerja Jelek	35.74	Kinerja Jelek	44.93	Kinerja Jelek
6	Asinan	30	53.86	Kinerja Jelek	32.30	Kinerja Jelek	43.08	Kinerja Jelek
7	Ati	15	57.89	Kinerja Jelek	34.02	Kinerja Jelek	45.95	Kinerja Jelek
8	Babadan	100	60.10	Kinerja Jelek	34.02	Kinerja Jelek	47.06	Kinerja Jelek
9	Balun	70	47.95	Kinerja Jelek	32.76	Kinerja Jelek	40.36	Kinerja Jelek
10	Bandingan	60	43.78	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	38.85	Kinerja Jelek
11	Bandingan I	13	60.66	Kinerja Jelek	7.99	Kinerja Jelek	34.33	Kinerja Jelek
12	Bandingan II	10	58.45	Kinerja Jelek	33.95	Kinerja Jelek	46.20	Kinerja Jelek
13	Bandungan	35	55.74	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	47.01	Kinerja Jelek
14	Banger I	131	50.47	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	42.22	Kinerja Jelek
15	Banger II	25	54.41	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	44.20	Kinerja Jelek
16	Banjaran	51	47.39	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	40.67	Kinerja Jelek
17	Banteng I	34	63.46	Kinerja Jelek	46.39	Kinerja Jelek	54.93	Kinerja Jelek
18	Banteng II	49	54.80	Kinerja Jelek	35.25	Kinerja Jelek	45.02	Kinerja Jelek
19	Banyakan	35	52.12	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	43.03	Kinerja Jelek
20	Banyon I	45	59.06	Kinerja Jelek	42.17	Kinerja Jelek	50.61	Kinerja Jelek
21	Banyon II	30	58.20	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	46.09	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
22	Banyon III	50	55.77	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	44.87	Kinerja Jelek
23	Banyusumerep	35	55.90	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	44.92	Kinerja Jelek
24	Batur I	30	49.89	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	41.94	Kinerja Jelek
25	Batur II	75	53.37	Kinerja Jelek	35.99	Kinerja Jelek	44.67	Kinerja Jelek
26	Bedana	80	54.94	Kinerja Jelek	34.06	Kinerja Jelek	44.50	Kinerja Jelek
27	Bedana I	27	55.30	Kinerja Jelek	35.72	Kinerja Jelek	45.51	Kinerja Jelek
28	Bening I	12	50.68	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	44.00	Kinerja Jelek
29	Bening II	12	50.80	Kinerja Jelek	8.00	Kinerja Jelek	29.40	Kinerja Jelek
30	Bening III	20	49.92	Kinerja Jelek	34.39	Kinerja Jelek	42.15	Kinerja Jelek
31	Bening IV	30	50.26	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	42.12	Kinerja Jelek
32	Beran	31	49.37	Kinerja Jelek	34.29	Kinerja Jelek	41.83	Kinerja Jelek
33	Beran II	25	48.91	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	41.44	Kinerja Jelek
34	Berasan I	30	53.36	Kinerja Jelek	33.44	Kinerja Jelek	43.40	Kinerja Jelek
35	Berasan II	15	55.71	Kinerja Jelek	33.55	Kinerja Jelek	44.63	Kinerja Jelek
36	Berem	65	51.99	Kinerja Jelek	35.83	Kinerja Jelek	43.90	Kinerja Jelek
37	Berta I	52	30.26	Kinerja Jelek	29.42	Kinerja Jelek	29.84	Kinerja Jelek
38	Berta II	30	59.79	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.85	Kinerja Jelek
39	Betaka	35	57.82	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.87	Kinerja Jelek
40	Betaka II	25	54.59	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.25	Kinerja Jelek
41	Bilungan	10	58.55	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	46.26	Kinerja Jelek
42	Bodas	50	51.49	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	42.73	Kinerja Jelek
43	Bodas Punggelan	95	58.29	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.10	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
44	Bodeh	35	56.14	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	47.25	Kinerja Jelek
45	Bojong Batur	75	56.51	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.21	Kinerja Jelek
46	Bojong I	150	58.62	Kinerja Jelek	8.00	Kinerja Jelek	33.30	Kinerja Jelek
47	Bojong I Pekikiran	10	57.95	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.96	Kinerja Jelek
48	Bojong II	25	57.67	Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian	33.92	Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian	45.80	Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian
49	Bojong II Pekikiran	25	58.96	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	46.47	Kinerja Jelek
50	Bojong III	75	52.97	Kinerja Jelek	35.79	Kinerja Jelek	44.37	Kinerja Jelek
51	Bojong III Pakikiran	15	55.43	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.67	Kinerja Jelek
52	Bojong IV	85	54.70	Kinerja Jelek	36.99	Kinerja Jelek	45.84	Kinerja Jelek
53	Bomati	40	49.61	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	41.76	Kinerja Jelek
54	Bombong I	117	54.91	Kinerja Jelek	35.92	Kinerja Jelek	45.41	Kinerja Jelek
55	Bombong II	45	58.46	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.19	Kinerja Jelek
56	Bombong III	70	49.68	Kinerja Jelek	33.62	Kinerja Jelek	41.65	Kinerja Jelek
57	Bombong IV	120	53.84	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	43.88	Kinerja Jelek
58	Bongoh I	15	58.33	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.13	Kinerja Jelek
59	Bongoh II	63	59.44	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.68	Kinerja Jelek
60	Brakah I	24	56.97	Kinerja Jelek	32.13	Kinerja Jelek	44.55	Kinerja Jelek
61	Brakah II	142	55.40	Kinerja Jelek	29.42	Kinerja Jelek	45.00	Kinerja Jelek
62	Brayut	25	29.48	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	31.70	Kinerja Jelek
63	Brengkok	30	53.44	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	43.69	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
64	Brengkut	133	33.14	Kinerja Jelek	46.43	Kinerja Jelek	39.79	Kinerja Jelek
65	Busung	12	55.69	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.81	Kinerja Jelek
66	Butek	15	56.11	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.04	Kinerja Jelek
67	Cacaban I	109	50.62	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	42.27	Kinerja Jelek
68	Cangkring I	15	58.41	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.16	Kinerja Jelek
69	Cangkring II	20	57.65	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.79	Kinerja Jelek
70	Cengang I	30	52.14	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	43.04	Kinerja Jelek
71	Cengang II	25	55.35	Kinerja Jelek	35.80	Kinerja Jelek	45.57	Kinerja Jelek
72	Cengang III	30	55.53	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	44.75	Kinerja Jelek
73	Cengingis	25	55.61	Kinerja Jelek	39.99	Kinerja Jelek	47.79	Kinerja Jelek
74	Clangap	683	66.80	Kinerja Jelek	63.81	Kinerja Jelek	65.60	Kinerja Jelek
75	Clapar	120	56.49	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.20	Kinerja Jelek
76	Cledok	30	48.77	Kinerja Jelek	31.29	Kinerja Jelek	40.04	Kinerja Jelek
77	Condong Campur	150	59.35	Kinerja Jelek	34.24	Kinerja Jelek	46.79	Kinerja Jelek
78	Curug	60	57.18	Kinerja Jelek	34.23	Kinerja Jelek	45.70	Kinerja Jelek
79	Curug II	12	58.73	Kinerja Jelek	43.47	Kinerja Jelek	51.10	Kinerja Jelek
80	Curug Pandanarum	52	48.15	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	41.06	Kinerja Jelek
81	Dagan	10	56.93	Kinerja Jelek	36.01	Kinerja Jelek	46.46	Kinerja Jelek
82	Dawung	13	55.58	Kinerja Jelek	35.07	Kinerja Jelek	45.32	Kinerja Jelek
83	Deles	30	56.19	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.09	Kinerja Jelek
84	Depok	45	59.50	Kinerja Jelek	36.39	Kinerja Jelek	47.94	Kinerja Jelek
85	Dolog I	150	53.43	Kinerja Jelek	34.02	Kinerja Jelek	43.72	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
86	Dolog II	40	53.16	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	43.57	Kinerja Jelek
87	Dungbarung	10	63.45	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	48.71	Kinerja Jelek
88	Duren	40	60.38	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	47.17	Kinerja Jelek
89	Gandik	10	58.13	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	48.46	Kinerja Jelek
90	Gandulan	43	55.36	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	44.66	Kinerja Jelek
91	Gebang	85	58.05	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	46.01	Kinerja Jelek
92	Gemawang I	16	55.45	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	44.71	Kinerja Jelek
93	Gemawang II	17	61.77	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	47.88	Kinerja Jelek
94	Gemawang III	27	53.65	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	43.82	Kinerja Jelek
95	Gesek	30	55.52	Kinerja Jelek	35.79	Kinerja Jelek	45.65	Kinerja Jelek
96	Gintung	50	50.41	Kinerja Jelek	39.06	Kinerja Jelek	44.73	Kinerja Jelek
97	Gintung I	14	62.21	Kinerja Jelek	36.00	Kinerja Jelek	49.10	Kinerja Jelek
98	Gintung II	23	50.69	Kinerja Jelek	33.75	Kinerja Jelek	42.21	Kinerja Jelek
99	Glogak	32	56.16	Kinerja Jelek	34.08	Kinerja Jelek	45.11	Kinerja Jelek
100	Godongan	100	56.86	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	45.41	Kinerja Jelek
101	Gondang Pakelen	44	57.36	Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian	33.97	Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian	45.66	Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian
102	Gondang Tempuran	40	58.83	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	46.40	Kinerja Jelek
103	Grenjeng	50	51.41	Kinerja Jelek	35.72	Kinerja Jelek	43.57	Kinerja Jelek
104	Growong I	35	57.86	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.92	Kinerja Jelek
105	Growong II	93	58.11	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	46.04	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
106	Gugikan	63	50.72	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	42.34	Kinerja Jelek
107	Gumawang I	18	60.54	Kinerja Jelek	29.47	Kinerja Jelek	45.01	Kinerja Jelek
108	Gumawang II	38	64.26	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	52.14	Kinerja Jelek
109	Gumawang III	12	52.30	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	43.13	Kinerja Jelek
110	Gumawang IV	53	55.09	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	44.53	Kinerja Jelek
111	Gumelar	40	56.99	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.49	Kinerja Jelek
112	Guntur	180	57.91	Kinerja Jelek	33.41	Kinerja Jelek	45.65	Kinerja Jelek
113	Gupitan	50	58.67	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	46.32	Kinerja Jelek
114	Guyangan	10	52.90	Kinerja Jelek	36.72	Kinerja Jelek	44.81	Kinerja Jelek
115	Igir Tugel	100	55.32	Kinerja Jelek	34.99	Kinerja Jelek	45.15	Kinerja Jelek
116	Ireng	25	56.24	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.11	Kinerja Jelek
117	Ireng Sigaluh	17	56.53	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.25	Kinerja Jelek
118	Jamban	40	47.71	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	40.85	Kinerja Jelek
119	Jambe	46	57.60	Kinerja Jelek	33.67	Kinerja Jelek	45.63	Kinerja Jelek
120	Jarompang	104	55.24	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	44.61	Kinerja Jelek
121	Jarompang III	10	56.03	Kinerja Jelek	34.10	Kinerja Jelek	45.06	Kinerja Jelek
122	Jarompang IV	15	58.98	Kinerja Jelek	33.68	Kinerja Jelek	46.33	Kinerja Jelek
123	Jawar	30	58.33	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	46.15	Kinerja Jelek
124	Jawar Majasari	30	49.95	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	43.56	Kinerja Jelek
125	Jenggot	126	52.22	Kinerja Jelek	33.67	Kinerja Jelek	42.94	Kinerja Jelek
126	Jlarang	30	57.69	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	45.83	Kinerja Jelek
127	Kalitengah	30	52.76	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	43.36	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
128	kalitlaga	45	44.91	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	39.41	Kinerja Jelek
129	Kaliwungu	35	59.48	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	46.72	Kinerja Jelek
130	Kandangwangi I	151	59.10	Kinerja Jelek	34.34	Kinerja Jelek	46.72	Kinerja Jelek
131	Kandangwangi II	113	52.06	Kinerja Jelek	34.18	Kinerja Jelek	43.12	Kinerja Jelek
132	Karanggayam	30	59.41	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.67	Kinerja Jelek
133	Karangkobor	25	60.19	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	47.13	Kinerja Jelek
134	Karangnangka Asinan	30	57.99	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	45.98	Kinerja Jelek
135	Karangnangka Pagentan	30	59.48	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	46.72	Kinerja Jelek
136	Karekan	60	45.52	Kinerja Jelek	33.00	Kinerja Jelek	39.25	Kinerja Jelek
137	Kayim I	15	59.14	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	46.55	Kinerja Jelek
138	Kayim II	88	55.10	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	44.53	Kinerja Jelek
139	Kayim III	33	51.33	Kinerja Jelek	31.42	Kinerja Jelek	41.37	Kinerja Jelek
140	Kayunan	36	61.19	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	47.55	Kinerja Jelek
141	Kedawung I	25	55.90	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	44.94	Kinerja Jelek
142	Kedawung II	40	53.27	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	43.63	Kinerja Jelek
143	Kedung kendil	15	55.34	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.63	Kinerja Jelek
144	Kembang Susukan	30	58.64	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.28	Kinerja Jelek
145	Kembangan	10	62.05	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	48.01	Kinerja Jelek
146	Kemiri I	15	60.80	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	47.38	Kinerja Jelek
147	Kemit	21	57.06	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.49	Kinerja Jelek
148	Kencen	50	59.83	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	46.90	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
149	Kepuh	42	55.50	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	44.73	Kinerja Jelek
150	Kepuh II	20	56.11	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.02	Kinerja Jelek
151	Kesal	10	54.17	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	44.07	Kinerja Jelek
152	Kesenet	10	57.68	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.83	Kinerja Jelek
153	Keyudan	60	58.25	Kinerja Jelek	31.14	Kinerja Jelek	44.69	Kinerja Jelek
154	Klaang	17	59.72	Kinerja Jelek	34.08	Kinerja Jelek	46.90	Kinerja Jelek
155	Koser I	20	57.92	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	45.94	Kinerja Jelek
156	Koser II	10	53.00	Kinerja Jelek	35.50	Kinerja Jelek	44.25	Kinerja Jelek
157	Krangean I	40	48.65	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	41.36	Kinerja Jelek
158	Krangean II	20	45.86	Kinerja Jelek	33.31	Kinerja Jelek	39.58	Kinerja Jelek
159	Krangean III	40	55.70	Kinerja Jelek	38.85	Kinerja Jelek	47.27	Kinerja Jelek
160	Krangean IV	20	48.47	Kinerja Jelek	40.89	Kinerja Jelek	44.68	Kinerja Jelek
161	Krasak	35	56.49	Kinerja Jelek	35.29	Kinerja Jelek	45.88	Kinerja Jelek
162	Krikil	234	64.41	Kinerja Jelek	53.78	Kinerja Jelek	59.09	Kinerja Jelek
163	Kruncang I	31	52.39	Kinerja Jelek	35.25	Kinerja Jelek	43.81	Kinerja Jelek
164	Kruncang II	69	54.35	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	44.21	Kinerja Jelek
165	Kuang	62	56.34	Kinerja Jelek	35.29	Kinerja Jelek	45.81	Kinerja Jelek
166	Kuning	10	57.94	Kinerja Jelek	45.74	Kinerja Jelek	51.83	Kinerja Jelek
167	Kutukan	62	49.33	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	41.70	Kinerja Jelek
168	Langit	49	50.18	Kinerja Jelek	43.58	Kinerja Jelek	46.88	Kinerja Jelek
169	Langit I	20	52.70	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	43.31	Kinerja Jelek
170	Larangan I	14	55.26	Kinerja Jelek	32.96	Kinerja Jelek	44.11	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
171	Larangan II	13	53.03	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	43.55	Kinerja Jelek
172	Larangan III	25	54.84	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	44.46	Kinerja Jelek
173	Lebuh	25	55.21	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	44.60	Kinerja Jelek
174	Leler	25	49.08	Kinerja Jelek	36.42	Kinerja Jelek	42.75	Kinerja Jelek
175	Liangan	271	59.60	Kinerja Jelek	39.98	Kinerja Jelek	49.79	Kinerja Jelek
176	Ligung	30	55.80	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	44.94	Kinerja Jelek
177	Limbangan	923	59.05	Kinerja Jelek	50.36	Kinerja Jelek	54.70	Kinerja Jelek
178	Lintang Tiba	90	57.16	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.57	Kinerja Jelek
179	Loning I	82	55.72	Kinerja Jelek	37.89	Kinerja Jelek	46.80	Kinerja Jelek
180	Loning II	33	57.52	Kinerja Jelek	36.33	Kinerja Jelek	46.92	Kinerja Jelek
181	Lumajang I	20	57.04	Kinerja Jelek	31.34	Kinerja Jelek	44.19	Kinerja Jelek
182	Lumajang II	12	57.84	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.91	Kinerja Jelek
183	Lumajang III	84	58.75	Kinerja Jelek	35.56	Kinerja Jelek	47.15	Kinerja Jelek
184	Lumajang IV	61	59.59	Kinerja Jelek	36.23	Kinerja Jelek	47.90	Kinerja Jelek
185	Lumajang V	101	54.39	Kinerja Jelek	34.02	Kinerja Jelek	44.20	Kinerja Jelek
186	Lumbu	46	54.94	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	44.51	Kinerja Jelek
187	Majalengka	15	55.79	Kinerja Jelek	31.62	Kinerja Jelek	43.70	Kinerja Jelek
188	Mendelem	40	59.15	Kinerja Jelek	41.87	Kinerja Jelek	50.50	Kinerja Jelek
189	Meong	12	59.01	Kinerja Jelek	34.17	Kinerja Jelek	46.58	Kinerja Jelek
190	Mlengan	30	55.46	Kinerja Jelek	34.02	Kinerja Jelek	44.74	Kinerja Jelek
191	Mudal	30	49.48	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	41.73	Kinerja Jelek
192	Mujil	64	53.60	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	43.78	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
193	Muncar	20	58.08	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	46.03	Kinerja Jelek
194	Nagasari	60	57.14	Kinerja Jelek	33.97	Kinerja Jelek	45.55	Kinerja Jelek
195	Nggentu	70	54.10	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.01	Kinerja Jelek
196	Nosog I	50	53.64	Kinerja Jelek	34.11	Kinerja Jelek	43.87	Kinerja Jelek
197	Nosog II	150	56.24	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	45.09	Kinerja Jelek
198	Nyangkuh I	47	59.21	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	46.64	Kinerja Jelek
199	Nyangkuh II	37	58.57	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	46.26	Kinerja Jelek
200	Ori I	49	55.29	Kinerja Jelek	36.97	Kinerja Jelek	46.12	Kinerja Jelek
201	Ori II	58	59.10	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	46.59	Kinerja Jelek
202	Ori III	40	55.18	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.55	Kinerja Jelek
203	Pabungan	10	57.35	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	45.65	Kinerja Jelek
204	Pagedongan I Punggelan	60	49.90	Kinerja Jelek	32.54	Kinerja Jelek	41.21	Kinerja Jelek
205	Pagedongan II	50	56.15	Kinerja Jelek	34.94	Kinerja Jelek	45.54	Kinerja Jelek
206	Pagedongan watubelah	50	56.84	Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian	33.96	Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian	45.39	Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian
207	Pager I	80	56.19	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.08	Kinerja Jelek
208	Pager II	78	55.58	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	44.76	Kinerja Jelek
209	Pager III	111	57.63	Kinerja Jelek	34.76	Kinerja Jelek	46.20	Kinerja Jelek
210	Palet I	15	59.26	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	46.60	Kinerja Jelek
211	Palet II	20	58.05	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	46.06	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
212	Palet III	15	56.54	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	45.24	Kinerja Jelek
213	Palet IV	77	58.64	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	46.29	Kinerja Jelek
214	Panaraban	45	48.38	Kinerja Jelek	36.36	Kinerja Jelek	42.36	Kinerja Jelek
215	Pandan Arum	73	58.69	Kinerja Jelek	34.49	Kinerja Jelek	46.59	Kinerja Jelek
216	Pantog	60	56.96	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	45.47	Kinerja Jelek
217	Parungan	14	61.36	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	47.65	Kinerja Jelek
218	Paseh I	30	59.80	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	46.87	Kinerja Jelek
219	Paseh II	20	55.32	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	44.65	Kinerja Jelek
220	Paseh III	40	58.93	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	46.46	Kinerja Jelek
221	Pasuruhan	50	54.98	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.45	Kinerja Jelek
222	Penambangan I	40	53.15	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	43.55	Kinerja Jelek
223	Penambangan II	40	54.67	Kinerja Jelek	30.96	Kinerja Jelek	42.81	Kinerja Jelek
224	Pengarengan	40	63.66	Kinerja Jelek	35.09	Kinerja Jelek	49.37	Kinerja Jelek
225	Pereng	150	54.75	Kinerja Jelek	35.92	Kinerja Jelek	45.34	Kinerja Jelek
226	Pertinggi I	30	57.24	Kinerja Jelek	34.29	Kinerja Jelek	45.76	Kinerja Jelek
227	Pertinggi II	25	59.01	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	46.48	Kinerja Jelek
228	Pesangkalan	30	57.73	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	45.84	Kinerja Jelek
229	Pinggane	12	55.73	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.82	Kinerja Jelek
230	Pining	20	43.51	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	38.73	Kinerja Jelek
231	Plumbungan	20	59.16	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	46.57	Kinerja Jelek
232	Pucung	18	55.10	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	44.52	Kinerja Jelek
233	Purut	30	57.09	Kinerja Jelek	35.97	Kinerja Jelek	46.52	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
234	Putih I	20	58.09	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	46.02	Kinerja Jelek
235	Putih II	25	58.44	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	46.19	Kinerja Jelek
236	Ragajaya I	58	57.51	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	45.79	Kinerja Jelek
237	Ragajaya II	73	56.06	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	45.00	Kinerja Jelek
238	Rambang	10	54.39	Kinerja Jelek	33.44	Kinerja Jelek	43.91	Kinerja Jelek
239	Ranu	106	54.93	Kinerja Jelek	34.20	Kinerja Jelek	44.55	Kinerja Jelek
240	Rawa	75	52.72	Kinerja Jelek	31.18	Kinerja Jelek	41.94	Kinerja Jelek
241	Reca	200	54.67	Kinerja Jelek	34.76	Kinerja Jelek	44.71	Kinerja Jelek
242	Sadang	10	64.14	Kinerja Jelek	33.80	Kinerja Jelek	48.97	Kinerja Jelek
243	Santen	30	47.83	Kinerja Jelek	31.99	Kinerja Jelek	39.91	Kinerja Jelek
244	Satan	15	57.49	Kinerja Jelek	33.96	Kinerja Jelek	45.72	Kinerja Jelek
245	Sawal I	20	57.81	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.87	Kinerja Jelek
246	Sawal II	15	51.46	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	42.69	Kinerja Jelek
247	Sawangan	15	55.26	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.59	Kinerja Jelek
248	Segan	40	51.52	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	42.72	Kinerja Jelek
249	Semangkung	100	55.79	Kinerja Jelek	31.62	Kinerja Jelek	43.70	Kinerja Jelek
250	Serang	60	53.45	Kinerja Jelek	34.02	Kinerja Jelek	43.73	Kinerja Jelek
251	Serang Susukan	10	50.47	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	42.19	Kinerja Jelek
252	Sicinde	160	54.76	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.34	Kinerja Jelek
253	Sidamulya	200	54.45	Kinerja Jelek	34.39	Kinerja Jelek	44.42	Kinerja Jelek
254	Sidawangi	39	53.58	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	43.75	Kinerja Jelek
255	Sigarpandan	15	57.92	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.92	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
256	Sijambe	10	57.48	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.70	Kinerja Jelek
257	Sijati	60	53.62	Kinerja Jelek	33.78	Kinerja Jelek	43.70	Kinerja Jelek
258	Sijeruk	10	57.64	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.78	Kinerja Jelek
259	Sikalong	150	56.51	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.22	Kinerja Jelek
260	Sikebo	10	58.01	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.96	Kinerja Jelek
261	Sikokol	29	56.42	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.17	Kinerja Jelek
262	Sikrisik	16	61.63	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	47.78	Kinerja Jelek
263	Sikubon I	21	57.88	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.90	Kinerja Jelek
264	Sikubon II	15	57.23	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.58	Kinerja Jelek
265	Sikubon III	31	58.15	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.03	Kinerja Jelek
266	Silak	30	52.50	Kinerja Jelek	34.09	Kinerja Jelek	43.29	Kinerja Jelek
267	Silumbu	100	43.22	Kinerja Jelek	33.49	Kinerja Jelek	38.35	Kinerja Jelek
268	Sindang	10	56.52	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.22	Kinerja Jelek
269	Sirawa	70	55.90	Kinerja Jelek	35.36	Kinerja Jelek	45.63	Kinerja Jelek
270	Sirukem	212	57.14	Kinerja Jelek	34.40	Kinerja Jelek	45.77	Kinerja Jelek
271	Siton	30	53.45	Kinerja Jelek	34.81	Kinerja Jelek	44.13	Kinerja Jelek
272	Siwatu	80	53.74	Kinerja Jelek	32.77	Kinerja Jelek	43.25	Kinerja Jelek
273	Siwungu	28	56.78	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.35	Kinerja Jelek
274	Sokasari	50	55.47	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.70	Kinerja Jelek
275	Sopen	10	56.79	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.35	Kinerja Jelek
276	soplan	50	55.54	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.73	Kinerja Jelek
277	Srengseng	50	53.77	Kinerja Jelek	35.92	Kinerja Jelek	44.85	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
278	Srengseng Badakarya	10	59.40	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.66	Kinerja Jelek
279	Srima	10	58.08	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.00	Kinerja Jelek
280	Subak	25	57.95	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.93	Kinerja Jelek
281	Subur	70	50.24	Kinerja Jelek	32.38	Kinerja Jelek	41.31	Kinerja Jelek
282	Suruhan	25	51.79	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	42.85	Kinerja Jelek
283	Tampomas I	10	55.61	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.77	Kinerja Jelek
284	Tampomas II	10	58.50	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.21	Kinerja Jelek
285	Tanalaya I	14	51.71	Kinerja Jelek	33.09	Kinerja Jelek	42.41	Kinerja Jelek
286	Tanalaya II	13	56.09	Kinerja Jelek	46.99	Kinerja Jelek	51.54	Kinerja Jelek
287	Tanjungsari	62	59.09	Kinerja Jelek	32.79	Kinerja Jelek	45.94	Kinerja Jelek
288	Tanjungtirta	122	55.13	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.52	Kinerja Jelek
289	Tawonan	20	57.82	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.87	Kinerja Jelek
290	Telas	10	54.64	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.28	Kinerja Jelek
291	Tempoyan I	20	59.16	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	46.54	Kinerja Jelek
292	Tempoyan II	12	55.98	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.95	Kinerja Jelek
293	Tempurung	30	57.30	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.61	Kinerja Jelek
294	Tenggaron	14	51.27	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	42.60	Kinerja Jelek
295	Tersono	74	50.66	Kinerja Jelek	34.37	Kinerja Jelek	42.51	Kinerja Jelek
296	Tinggar	106	53.83	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	43.87	Kinerja Jelek
297	Tratrasuren I	45	56.04	Kinerja Jelek	49.02	Kinerja Jelek	52.54	Kinerja Jelek
298	Tratrasuren II	45	50.22	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	42.10	Kinerja Jelek
299	Tulis Sokaraja	23	53.80	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	43.89	Kinerja Jelek

NO.	NAMA DI (Sesuai Abjad)	Luas (ha)	INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI UTAMA		INDEKS KINERJA JARINGAN IRIGASI TERSIER		KINERJA DI	
			Kategori		Kategori		Kategori	
			Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja	Nilai Max	Kinerja
			100		100		100	
300	Urang	50	60.34	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	47.16	Kinerja Jelek
301	Urang I	50	50.11	Kinerja Jelek	32.86	Kinerja Jelek	41.48	Kinerja Jelek
302	Urang II	40	57.97	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	45.95	Kinerja Jelek
303	Urang III	25	52.62	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	43.27	Kinerja Jelek
304	Wadas I	30	52.20	Kinerja Jelek	32.53	Kinerja Jelek	42.36	Kinerja Jelek
305	Wadas II	30	53.81	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	43.86	Kinerja Jelek
306	Wadas III	20	55.04	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	44.48	Kinerja Jelek
307	Watubelah	30	53.20	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	43.56	Kinerja Jelek
308	Watutugu I	158	47.97	Kinerja Jelek	34.06	Kinerja Jelek	41.01	Kinerja Jelek
309	Watutugu II	25	49.35	Kinerja Jelek	34.42	Kinerja Jelek	41.88	Kinerja Jelek
310	Wilada	55	50.75	Kinerja Jelek	33.99	Kinerja Jelek	42.37	Kinerja Jelek
311	Winong	30	63.94	Kinerja Jelek	49.54	Kinerja Jelek	56.73	Kinerja Jelek
312	Wungu I	15	53.94	Kinerja Jelek	33.89	Kinerja Jelek	43.92	Kinerja Jelek
313	Wungu II	15	53.01	Kinerja Jelek	33.92	Kinerja Jelek	43.46	Kinerja Jelek

H. PENDAPATAN PETANI

1. Penguasaan dan Kepemilikan Lahan Irigasi

Penguasaan dan kepemilikan lahan irigasi di Kabupaten Banjarnegara berbeda beda disetiap irigasinya. Secara umum Untuk status kepemilikan lahan pertanian adalah 40 % dan pemilik sekaligus penggarap 41 % serta penyewa adalah 2 %, dengan rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian 0.23 Ha/orang.

2. Pola Tanam dalam Lima Tahun Terakhir

Pola Tanam di Kabupaten Banjarnegara ditetapkan dengan SK Bupati Banjarnegara tentang Petunjuk Penetapan Polatanam dan Tata Tanam di Kabupaten Banjarnegara yaitu Padi – Padi – Palawija, namun dalam realitas yang ada Pola tanam yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian Utara di dataran Tinggi seperti Kecamatan Kalibening dan Pandanarum memiliki Daerah Irigasi Sederhana yang hanya memiliki dua Masa Tanam yaitu Padi-Padi dan untuk Kecamatan Batur, Pagentan, Pejawaran terbagi menjadi pertanian sayur, padi dan palawija.

Tebel 2.8 Kondisi Pola Tanam pada Wilayah Kabupaten Banjarnegara

POLA TANAM		WILAYAH KECAMATAN
PADI, PADI PALAWIJA	:	Sigaluh, Madukara, Banjarmangu, Banjarnegara, Bawang, Pagedongan, Mandiraja, Purwanegara, Wanadadi, Purwareja Klampok, Punggelan
PADI,PADI/PALAWIJA	:	Kalibening, Pandanarum, Susukan, Pagentan, Pejawaran
PADI,PADI, PADI	:	Banjarmangu, Banjarnegara, Bawang, Madukara, Sigaluh
PALAWIJA, HOLTIKULTUR	:	Wanayasa, Pejawaran, Pagentan, Karangkobor, Batur
HOLTIKULTUR	:	Batur, Pejawaran

3. Produksi dan Produktifitas Tanaman

Sektor pertanian dalam peran utamanya sebagai produsen bahan pangan, harus terus berupaya dalam peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Salah satu upaya dalam meningkatkan produksi hasil pertanian, yaitu dengan intensifikasi usaha tani sehingga produktivitas bisa meningkat. Sebagai gambaran, tingkat produktivitas padi sebagai pangan utama di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2019 pada tabel berikut :

Table 16. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kab Banjarnegara Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Luas Panen (Ha)	23.452,8	25.142,8	25.584,6	24.525,5
Produksi (Ton)	145.543,8	152.503,0	151.095	129.801
Produktivitas (Kw/Ha)	62,06	60,65	59,06	52,92

Berdasarkan data produktivitas tersebut diatas, Luasan Panen mengalami peningkatan di tiap tahunnya namun di tahun 2019 mengalami penurunan Luasan Panen sebesar 950 Ha, hal tersebut sebanding dengan produksi Padi yang ada di tiap tahunnya, namun Produktivitas Tanaman Padi mengalami penurunan di tiap tahunnya. Hal tersebut di sebabkan karena beberapan factor yang mempengaruhi yaitu salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun.

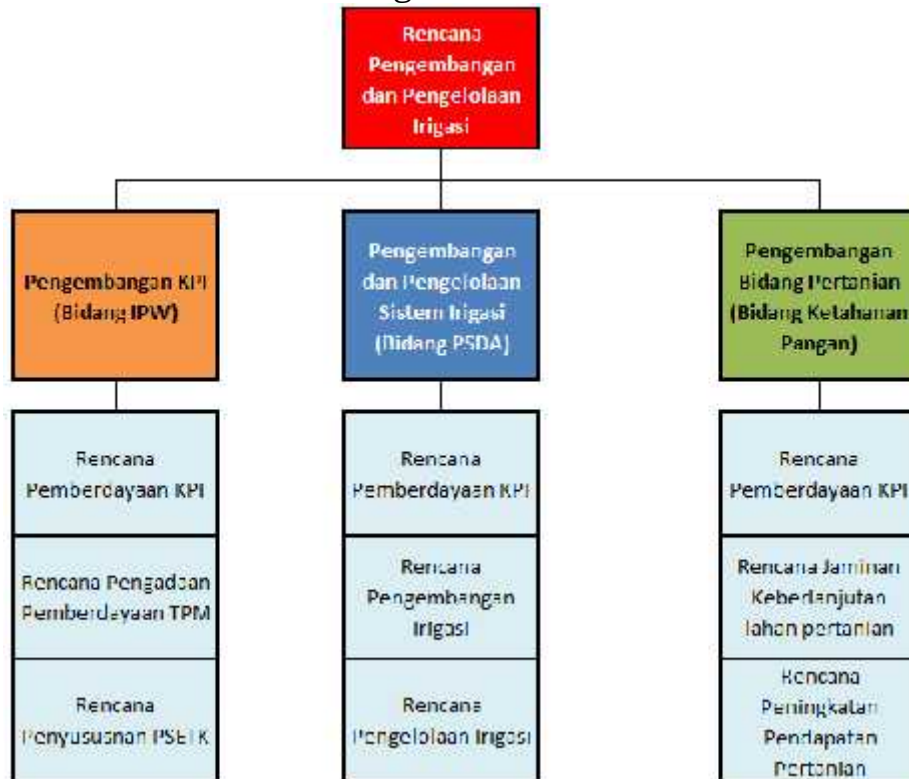
4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. Pengolahan dengan menggunakan alat modern dan teknologi terkini sudah dilakukan di Kabupaten Banjarnegara meski tetap butuh untuk ditingkatkan. Selain itu sistem pemasaran juga mesti ditingkatkan dengan mengurangi rantai pemasaran sehingga harga yang didapatkan oleh petani bisa maksimal.

No	Uraian Kegiatan	Perincian Alokasi Biaya per Tahun (Rp)				
		Tahun ke 1 (Sebi)	Tahun ke 2 (Dua)	Tahun ke 3 (Tiga)	Tahun ke 4 (Empat)	Tahun ke 5 (Lima)
A	PEMBERDAYAAN KPI					
3	Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A					
3.1	Pembentukan P3A			*	*	*
3.2	Pembentukan GP3A					
3.3	Pembentukan IP3A					
3.4	Pelatihan P3A		*	*		
3.5	Pelatihan GP3A					
3.6	Pelatihan IP3A					

BAB III
RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Secara garis besar Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi) terdiri dari tiga sektor yang secara pelaksanaan tugas terbagi kedalam tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bidang Ketahanan Pangan. Di Kabupaten Banjarnegara ketiga bidang tersebut di laksanakan oleh Tiga SKPD yaitu Baperlitbang, DPUPR dan DINTANKAN KP. Uraian secara garis besar tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan skema dibawah ini.



Gambar 3.1 Skema Tugas SKPD dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Banjarnegara

A. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)

Sesuai skema Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi diatas maka, terdapat tiga bagian perencanaan pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang masing masing terjelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Pemberdayaan KPI
 - a. Penguatan Kapaitas Staf PSDA

Penguatan kapasitas Staf PSDA terdiri dari beberapa kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada dalam kegiatan perencanaan, OP, yang terdiri dari: Pelatihan staf PU tentang safeguards, Pelatihan staf PU tentang Konstruksi Partisipatif, Pelatihan bagi staf PU tentang Modernisasi Irigasi, Pelatihan staf PU tentang PRO, Pelatihan staf PU tentang OP, Pelatihann staf PU tentang Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A, Pelatihan PAKSI (PAI dan IKSI). Detail pelaksanaan tersebut terurai dalam lampiran Form 10.01 – KPI

Tabel 3.1 Rencana Penguatan Kapasitas SDM PU

No	Uraian Kegiatan	Rencana Kegiatan				
		Tahun ke 1 (Satu)	Tahun ke 2 (Dua)	Tahun ke 3 (Tiga)	Tahun ke 4 (Empat)	Tahun ke 5 (Lima)
A	PEMBERDAYAAN KPI					
1	Penguatan Kapasitas Staf PU					
1.1	Sosialisasi KPI termasuk RP2I					
1.2	Pelatihan staf PU tentang KPI termasuk RP2I					*
1.3	Pelatihan staf PU tentang SII Partisipatif			*		
1.4	Pelatihan staf PU tentang Saloguanas				*	
1.5	Pelatihan staf PU tentang Konstruksi Partisipatif			*		
1.6	Pelatihan bagi staf PU tentang Manajemen Irigasi				*	
1.7	Pelatihan staf PU tentang IKOM				*	
1.8	Pelatihan staf PU tentang OP					*
5	Pelatihan Update data C FAKSI	*	*	*	*	*
6	Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi		*			
7	Pelatihan Perencanaan Irigasi			*		
8	Pelatihan survey Pemetaan dan Demas		*			
9	Pelatihan Operasional Pemeliharaan Irigasi			*		

b. Pemberdayaan P3A/GP3A

Pemberdayaan P3A dan GP3A berupa revitalisasi/pembentukan P3A dan GP3A yang direncanakan dilakukan setiap tahun terutama terhadap Daerah Irigasi yang menjadi prioritas Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini. Dalam periode Lima tahun, direncanakan akan membentuk 428 P3A dan 1 GP3A serta merevitalisasi P3A sebanyak 420 dan 1 GP3A. Detail pelaksanaan tersebut terurai dalam lampiran Form 10.01

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Pemberdayaan P3A/ dan GP3A

No	Uraian Kegiatan	Rencana Kegiatan				
		Tahun ke 1 (Satu)	Tahun ke 2 (Dua)	Tahun ke 3 (Tiga)	Tahun ke 4 (Empat)	Tahun ke 5 (Lima)
A	PEMBERDAYAAN KPI					
3	Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A					
3.1	Pembentukan P3A			*	*	*
3.2	Pembentukan GP3A					
3.3	Pembentukan IP3A					
3.4	Pelatihan P3A		*	*		
3.5	Pelatihan GP3A					
3.6	Pelatihan IP3A					

c. Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi akan diagendakan sampai dengan tahun 2026 yang merupakan tahun terakhir dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini. Pada pelaksanaan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Dinas PUPR bertanggung jawab dalam tahapan penyusunan sampai jadinya draft Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sebelum di sosialisasikan dan penetapannya yang difasilitasi oleh Bapeda. Detail pelaksanaan tersebut terurai dalam lampiran Form 10.05

Tabel 3.3. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Banjarnegara

KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN				
	2022 - Tahun ke 1 (Satu)	2023 - Tahun ke 2 (dua)	2024 - Tahun ke 3 (tiga)	2025 - Tahun ke 4 (empat)	2026 - Tahun ke 5 (lima)
PEMBERDAYAAN KPI					
Penetapan RP2I dengan SK Bupati					
Sosialisasi Dokumen RP2I					

d. Penyusunan Rancangan Perda

Penyusunan Rancangan Perda tentang PPSI Kabupaten Banjarnegara akan di mulai pada tahun 2021 dengan Dinas PUPR memyusun Kajian Akademis terkait Rancangan Perda tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Irigasi di Kabupaten Banjarnegara. Dalam peyusunan Perda terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yang dimulai dengan Pendaftaran Propem Perda 1 tahun sebelum pelaksanaan penyusun dan pembahasn rancangan materi Ranperda. Sehingga Propem Perda di rencanakan dilaksanakan pada tahun 2023 sebelum pelaksanaan Penyusunan dan pembahasan pada tahun 2024. Setelah proses tersebut maka dilanjutkan dengan pembahasan dan penetapan yang juga diagendakan pada tahun 2024 sebelum disosialisasikan oleh Baperlitbang pada tahun 2025. Detail pelaksanaan tersebut terurai dalam lampiran Form 10.05 Tabel 3.4. Rencana Penetapan Perda PPSI

KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN				
	2022 - Tahun ke 1 (Satu)	2023 - Tahun ke 2 (dua)	2024 - Tahun ke 3 (tiga)	2025 - Tahun ke 4 (empat)	2026 - Tahun ke 5 (lima)
2					
PEMBERDAYAAN KPI					
Penyiapan Kerangka Hukum untuk PPSI					
Penetapan & Sosialisasi Perda ttg PPSI					
Sosialisasi Perda PPSI (Irigasi)					

e. Komisi Irigasi

Komisi Irigasi untuk Bidang PSDA DPUPR Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas memastikan fungsi fasilitasi sekretariat komisi irigasi bisa berjalan. Fungsi yang dimaksud adalah pelaksanaan fasilitasi bidang Komisi Irigasi untuk melakukan rapat dan sekaligus membiayai kegiatan operasional Sekretariat KOMIR. Detail pelaksanaan tersebut terurai dalam lampiran Form 10.01

Tabel 3.5 Rencana Kegiatan KOMIR

KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN				
	2022 - Tahun ke 1 (Satu)	2023 - Tahun ke 2 (dua)	2024 - Tahun ke 3 (tiga)	2025 - Tahun ke 4 (empat)	2026 - Tahun ke 5 (lima)
2					
PEMBERDAYAAN KPI					
KOMIR (Komisi Irigasi)					
Pembentukan & penetapan SK Gubernur/Bupati ttg KOMIR					
Evaluasi kinerja KOMIR					

2. Rencana Pengembangan Irigasi

Berdasarkan hasil olah data penutupan lahan yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan di Banjarnegara dibagi menjadi tiga kategori yaitu Ladang, Perkebunan dan Sawah diantara ketiga tersebut 63,51 % adalah Ladang, 22,84 % adalah perkebunan dan 13,66 % adalah sawah.

Pertanian beririgasi di kabupaten banjarnegara tergolong masih potensial untuk dikembangkan karena dari total Luas pertanian tersebut yaitu 63.992,54 hanya seluas 15,432.21 Ha lahan sawah fungsional baik irigasi kewenangan Pusat, Provinsi maupun Daerah.

Rencana Pengembangan Irigasi dikabupaten Banjarnegara adalah dengan menanbah luasan fungsional sawah melalui pengembangan jaringan irigasi yang baik untuk mengubah lahan potensial pada Daerah Irigasi menjadi sawah fungsional, luas lahan potensial pada Daerah Irigasi kewenangan Daerah di Kabupeten Banjarnegara adalah 15.407 ha dan luas fungsional Daerah Irigasi kewenangan Daerah adalah 6.927 ha dengan total luas baku yaitu 23.661 Ha serta melalui peningkatan irigasi perdesaan untuk ditingkatkan menjadi Daerah Irigasi Baru.

3. Rencana Pengelolaan Irigasi

a. Operasi Jaringan Irigasi.

Rencana Operasi Jaringan Irigasi dan pembiayaan selama lima tahun kedepan terdiri dari Monitoring dan Evaluasi, dan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Pada monitoring dan evaluasi dilaksanakan tiga kegiatan yaitu Monitoring Pelaksanaan Operasi, kalibrasi alat ukur dan IKSI, namun Perencanaan karena keterbatasan anggaran dan irigasi Kewenangan Kabupaten sebagian besar adalah DI Sederhana maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Updateing Data IKSI yang diagendakan tiap tahun.

Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Monev DI

No	Uraian Kegiatan	RENCANA KEGIATAN				
		Tahun ke 1 (Satu)	Tahun ke 2 (Dua)	Tahun ke 3 (Tiga)	Tahun ke 4 (Empat)	Tahun ke 5 (Lima)
D	MONITORING & EVALUASI	0	0	0	0	0
D.1	Monitoring pelaksanaan operasi	-	-	-	-	-
D.2	Kalibrasi alat ukur	-	-	-	-	-
D.3	Evaluasi kinerja sistem irigasi (IKSI)	-	-	-	-	-

Sedangkan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari dua kegiatan besar yang meliputi kebutuhan sumber daya manusia dan kebutuhan fasilitas. Kegiatan ini juga dianggarkan dan dilaksanakan setiap tahunnya meskipun ada beberapa pengadaan yang di laksanakan bertahap. Secara detail rencana operasi jaringan tersebut disajikan dalam format tabel PU-07.

b. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Rencana Pemeliharaan Jaringan Irigasi terdiri dari 4 (empat) unsur yang harus dilakukan:

- Investasi Jaringan Irigasi
- Perencanaan Pemeliharaan Jaringan
- Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan
- Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Inventaris Jaringan irigasi harus dilaksanakan setiap tahun untuk melaksanakan Inventarisasi Jaringan Irigasi dan juga inventarisasi aset pendukung irigasi. Unsur perencanaan pemeliharaan jaringan terdiri dari penyusunan rencana pemeliharaan dan Nota kesepakatan kerjasama OP terkait pemeliharaan antara pemerintah dan P3A yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Sementara itu, unsur pemeliharaan jaringan irigasi yang lainnya yaitu pelaksanaan pemeliharaan jaringan dilakukan dengan pelaksanaan pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan penanggulangan perbaikan darurat. Unsur ini juga dilaksanakan setiap tahun dalam Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini dengan pembiayaan yang mengikutinya. Unsur yang terakhir adalah Pemantauan, evaluasi, pelaporan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan melakukan pemantau dan evaluasi, dan memberikan laporan kemajuan pelaksanaan. Secara detail rencana Pemeliharaan jaringan tersebut disajikan dalam format tabel PU-08.

Tabel 3.7 Rencana Monev Kegiatan OP Irigasi

No	Uraian Kegiatan	RENCANA KEGIATAN				
		Tahun ke 1 (Satu)	Tahun ke 2 (Dua)	Tahun ke 3 (Tiga)	Tahun ke 4 (Empat)	Tahun ke 5 (Lima)
1	2	5	6	7	8	9
D	PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI					
1	Pemantauan dan evaluasi					
0	Pemantauan dan evaluasi kegiatan swakelola					
0	Pemantauan dan evaluasi kegiatan kontraktual					
2	Laporan kemajuan pelaksanaan	0	0	0	0	0

c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rehabilitasi jaringan irigasi memiliki beberapa proses yang akan dilaksanakan seperti: Sosialisasi dan Konsultasi Publik, SID, sampai pada kegiatan persiapan O&P. Secara detail rencana rehabilitasi jaringan tersebut ditampilkan dalam format PU 09.

B. PENGEMBANGAN KPI (BIDANG BAPERLITBANG)

1. Pemberdayaan Komisi Irigasi (KPI)

a. Penyiapan Kerangka Hukum untuk PPSI

Setelah ditetapkannya putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 menyatakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Karena dengan kondisi tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 08 Tahun 2013 tentang irigasi tentu juga tidak berlaku dan membutuhkan pencabutan dan dan penyusunan Peraturan Daerah kembali sesuai dengan regulasi.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) menjadi hal awal dalam penyusunan Peraturan Daerah Tentang Irigasi yang baru akan tetapi Undang-undang Nomor 17 tersebut belum mempunyai turunan Regulasi berupa Peraturan Pemerintah sehingga menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan Peraturan Daerah untuk Irigasi.

Dalam penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini, Tim Penyusun mengasumsikan Peraturan Pemerintah tersebut telah tersusun di tahun 2023 sehingga Instansi Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang Kabupaten Banjarnegara melakukan Penyusunan Naskah Akademis serta Raperda Irigasi Kabupaten Banjarnegara terlebih dahulu pada tahun 2021 dan sehingga Baperlitbang diasumsikan melaksanakan pendaftaran untuk Propem Perda di tahun 2023 serta dapat melakukan Sosialisasi pada tahun 2025.

b. Penyusunan Rencana Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dilakukan selama periode lima tahun sehingga penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi tahap berikutnya akan dilakukan pada tahun 2026. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan dilakukan review dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi pada tahun berjalan. Pada tahun 2026, Bappelitbang bertugas untuk melakukan hal hal sebagai berikut:

1. Penyusunan SK Bupati tentang Tim penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
2. Sosialisasi Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
3. Penetapan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Tahapan tersebut tidak terlepas dengan tahapan penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR sebagai mana yang terurai dalam Form 10.01. Tahapan Penyusunan SK, Sosialisasi Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi dan Penetapannya terurai dalam lampiran dokumen ini pada Form 10.05.

c. Komisi Irigasi (KOMIR)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 050/232 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara, Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara. Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara juga melakukan Sidang/Rapat Komir paling sedikitnya dua kali dalam setahun. Sampai Pada tahun 2026, Bappelitbang bertugas untuk melakukan hal hal sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Penetapan SK Bupati tentang Komisi Irigasi
2. Penetapan dan Sosialisasi SK Bupati tentang Petunjuk Penetapan Pola Tanam dan Tata Tanam untuk Sawah Beririgasi di Kabuapten Banjarnegara.
3. Melaksanakan Sidang Komisi Irigasi
4. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi

Tahapan tersebut tidak terlepas dengan tahapan KOMIR dilakukan oleh Dinas PUPR sebagai Sekretariat Komisi Irigasi. Tahapan Komisi Irigasi ini terurai dalam lampiran dokumen ini pada Form 10.05.

d. Evaluasi Kinerja PPSI

Evaluasi kinerja PPSI merupakan tahapan evaluasi semua program terkait Kelembagaan Pengelolaan Irigasi. Evaluasi ini melibatkan semua unsur kelembagaan baik dari Pihak Pemerintah dan Non Pemerintah. Kegiatan ini direncanakan untuk dilakukan setiap tahun diakhir pelaksanaan semua kegiatan/akhir tahun.

2. Pemberdayaan TPM

a. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) mempunyai tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi petani didalam proses penguatan KPI. Terdapat beberapa tugas dan fungsi TPM adalah:

Memfasilitasi instrumen monitoring dan evaluasi kinerja organisasi P3A/GP3A Daerah Irigasi Prioritas.

- Memfasilitasi program kerja P3A/GP3A D.I Prioritas dalam kegiatan pemberdayaan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
- Aktif dalam kegiatan Komisi Irigasi (KOMIR).
- Membantu dan Memfasilitasi Penyusunan PSETK di Daerah Irigasi Prioritas
- Membantu penyegaran, pembentukan dan pengembangan organisasi P3A dan GP3A D.I Prioritas.
- Fasilitasi pengadaan sekretariat dan pendampingan administrasi P3A. Untuk sekretariat belum terlaksana.
- Memfasilitasi bentuk pertemuan rutin yang efektif dan efisien diantara pengurus GP3A dengan P3A, dan antara P3A/GP3A dengan Tim KPL pada daerah irigasi Prioritas.
- Membantu menciptakan peluang serta akses yang diperlukan oleh P3A/GP3A bagi pengembangan organisasi, teknis pengairan, teknik pertanian dan wirausaha (usaha ekonomi produktif). Koordinasi yang baik antara TPM dengan GP3A/P3A sangat diperlukan sehingga informasi, masalah atau kendala yang ada bisa dicari solusinya, termasuk informasi dari TPM untuk GP3A/P3A dalam hal pengembangan organisasinya, termasuk usaha ekonomi produktif bisa dicarikan akses untuk kelompok.
- Sosialisasi iuran P3A/GP3A. iuran adalah hal yang sering disampaikan dalam setiap pertemuan P3A/Poktan karena iuran ini bisa menunjang jalannya organisasi P3A, karena ada anggaran dan pembagiannya yang sudah disepakati bersama dalam AD/ART.
- Sosialisasi OP dan rehabilitasi P3A/GP3A. Kegiatan OP dan rehabilitasi merupakan hal yang sangat perlu diketahui sebagai dasar pengetahuan bagi petani dalam hal OP dan rehab, sehingga jika ada proyek yang masuk dilokasinya petani bisa mengetahui teknisnya ataupun jika dalam melakukan rehab saluran yang bocor, petani bisa mengetahui standar teknisnya.
- Fasilitasi keterlibatan P3A/GP3A secara partisipatif dalam pemanfaatan irigasi (Sekolah lapang petani, pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A/GP3A).
- Membantu penanganan manajemen konflik dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif.

- Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi, apresiasi, dan diseminasi PPSIP dan hal lainnya yang berkaitan dengan PPSIP pada tingkat masyarakat petani pemakai air yang ada di daerah irigasi setempat. Peran serta TPM dalam sosialisasi di lapangan itu dibutuhkan, mulai dari persiapan sampai kelancaran pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari peran aktif TPM.
- Membantu mendorong pengarusutamaan Gender dalam pemberdayaan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. Ini menjadi tantangan kedepannya agar dalam setiap kegiatan keterlibatan perempuan sangat diharapkan, hal yang dilakukan yaitu sosialisasi pengarusutamaan Gender untuk mengubah pola pikir kaum ibu-ibu agar mau berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi.
- Fasilitasi pertemuan P3A/GP3A, Kelompok tani dan komisi irigasi dikabupaten dan Propinsi. Ini merupakan salah satu tugas TPM untuk membantu fasilitasi pertemuan baik itu GP3A/P3A/Poktan ataupun Komisi Irigasi.
- Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyusunan Dana Pengelolaan Irigasi, dan penyusunan kerjasama pengelolaan irigasi (KSP) atau Nota Kesepahaman pada daerah irigasi setempat. Kegiatan yang dilapangan tentunya menjadi tanggungjawab TPM yang bertugas di wilayah setempat, termasuk jika ada kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah dampingan maka TPM harus memfasilitasi hal tersebut.
- Kegiatan Bekerjasama dengan PPL untuk membantu pemberdayaan Poktan/Gapoktan. Selama ini di lapangan TPM bukan hanya P3A/GP3A yang didampingi, tetapi Poktan/Gapoktan juga. Kegiatan musyawarah tani “mattudang-tudangeng” maupun pemantapan kelompok tani, TPM bersama dengan penyuluh saling koordinasi untuk kelancaran kegiatan tersebut.
- Fasilitasi keterlibatan P3A dalam kegiatan perencanaan irigasi (rencana tata tanam detail, Tudang Sipulung dan lainnya). Hal ini sudah berjalan di lapangan, setiap ada musyawarah tani maka P3A juga akan diundang untuk mengikuti pertemuan.
- Membantu penciptaan kader fasilitator dari masyarakat petani sebagai Petani Pemandu (Petandu) sebagai penerus keberlanjutan tugas program pendampingan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi pengarusutmaan gender, ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan bibit-bibit petani muda yang bisa menjadi motifator bagi petani lainnya untuk maju dan berkembang.
- Memfasilitasi pelatihan penguatan Wanita Tani. Salah satu langkah di lapangan nantinya dengan membentuk kelompok Wanita Tani, yang tentunya dengan program kegiatan yang lebih bermanfaat dan menarik minat ibu-ibu, hal ini bisa kerjasama dengan ibu-ibu PKK di desa setempat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

- Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan, penyusunan Dana Pengelolaan Irigasi, dan penyusunan kerjasama pengelolaan irigasi (KSP) atau Nota Kesepahaman pada daerah irigasi setempat. Kegiatan yang dilapangan tentunya menjadi tanggungjawab TPM yang bertugas di wilayah setempat, termasuk jika ada kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah dampingan maka TPM harus memfasilitasi hal tersebut.
- Kegiatan Bekerjasama dengan PPL untuk membantu pemberdayaan Poktan/Gapoktan. Selama ini di lapangan TPM bukan hanya P3A/GP3A yang didampingi, tetapi Poktan/Gapoktan juga. Kegiatan musyawarah tani “mattudang-tudangeng” maupun pemantapan kelompok tani, TPM bersama dengan penyuluh saling koordinasi untuk kelancaraan kegiatan tersebut.
- Fasilitasi keterlibatan P3A dalam kegiatan perencanaan irigasi (rencana tata tanam detail, Tudang Sipulung dan lainnya). Hal ini sudah berjalan di lapangan, setiap ada musyawarah tani maka P3A juga akan diundang untuk mengikuti pertemuan.
- Membantu penciptaan kader fasilitator dari masyarakat petani sebagai Petani Pemandu (Petandu) sebagai penerus keberlanjutan tugas program pendampingan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi pengarusutmaan gender, ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan bibit-bibit petani muda yang bisa menjadi motifator bagi petani lainnya untuk maju dan berkembang.
- Memfasilitasi pelatihan penguatan Wanita Tani. Salah satu langkah di lapangan nantinya dengan membentuk kelompok Wanita Tani, yang tentunya dengan program kegiatan yang lebih bermanfaat dan menarik minat ibu-ibu, hal ini bisa kerjasama dengan ibu-ibu PKK di desa setempat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Pembuatan Succes Story (cerita keberhasilan). Kegiatan di lapangan tentunya diharapkan adanya poin penting yang didapatkan, dalam hal ini dengan organisasi P3A/GP3A yang mandiri dan sukses, bahkan bisa menciptakan generasi muda yang aktif itu merupakan keberhasilan TPM, karena nantinya meskipun TPM sudah tidak bertugas di lapangan, maka organisasi P3A/GP3A tetap bisa jalan bahkan lebih maju dan berkembang.
- Mengingat tugas dan fungsi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) diatas, maka Bappelitbangda tetap melakukan pengadaan TPM di setiap tahunnya dengan jumlah mengikuti luas Daerah Irigasi atau Jumlah DI yang menjadi Prioritas disetiap tahunnya.

Tahapan Pemberdayaan TPM ini terurai dalam lampiran dokumen ini pada Form 9.06 dan 10.05.

b. Pelatihan KTPM dan TPM

Pelatihan KTPM dan TPM diprogramkan untuk di laksanakan melalui Kegiatan IPDMIP pada Tahun 2018, namun akibat Pandemi Covid 19 untuk kegiatan Pengadaan dan Pelatihan KTPM dan TPM terkena recovusing sehingga pada tahun 2022 pada berakhirnya program IPDMIP Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan pengadaan dan Pelatihan KTPM dan TPM, terurai dalam lampiran dokumen ini pada Form 9.06 dan 10.05.

3. Penyusunan PSETK

PSETK dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif pada suatu daerah irigasi.

Sedangkan tujuan PSETK adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat serta aktual sebagai masukan dalam proses perencanaan program pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif pada suatu daerah irigasi berdasarkan potensi sumber daya lokal melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan profil sosial ekonomi dan mengidentifikasi potensi sumber daya lokal;
- Penyusunan profil teknis pengelolaan irigasi (operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi);
- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi P3A/GP3A/IP3A baik pada aspek teknis, kelembagaan maupun usaha tani dan usaha ekonomi produktif.

a. Pelatihan PSETK

Pelatihan diperlukan selama paling tidak 4 tahun pertama Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, supaya staf Bappelitbang, Dinas PUPR, DINTANKAN KP, memahami cara pelaksanaan PSETK. Untuk rencana Program pelatihan PSETK dapat disajikan dalam Format 10.05

b. Pelaksanaan PSETK

Pelaksanaan PSETK telah dilakukan di 151 Daerah Irigasi yang dilakukan secara bertahap yaitu 7 daerah irigasi di tahun 2019, 43 daerah irigasi di tahun 2020 dan 101 Daerah Irigasi di tahun 2021 Akan tetapi dalam jangka dua tahun PSETK tersebut dibutuhkan review untuk memastikan kondisi terkini daerah irigasi prioritas. Oleh karenanya Program PSETK akan akan dilaksanakan tiap tahun disajikan dalam Format 10.05.

C. BIDANG PERTANIAN

1. Pemberdayaan Komisi Pengelolaan Irigasi (KPI)

a. Pengembangan Pertanian

Pengembangan pertanian dalam dokumen ini terkait dengan ketersediaan PPL dilapangan. Dalam lima tahun terakhir ini, terdapat kekurangan tenaga PPL diakibatkan banyaknya tenaga tersebut yang memasuki masa purna bakti. Oleh karenanya, dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini merencanakan untuk kebutuhan PPL yang akan dijelaskan dalam 10.06

b. Pemberdayaan Poktan dan Gapoktan

Pelayanan Urusan Pertanian tidak terlepas dari pembinaan kelompok tani, wadah kelompok tani menjadi sasaran utama pembangunan pertanian. Cakupan bina kelompok tani menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa sarana dan prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara melalui penyuluh pertanian. Adapun Rencana kegiatan tersebut dijelaskan dalam form 9.07.

2. Jaminan Keberlanjutan Pertanian

a. Peningkatan Daya Lahan dan Air

Peningkatan daya lahan air direncanakan untuk dilaksanakan setiap tahun dengan agenda dua kegiatan setiap tahunnya yang dilakukan di kecamatan yang berbeda disetiap tahunnya. Secara detail rencana tersebut terurai dalam lampiran Form 10.06

b. Mekanisme Insentif/disinsentif Alih Fungsi Lahan.

Mekanisme insentif dan disinsentif alih fungsi lahan pertanian merupakan mekanisme yang perlu diatur dalam regulasi yang jelas. Oleh karenanya dalam Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini disusun untuk memastikan tersedianya mekanisme tersebut disetiap tahunnya. Secara detail rencana tersebut terurai dalam lampiran Form 10.06

c. Penegakan Hukum untuk Mencegah Alih Fungsi Lahan

Penegakan hukum untuk mencegah alih fungsi lahan memiliki tantangan tersendiri mengingat banyaknya permasalahan dan kondisi dalam penegakannya. Oleh karenanya dalam Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini disusun untuk memastikan tersedianya mekanisme tersebut disetiap tahunnya. Secara detail rencana tersebut terurai dalam lampiran Form 10.06

d. Melaksanakan Usaha Tani Hemat Air

Usaha tani hemat air sudah dilaksanakan disebagian daerah irigasi di Kabupaten Banjarnegara baik itu melalui metode pengairannya ataupun secara teknis dengan penggunaan perpipaan. Oleh karenanya dalam Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini disusun untuk memastikan tersedianya mekanisme tersebut disetiap tahunnya. Secara detail rencana tersebut terurai dalam lampiran Form 10.06

e. Melaksanakan Gerakan Hemat Air

Gerakan Hemat Air direncanakan untuk dilaksanakan setiap tahun di semua kecamatan yang dipusatkan di Balai Pertanian yang ada di Kecamatan. Secara detail rencana tersebut terurai dalam lampiran Form 10.06

3. Peningkatan Pendapatan Usaha Tani

a. Fasilitasi Akses Informasi dan Kredit Pertanian

Fasilitasi Akses Informasi dan Kredit Pertanian sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan usaha tani di Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya dalam Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini disusun untuk memastikan tersedianya mekanisme tersebut disetiap tahunnya. Secara detail rencana tersebut terurai dalam lampiran Form 10.06

b. Bantuan Teknis Sistem Stimulan (Benih, Pupuk dll)

Bantuan Teknis Sistem Stimulan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan usaha tani di Kabupaten Banjarnegara. Oleh karenanya dalam Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini disusun untuk memastikan tersedianya mekanisme tersebut disetiap tahunnya. Secara detail rencana tersebut terurai dalam lampiran Form 10.06

BAB IV
PENJADWALAN PENANGANAN DAERAH IRIGASI SKALA PRIORITAS

A. DATA DAERAH IRIGASI

Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/M/2015 tentang Kriteria Penetapan Status Daerah Irigasi, Kabupaten Banjarnegara terdiri dari tiga kewenangan yang dikelola oleh kabupaten, Provinsi dan Pusat. Secara keseluruhan luas Daerah Irigasi sebesar 25.238 Ha dengan luas Kewenangan Kabupaten sebesar 9.666 Ha, kewenangan Provinsi 5.344 Ha dan Kewenangan Pusat sebesar 10.228 Ha.

Table . Ringkasan Wewenang Daerah Irigasi dalam Kabupaten Banjarnegara

No.	Wewenang Tingkat	Luas Daerah Irigasi (ha)	Jumlah DI	Luas Baku PERMEN PUPR (ha)	Luas Fungsional shp (ha)
1	Kabupaten			SHP	
1.1	Utuh dalam Kabupaten	< 1.000 ha	315	22.152,33	6.548,51
1.2	Usulan DI		38	1.558,69	378,56
		Total Kabupaten	353	23711,02	6927,07
2	Provinsi (PERMEN PUPR NO 14 TAHUN 2015)			(Permen PUPR)	Shp
2.1	Lintas batas Kabupaten	< 1.000 ha	1	883	648,3
2.2	Utuh dalam Kabupaten	< 1.000 ha	1	108	47,64
		TOTAL Provinsi	2	911	695,94
3	Pusat			Pemen PUPR	shp
3.1	Utuh dalam Kabupaten	1.000 – 3.000 ha	1	5863	4112.46
3.2	Lintas Batas Kabupaten	1.000 – 3.000 ha	1	1305	3696.74
		Total pusat	2	7,168	7,809.20
	TOTAL		357	8079	7809.2

B. JADWAL PELAKSANAAN DAERAH IRIGASI BERBASIS SKALA PRIORITAS

Dalam menyusun DI berbasis Skala Prioritas jaringan irigasi untuk periode 5 tahun kedepan, yang merupakan masa perencanaan untuk Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, dipilih dengan indikator sebagai berikut:

- Prioritas 1: DI-DI yang memiliki nilai IKSI yang rendah, Kondisi Rusak Berat yang paling tinggi dan paling lama pernah dilaksanakan kegiatan fisik.
- Prioritas 2: DI-DI yang perlu dilakukan pengembangan jaringan irigasi dan luas areal layanan.

- DI-DI yang telah direhabilitasi (perbaikan fisik) dalam dalam kegiatan DAK tahun terakhir dan Program IPDMIP tentunya tidak dipilih lagi sebagai DI prioritas untuk 5 tahun kedepan.
 - Dari Sistem Informasi Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi terdapat daftar DI yang ada di b/BWS yang belum direhabilitasi jaringan irigasi utamanya selama 5 tahun terakhir.
 - Selain itu Prioritas juga ditentukan dari luasan lahan yang akan dialiri.
- Dari indikator tersebut didapatkan pembagian Daerah Irigasi yang direncanakan dalam 5 tahun kedepan yang diuraikan dalam table 20.

BAB V
RINGKASAN FORM RENCANA
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

A. PROGRAM PENGELOLAAN

Hasil Rekapitulasi Blangko Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Bagian Program Pengelolaan adalah Sebagai berikut :

1. FORM 1.01 KONDISI DAERAH IRIGASI

a. Kondisi Data Irigasi Menurut Jumlah DI

- Daerah Irigasi Kewenangan Daerah dalam PERMEN PUPR No 14 thn 2015 yaitu 322 DI
- Daerah Irigasi Kewenangan Daerah Terkoreksi Yaitu 315 DI
- Daerah Irigasi Usulan Permen Pupr Yaitu 39 DI
- Daerah Irigasi Masuk Kewenangan Pusat Yaitu 3 DI
- Daerah Irigasi Masuk Kewenangan Provinsi Yaitu 4 DI
- Daerah Irigasi Dobel Penamaan Yaitu 1 DI

b. Kondisi Data Irigasi Menurut Luas (Ha)

Keterangan	Baku (ha)	Poten. (ha)	Fungsi. (ha)
Luas daerah irigasi kewenangan daerah dalam PERMEN PUPR no 14 thn 2015	16,483	6,563	6,548
Luas daerah irigasi kewenangan daerah terkoreksi (shp) BIG	22,152.33	14,417.63	6,548.51
Luas daerah irigasi usulan PERMEN PUPR	1,563.34	988.89	378.56
Luas daerah irigasi masuk kewenangan pusat	135		
Luas daerah irigasi masuk kewenangan provinsi	171		

c. Klasifikasi Jaringan Irigasi

- 1) TEKNIS 6 DI
- 2) SEMI TEKNIS 2 DI
- 3) SEDERHANA 307 DI

d. POLA TANAM

- PADI, PADI : Sigaluh, Madukara, Banjarnangu,
PALAWIJA : Banjarnegara, Bawang,
Pagedongan, Mandiraja,
Purwanegara, Wanadadi, Purwareja
Klampok, Punggelan
- PADI,PADI/PALAWIJA : Kalibening, Pandanarum, Susukan,
Pagentan, Pejawaran
- PADI,PADI, PADI : Banjarnangu, Banjarnegara,
Bawang, Madukara, Sigaluh

PALAWIJA, : Wanayasa, Pejawaran, Pagentan,
HOLTIKULTUR : Karangkobor, Batur
HOLTIKULTUR : Batur, Pejawaran

2. FORM 1.02 KETERSEDIAAN AIR IRIGASI TAHUN TERAKHIR

DI di Kabupaten Banjarnegara merupakan bagian dari DAS Serayu (Serayu-Bogowonto). Pengambilan air irigasi terdiri dari ordo ke II, III dan IV. Ordo Ke II dan ke III Merupakan Sungai Terbesar Yang Digunakan Untuk Irigasi Yaitu

- a. Sungai Tulis digunakan untuk di teknis Limbangan
- b. Sungai Pekacangan digunakan untuk di teknis Liangan
- c. Sungai Merawu digunakan untuk di teknis Clangap
- d. Sungai Brengkut digunakan untuk di teknis Brengkut
- e. Sungai Gumelem digunakan untuk di teknis Krikil

Ketersediaan air yang terukur dan diatur terdapat pada 5 Daerah Irigasi yaitu LIMBANGAN, LIANGAN, CLANGAP, KRIKIL dan BRENGKUT

a. DEBIT YANG TERSEDIA (M3/det)

DEBIT YANG TERSEDIA (M3/det)	Q INTAKE	Q SUNGAI	Q REALISASI
LIMBANGAN	1.4	8.8	1.4
LIANGAN	4	19.59	4
CLANGAP	1.4	35.4	1.4
KRIKIL	0.3	0.5	0.5
BRENGKUT	0.19	0.2	0.19
Total Q Rencana / Kebutuhan Air Kabupaten Banjarnegara	32.5	M3/DET	

3. FORM 1.03 KONDISI PERTANIAN (PENDAPATEN PETANI)

Data kondisi pertanian diambil menggunakan sampel/ keterwakilan yaitu di ambil 10 kecamatan dengan keterwakilan dari total 19 Kecamatan, dengan gambaran dan keadaan yang sama dengan kecamatan yang lain dari sampel Kecamatan Jika ditotal untuk di kewenangan kabupaten banjarnegara total intensitas tanam padi tergolong kurang yaitu 147% Yang berarti pola tanam padi dikabupaten banjarnegara pada satu musim hanya 1 sampai 2 kali tanam

a. Total Intensitas Tanaman Padi Tahun 2017 s.d 2021

No	Tahun	Intensitas Tanam Padi
1	2017	145%
2	2018	144%
3	2019	143%
4	2020	142%
5	2021	141%

b. Status Petani

- Rata-Rata Kepemilikan Lahan 7 %
- Jumlah Petani 100 %
- Pemilik 40 %
- Penggarap 18 %
- Pemilik Penggarap 41 %
- Penyewa 2 %

c. Pendapatan Petani

PENDAPATAN PETANI	2018	2019	2020	2021	TOTAL	%
PADI	2,066,300,000	2,070,700,000	2,382,897,750	1,976,600,000	10,564,647,750	24
PALAWIJA	1,171,900,000	1,173,600,000	1,229,500,000	1,402,888,150	6,143,888,150	14
SAYUR	1,082,700,000	1,126,500,000	1,140,500,000	333,800,000	4,745,250,000	11
BUAH	5,141,000,000	4,882,000,000	4,780,000,000	4,790,000,000	23,365,000,000	52
				TOTAL	44,818,785,900	100

Prosentase rata-rata pendapatan petani terbesar melalui irigasi adalah 1) BUAH = 24 % , 2) PADI = 14 % , 3) PALAWIJA = 11 % , 4) SAYUR = 52 %

4. FORM1.04 KONDISI PERTANIAN (PRODUKSI dan PRODUKTIFITAS) Diambil melalui sampel Daerah Irigasi

RENCANA 5 TAHUN KEDEPAN	2022	2023	2024	2025	2026
PRODUKSI PADI (TON GKG)	125	598	634	657	692
PRODUKTIVITAS PADI (T/HA GKG)	9	9	9	9	10
PRODUKTIVITAS PALAWIJA (T/HA)	46	48	48	51	50
PRODUKTIVITAS SAYUR (T/HA)	53	55	58	58	59
PRODUKTIFITAS BUAH-BUAHAN (T/HA)	4268	4281	4287	4299	4308

5. FORM 2.01 INFORMASI KONDISI P3A/GP3A

- Total GP3A Kabupaten Banjarnegara 5 Kelompok
- Total P3A 116 Kelompok
- STATUS GP3A 5 B (BERKEMBANG)
- STATUS P3A DI TEKNIS
 - LIMBANGAN 13 B (BERKEMBANG)
 - CLANGAP 5 B (BERKEMBANG)
 - LIANGAN 9 SB (SEDANG BERKEMBANG)
 - KRIKIL 4 SB (SEDANG BERKEMBANG)
 - BRENGKUT 2 SB (SEDANG BERKEMBANG)
 - RECA 1 SB (SEDANG BERKEMBANG)
 - SIDAMULYA 1 SB (SEDANG BERKEMBANG)
 - SIRUKEM 3 SB (SEDANG BERKEMBANG)
 - DI LAIN 78 BB (BELUM BERKEMBANG)

6. FORM 2.02 INFORMASI DAN KONDISI POKTAN dan GAPOKTAN
TOTAL GAPOKTAN 278 GAPOKTAN

- TOTAL POKTAN 1112 POKTAN

catatan :

PAKTAN dan GAPOKTAN telah terintegrasi melalui simpoktan dari kementerian pertanian

7. FORM 2.03 PELAKSANAAN KEGIATAN PSETK DAN PELATIHAN P3A/GP3A 5 TAHUN TERAKHIR

- Jumlah P3A terdata PSETK 70 Kelompok
 - Jumlah GP3A terdata PSETK 5 Kelompok
- Hasil PSETK Kewenangan Kabupaten Banjarnegara

PSETK	2017	2018	2019	2020	2021
REALISASI PSETK			6	43	101
LUAS DI PSETK (HA)			2723	2381	3861
TOTAL REALISASI			2729	2424	3962
TOTAL KURANG	165	DI			
	7237	HA			

8. FORM 2.04 PELAKSANAAN REALISASI PELATIHAN POKTAN/GAPOKTAN

Realisasi Pelatihan Poktan dan Gapoktan

Data yang terkumpul merupakan data dari 10 Kecamatan sebagai sampel Dokumen

	2017	2018	2019	2020	2021
POKTAN	36	21	40	29	89
GAPOKTAN	0	5	0	1	1
TOTAL BELUM					
JUMLAH POKTAN	278				
JUMLAH GAPOKTAN	1112				

Dari Total poktan yaitu 1.112 baru terlaksana 278 kelompok yaitu 97 % yang belum terlaksana pelatihan

9. FORM 3.01 KONDISI BANGUNAN UTAMA

Data Kondisi bangunan utama Jaringan irigasi di Kabupaten Banjarnegara di peroleh hasil total kondisi yaitu

NAMA BANGUNAN	JUMLAH KONDISI BANGUNAN			
	B	RR	RS	RB
BENDUNG	57	151	94	23
INTAKE	1	5	42	5
KANTONG LUMPUR	0	0	6	10
KOLAM OLAK	0	0	0	8
PINTU AIR	0	0	73	0
TOTAL	58	156	215	46
PRSENTASE %	12	33	45	10

10. FORM 3.02 KONDISI SALURAN

Data Total Kondisi saluran irigasi Kabupaten Banjarnegara yaitu :

NAMA SALURAN	KONDISI PANJANG SALURAN IRIGASI (M')					
	TOTAL PJ	B	RR	RS	RB	TOTAL
PRIMER	315.532	6.094	58.509	198.593	48.518	311.714
PRESENTASE (%)		2	19	64	16	100
SKUNDER	38.948	0	6.733	28.494	0	35.227
PRESENTASE (%)		-	19	81	-	100
DRAINASE	-	0	0	0	0	-
PRESENTASE (%)		-	-	-	-	-
TERSIER	14.871	0	695	633	13.543	14.871
		-	5	4	91	100
Total Panjang						361.812

11. FORM 3.03 KONDISI BANGUNAN BAG I

Total Kondisi Bangunan Bagian I

NAMA BANGUNAN	KONDISI BANGUNAN BAGI BAGIAN I (M')					
	TOTAL PJ	B	RR	RS	RB	TOTAL
BANG BAGI	3	0	3	0	0	3
PRESENTASE (%)		-	100	-	-	100
BANG BAGI SADAP	45	0	45	0	0	45
PRESENTASE (%)		-	100	-	-	100
BANG SADAP	1,384	0	85	1291	0	1,376
PRESENTASE (%)		-	6	94	-	100
JEMBATAN	56	0	47	9	0	56

NAMA BANGUNAN	KONDISI BANGUNAN BAGI BAGIAN I (M')					
	TOTAL PJ	B	RR	RS	RB	TOTAL
PRESENTASE (%)		-	84	16	-	100
GORONG-GORONG	361	0	0	52	308	360
PRESENTASE (%)		-	-	14	86	100
TALANG	151	0	11	140	0	151
PRESENTASE (%)	3	-	7	93	-	100
						1,991

12. BAB 3.04 KONDISI BANGUNAN BAG. II

Total Kondisi Bangunan Bagian ke II yaitu :

BANGUNAN	KONDISI BANGUNAN BAG II					
	TOTAL PANJANG	B	RR	RS	RB	TOTAL
SIPHON	-	0	0	0	0	-
PRESENTASE (%)		-	-	-	-	-
TERJUNAN	176	0	0	176	0	176
PRESENTASE (%)		-	-	49	-	49
GOT MIRING	13	0	0	13	0	13
PRESENTASE (%)		-	-	9	-	9
						189

13. FORM 3.05 KONDISI FASILITAS PENDUKUNG

Hasil Inventarisasi Fasilitas Pendukung pada Form 3.05 di laksanakan pada 5 (lima) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi DPUPR Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut :

a. UPTD WILAYAH I Pemeliharaan Jalan dan Irigasi

Total Daerah Irigasi 77 DI dengan luas areal 3.375 Ha

KELAMBAGAAN OPERASIONAL	Kepala UPTD/ Pengamat	Jml Mantri /Juru	Jml petugas OP Bendung	Jml Petugas PPA	Jml Pekerja saluran	Jml Staf UPTD	Jml. Pekerja bendung
	1	1	2	2	2	20	0

KELEMBAGAAN PETANI	Jml. IP3A	Jml. GP3A	Jml. P3A
	0	1	36

SDM	STATUS PEGAWAI	Jml. Pengamat/ pend.S1 atau D3	Jml. Mantri pend. SLA	Jml. OP Bendung pend. SLTP	Jml. PPA pend. SLTP	Jml. Pekarya pend.SD
		2	1	2	2	2

BANGUNAN GEDUNG	BANGUNAN GEDUNG UPTD	RUMAH DINAS PENGAMAT	Jml. RM. Jaga Bendung	Jml. RM. Penjaga Pintu
	1	0	2	0

PERALATAN	Jml. Kend. Roda empat	Jml. Kend. Roda dua	Jml. Kend. Sepeda	Jml. Alat komunikasi	Peralatan dan Perlengkapan OP
	1	0	0	0	7

b. UPTD WILAYAH II Pemeliharaan Jalan dan Irigasi

Total Daerah Irigasi 41 DI dengan luas areal 1.282 Ha

KELAMBAGAAN OPERASIONAL	Kepala UPTD/ Pengamat	Jml Mantri /Juru	Jml petugas OP Bendung	Jml Petugas PPA	Jml Pekerja saluran	Jml Staf UPTD	Jml. Pekerja bendung
	1	2	2	0	4	42	0

KELEMBAGAAN PETANI	Jml. IP3A	Jml. GP3A	Jml. P3A
	0	0	11

SDM	STATUS PEGAWAI	Jml. Pengamat/ pend.S1 atau D3	Jml. Mantri pend. SLA	Jml. OP Bendung pend. SLTP	Jml. PPA pend. SLTP	Jml. Pekarya pend.SD
		1	2	2	4	0

BANG. GEDUNG	Jml. Bang. Kantor UPTD	Jml. RM. Dinas Pengamat	Jml. RM. Jaga Bendung	Jml. RM. Penjaga Pintu
	2	0	1	0

PERALA TAN	Jml. Kend. Roda empat	Jml. Kend. Roda dua	Jml. Kend. Sepeda	Jml. Alat komuni kasi	Peralatan dan Perlengkapan OP
	1	2	0	0	0

c. UPTD WILAYAH III Pemeliharaan Jalan dan Irigasi
Total Daerah Irigasi 59 DI dengan luas areal 3.918 Ha

KELAMBAGAAN OPERASIONAL	Kepala UPTD/ Pengamat	Jml Mantri /Juru	Jml petugas OP Bendung	Jml Petugas PPA	Jml Pekerja saluran	Jml Staf UPTD	Jml. Pekerja bendung
	1	2	2	2	4	30	0

KELEMBAGAAN PETANI	Jml. IP3A	Jml. GP3A	Jml. P3A
	0	2	38

SDM	STATUS PEGAWAI	Jml. Pengamat/ pend.S1 atau D3	Jml. Mantri pend. SLA	Jml. OP Bendung pend. SLTP	Jml. PPA pend. SLTP	Jml. Pekarya pend.SD
		3	2	2	2	4

BANG. GEDUNG	Jml. Bang. Kantor UPTD	Jml. RM. Dinas Pengamat	Jml. RM. Jaga Bendung	Jml. RM. Penjaga Pintu
	2	0	1	0

PERALA TAN	Jml. Kend. Roda empat	Jml. Kend. Roda dua	Jml. Kend. Sepeda	Jml. Alat komun ikasi	Peralatan dan Perlengka pan OP
	1	4	0	0	0

d. UPTD WILAYAH IV Pemeliharaan Jalan dan Irigasi
Total Daerah Irigasi 86 DI dengan luas areal 3.738 Ha

KELAMBAGAAN OPERASIONAL	Kepala UPTD/ Pengamat	Jml Mantri /Juru	Jml petugas OP Bendung	Jml Petugas PPA	Jml Pekerja saluran	Jml Staf UPTD	Jml. Pekerja bendung
	1	1	0	0	0	1	0

KELEMBAGAAN PETANI	Jml. IP3A	Jml. GP3A	Jml. P3A
	0	0	20

SDM	STATUS PEGAWAI	Jml. Pengamat/ pend.S1 atau D3	Jml. Mantri pend. SLA	Jml. OP Bendung pend. SLTP	Jml. PPA pend. SLTP	Jml. Pekarya pend.SD
		1	1	0	1	0

BANG. GEDUNG	Jml. Bang. Kantor UPTD	Jml. RM. Dinas Pengamat	Jml. RM. Jaga Bendung	Jml. RM. Penjaga Pintu
	0	0	0	0

PERALATAN	Jml. Kend. Roda empat	Jml. Kend. Roda dua	Jml. Kend. Sepe da	Jml. Alat komunikasi	Peralatan dan Perlengkapan OP
	1	1	0	0	0

e. UPTD WILAYAH V Pemeliharaan Jalan dan Irigasi
Total Daerah Irigasi 52 DI dengan luas areal 3.889 Ha

KELAMBAGAAN OPERASIONAL	Kepala UPTD/ Pengamat	Jml Mantri /Juru	Jml petugas OP Bendung	Jml Petugas PPA	Jml Pekerja saluran	Jml Staf UPTD	Jml. Pekerja bendung
	1	0	0	0	0	1	0

KELEMBAGAAN PETANI	Jml. IP3A	Jml. GP3A	Jml. P3A
	0	0	10

SDM	STATUS PEGAWAI	Jml. Pengamat/ pend.S1 atau D3	Jml. Mantri pend. SLA	Jml. OP Bendung pend. SLTP	Jml. PPA pend. SLTP	Jml. Pekarya pend.SD
		2	0	0	0	0

BANG. GEDUNG	Jml. Bang. Kantor UPTD	Jml. RM. Dinas Pengamat	Jml. RM. Jaga Bendung	Jml. RM. Penjaga Pintu
	0	0	0	0

PERALATAN	Jml. Kend. Roda empat	Jml. Kend. Roda dua	Jml. Kend. Sepeda	Jml. Alat komunikasi	Peralatan dan Perlengkapan OP
	1	1	0	0	0

14. FORM 3.06 INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI

Dari hasil Inventarisasi data E-PAKSI Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara diperoleh data 313 Daerah Irigasi yang telah dilakukan penilaian IKSI pada tahun 2019 dengan total luas Baku yaitu 16,097 Ha dengan total Penilaian IKSI sebagai berikut :

TOTAL IKSI JARINGAN UTAMA							
Prasarana Fisik	Produktivitas Tanam	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	Gp3a/P3a	Nilai Max (%)	Kategori
18.56	14.59	6.95	8.80	2.97	3.45	55.31	KINERJA JELEK
TOTAL IKSI JARINGAN TERSIER							
Prasarana Fisik	Produktivitas Tanam	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	Gp3a/3a	Nilai Max (%)	Kategori
0.11	14.63	6.17	4.62	2.58	6.38	34.49	KINERJA JELEK
KINERJA DI				REKOMENDASI			
Nilai Max (%)	Kategori	Prasarana Fisik	Produktivitas Tanam	Sarana Penunjang	Organisasi Personalia	Dokumentasi	Gp3a/3a
44.95	Kinerja Jelek	9.38	14.61	6.56	6.72	2.78	4.90

15. FORM 4.01 STATUS SDM PADA INSTANSI PEMERINTAH

Status SDM ini di data berdasarkan jumlah Personil di 5 (lima) UPTD yang ada yaitu sebagai berikut :

	PNS	NON PNS	KEPALA UPTD	JURU/MANTRI	POB	PPA	PS
KEBUTUHAN SDM (ORANG)							
JUMLAH EKSISTING	29	22	5	7	4	16	18
RENCANA PENSIUN DARI 2022 S/D 2026	12		-	6	1	3	2
KEBUTUHAN REKRUTMEN			0	19	20	65	109

16. FORM 4.02 FASILITASI OP

Inventarisasi Alat-alat OP dan kebutuhan yang ada di UPTD

TOTAL KEBUTUHAN FASILITAS OP	UPTD I	UPTD II	UPTD III	UPTD IV	UPTD V	TOTAL
Kantor	1	0	1	0	0	2
Rumah dinas	1	0	1	0	0	2
Rumah OP	1	0	0	0	0	1
Mobil pick up	1	1	1	1	1	5
Sepeda motor	0	3	3	1	0	7
Sepeda	0	0	0		0	0
Alat komunikasi		0	0	0	0	0
Peralatan dan perlengkapan OP	1					1
Papan Informasi dan Pengumuman Kantor	0	2	2	0	0	4
Perlengkapan Kunci dan Alat	20	0	0	0	0	20

TOTAL KEBUTUHAN FASILITAS OP	UPTD I	UPTD II	UPTD III	UPTD IV	UPTD V	TOTAL
Pumpgrease, dll.						
Perlengkapan Pembersih Garuk, Cangkul, dll	0	20	20	0	0	40
Genset Portabel	0	0	0	0	0	0
Roll Kabel Besar	20	0	0	0	0	20
Senter Tangan	7	20	20	0	1	48
Senter Portabel	0	20	20	0	1	41
Helm Safty	3	0	20	0	0	23
Mesin Babat Rumput		2	4	0	1	7
TOTAL FASILITAS OP	UPTD I	UPTD II	UPTD III	UPTD IV	UPTD V	TOTAL
Kantor	1	1	0	1	1	4
Rumah dinas	1	1	1	1	1	5
Rumah OP	0	1	1	1	1	4
Mobil pick up	0	0	0	0	0	0
Sepeda motor	3	1	2	2	5	13
Sepeda	0	0	0	0	0	0
Alat komunikasi	4	5	5	4	4	22
Peralatan dan perlengkapan OP						0
Papan Informasi dan Pengumuman Kantor	3	0	2	4	5	14
Perlengkapan Kunci dan Alat Pumpgrease, dll.	2	2	4	2	2	12
Perlengkapan Pembersih Garuk, Cangkul, dll	0	0	6	23	22	51
Genset Portabel	2	2	2	2	4	12
Roll Kabel Besar	1	1	2	23	2	29
Senter Tangan	0	0	6	23	21	50
Senter Portabel	13	0	6	23	21	63
Helm Safty	20	41	20	30	30	141
Mesin Babat Rumput	4	3	3	5	3	18

17. FORMAT - 5.01 : KEBUTUHAN dan REALISASI PEMBIAYAAN O&P IRIGASI PADA 5 TAHUN TERAKHIR

Nilai Kebutuhan yang Pembiayaan O&P Irigasi di kabupaten banjarnegara di peroleh melalui Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara dengan Rincian sebagai berikut :

TOTAL KEBUTUHAN

Operasi (Rp)	Pemeliharaan (Rp)		Total Pemeliharaan	TOTAL (Rp.)	RP/Ha
	Rutin	Berkala			
14,102,381,284	5,484,259,388	9,401,587,522	14,885,846,911	28,988,228,194	357,835

TOTAL REALISASI

Operasi (Rp)	Pemeliharaan (Rp)		Total Pemeliharaan	TOTAL (Rp)	RP/Ha
	Rutin	Berkala			
224,650,400	3,140,600,600	5,692,000,000	8,832,600,600	9,057,251,000	111,804

Hasil dari table diatas di katahui :

- Realisasi terhadap biaya kebutuhan operasi masih kurang yaitu Rp.13,877,730,884
- Realisasi terhadap biaya kebutuhan pemeliharaan rutin masih kurang yaitu Rp.2,343,658,788
- Realisasi terhadap biaya kebutuhan pemeliharaan berkala masih kurang yaitu Rp.3,709,587,522
- Total kekurangan kegiatan pemeliharaan yaitu Rp.6,053,246,311
- Total kekurangan kegiatan op irigasi yaitu Rp.19,930,977,194
- Selisih nilai areal per hektar /rupiah yaitu Rp.246,031

18. FORMAT - 6.01 : RINGKASAN MASALAH TENTANG IRIGASI DAN UPAYAH PEMECAHANNYA

Dari tiga instansi pengelola irigasi terdapat masalah dalam pengelolaannya yaitu

- a. KERANGKA HUKUM PERDA IRIGASI BELUM SELESAI
- b. RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA BERAKHIR PADA TAHUN 2022
- c. SK KOMISI IRIGASI PERLU DI SUSUN ULANG UNTUK PENAMBAHAN ANGGOTA
- d. REKRUTMEN SDM INSTANSI DALAM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN IRIGASI DAN KOMISI IRIGASI
- e. BELUM ADANYA UPDATING KEMBALI KELEMBAGAAN P3A DAN GP3A
- f. KONDISI FISIK SARANA, PRASARANA, SDM DAN KINERJA IRIGASI YANG BURUK PERLU ANGGARAN YANG BESAR
- g. RATA-RATA LAHAN PERTANIAN DISEWAKAN MENIMBULKAN DAMPAK TIDAK MENGIKUTI POLA TANAM YANG ADA DENGAN SASARAN TARJET PENGHASILAN
- h. KEBUTUHAN BENING, PUPUK DAN OBAT TANAMAN SEMAKIN BERKURANG
- i. SEBAGIAN BESAR PETANI TIDAK MENGIKUTI JADWAL POLA DAN TATA TANAM

- j. KONDISI DEBIT AIR PADA MUSIM KEMARAU KURANG UNTUK PERTANIAN SEHINGGA TERJADI KONDISI BERO
- k. BELUM ADANYA SISTEM BERBAGI DATA PERTANIAN, IRIGASI DAN KELEMBAGAANYA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

19. **FORMAT - 7.01: PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI PADA 5 TAHUN TERAKHIR**

Pendataan dalam form 7.01 ini diperoleh melalui data-data yang dihimpun dari Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut :

REALISASI DESAIN (ha)

TOTAL AREAL	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
16,202	606	548	3436	592	450

REALISASI KONSTRUKSI REHABILITASI JARINGAN UTAMA (ha)

TOTAL AREAL	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
16,202	3230	2491	3287	2532	2840

20. **FORMAT - 8.01 : DAFTAR DI YANG SUDAH DI DESAIN (SID) DAN BELUM DILAKSANAKAN REHABILITASI JARINGAN UTAMA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR**

Dalam Form 8.01 diperoleh ringkasan Desain SID yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejumlah 52 Daerah Irigasi dengan Total areal yaitu 5.632 Ha. Kemudian untuk Realisasi Kontruksi setelah pelaksanaan SID yaitu 3.239,55 Ha yang berarti belum terwujudnya kontruksi yang sesuai dengan Desain SID yang telah tersusun.

Dari Hasil Realisasi diatas maka masih terdapat 263 Daerah Irigasi yang belum melaksanakan Desain SID yaitu seluas 10.570 Ha untuk DI Kewenangan Kabupaten Banjarnegara.

B. PROGRAM DAN RENCANA PEMBIAYAAN

1. **FORMAT - 9.01 : DAFTAR DI PRIORITAS DAN PROGRAM REHABILITASI DALAM 5 TAHUN KEDEPAN**

Jumlah DI Prioritas dan Program Rehabilitasi dalam 5 (lima) Tahun kedepan sejumlah 315 DI dengan rencana pelaksanaan kegiatan yaitu

a. Tahun 2022

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi antara lain kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan pada 40 Jaringan Irigasi
- 2) Total Desain SID pada areal seluas 993 Ha
- 3) Total Pelaksanaan Konstruksi mencakup areal seluas 540 Ha.
- 4) Dengan Estimasi angrgran yaitu sebesar Rp. 11.571.967.000,-

b. Tahun 2023

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi antara lain kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan pada 69 Jaringan Irigasi
- 2) Total Desain SID pada areal seluas 4.390 Ha
- 3) Total Pelaksanaan Konstruksi mencakup areal seluas 1.249 Ha.
- 4) Dengan Estimasi angrgran yaitu sebesar Rp. 51.654.644.000,-

c. Tahun 2024

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi antara lain kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan pada 70 Jaringan Irigasi
- 2) Total Desain SID pada areal seluas 3.542 Ha
- 3) Total Pelaksanaan Konstruksi mencakup areal seluas 1.407 Ha.
- 4) Dengan Estimasi anggaran yaitu sebesar Rp. 39.708.461.000,-

d. Tahun 2025

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi antara lain kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan pada 58 Jaringan Irigasi
- 2) Total Desain SID pada areal seluas 3.552 Ha
- 3) Total Pelaksanaan Konstruksi mencakup areal seluas 1.574 Ha.
- 4) Dengan Estimasi anggaran yaitu sebesar Rp. 37.254.194.000,-

e. Tahun 2026

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi antara lain kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan pada 67 Jaringan Irigasi
- 2) Total Desain SID pada areal seluas 2.818 Ha
- 3) Total Pelaksanaan Konstruksi mencakup areal seluas 1.478 Ha.
- 4) Dengan Estimasi anggaran yaitu sebesar Rp. 30.841.049.000,-

2. FORMAT - 9.02.A : PROGRAM PENGEMBANGAN SDM

Form ini adalah menggambarkan kebutuhan dan rencana penambahan tenaga pengelola O dan P Irigasi di masing-masing UPTD Wilayah, namun dari hasil inventarisasi data tidak di peroleh data rencana pengadaan Staf Pelaksana Operasi Saluran Irigasi pada Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, berikut table kebutuhan SDM yang ada

NO	NAMA	KEBUTUHAN REKRUITMEN STAF PELAKSANA OPERASI (ORG)		
		Total	PNS	NON PNS
I	UPTD WILAYAH I			
	- Pengamat			
	- Mantri/Juru Pengairan	3	3	
	- Petugas Operasi Bendung (POB)	4	4	
	- Petugas Pintu Air (PPA)	20	9	9
	- Pekerja/pekerja saluran (PS)	24		24
II	UPTD WILAYAH II			
	- Pengamat			
	- Mantri/Juru Pengairan	4	4	
	- Petugas Operasi Bendung (POB)	4	4	
	- Petugas Pintu Air (PPA)	9	4	4
	- Pekerja/pekerja saluran (PS)	21		19
	Petugas Pelaksana:			
III	UPTD WILAYAH III			
	- Pengamat			
	- Mantri/Juru Pengairan	5	5	
	- Petugas Operasi Bendung	4	4	

NO	NAMA	KEBUTUHAN REKRUITMEN STAF PELAKSANA OPERASI (ORG)		
		Total	PNS	NON PNS
	(POB)			
	- Petugas Pintu Air (PPA)	18	9	9
	- Pekerja/pekerja saluran (PS)	19		19
IV	UPTD WILAYAH IV			
	- Pengamat			
	- Mantri/Juru Pengairan	3	3	
	- Petugas Operasi Bendung (POB)	4	4	
	- Petugas Pintu Air (PPA)	10	5	5
	- Pekerja/pekerja saluran (PS)	23		23
V	UPTD WILAYAH V			
	- Pengamat			
	- Mantri/Juru Pengairan	5	5	
	- Petugas Operasi Bendung (POB)	4	4	
	- Petugas Pintu Air (PPA)	8	4	4
	- Pekerja/pekerja saluran (PS)	22		22

3. FORMAT - 9.02.B : PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DI INSTANSI PEMERINTAH (PELATIHAN)

NO	PROGRAM PELATIHAN SDM					
	KEBUTUHAN PELATIHAN (NAMA JENIS PELATIHAN)	2022	2023	2024	2025	2026
I	DINAS PUPR					
1	Pelatihan Update data E-PAKSI	V				
2	Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi		V			
3	Pelatihan Perencanaan Irigasi			V		
4	Pelatihan survay Pemetaan dan Drone		V			
5	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi			V		
	JUMLAH KEGIATAN	1	2	2	0	0
II	BAPERLITBANG					
1	Pelatihan PSETK	V		V		V
2	Pelatihan KPI		V		V	
3	Pelatihan P3A/GP3A/IP3A			V		V
4	Pelatihan TOT		V		V	
	JUMLAH KEGIATAN	1	2	2	2	2
III	DINTANKAN dan KP					
1	Pelatihan Poktan/Gapoktan					
2	Pelatihan PPL					

	JUMLAH KEGIATAN	0	0	0	0	0
--	-----------------	---	---	---	---	---

4. FORMAT - 9.03 : PROGRAM FASILITAS OP

Total kebutuhan Fasilitasi OP pada 5 (lima) UPTD dan dilakukan perencanaan pengadaan pada lima tahun kedepan (2022-2026) dengan rincian sebagai berikut dalam table dibawah ini :

NO	NAMA	KEBUTUHAN FASILITAS OP	PROGRAM PENGADAAN FASILITAS OP				
			2022 (Jum)	2023 (Jum)	2024 (Jum)	2025 (Jum)	2026 (Jum)
1.1	Kantor	4	0	2	2	0	0
1.2	Rumah dinas	5	0	1	1	0	3
1.3	Mobil pick up	0	0	0	0	0	0
1.4	Sepeda motor	13	7	2	2	1	1
1.5	Alat komunikasi	22	0	6	6	4	6
1.6	Peralatan dan perlengkapan OP (ATK)	0	0	0	0	0	0
1.7	Papan Informasi dan Pengumuman Kantor	14	0	8	4	2	0
1.8	Perlengkapan Kunci dan Alat Pumpgrease, dll.	12	0	5	6	0	0
1.9	Perlengkapan Pembersih Garuk, Cangkul, dll	51	40	0	0	0	0
1.10	Genset Portabel	12	5	0	0	0	0
1.11	Roll Kabel Besar	7	0	0	0	0	4
1.12	Senter Tangan	50	50	0	0	0	0
1.13	Senter Portabel	63	63	0	0	0	0
1.16	Helm Safty	141	13	0	0	60	61
1.17	Mesin Babat Rumput	18	12	2	2	1	1
1.18	Komputer	6	6	0	0	0	0
1.19	Laptop	6	6	0	0	0	0
1.20	GPS	6	6	0	0	0	0
1.21	Drone	6	6	0	0	0	0
1.22	Kendaraan Roda - 3	6	6	0	0	0	0
1.23	Penerangan	9	9	0	0	0	0
1.24	curenmeter	6	6	0	0	0	0

5. FORMAT-9.04: PRIORITAS DI: PROGRAM PEMBENTUKAN/ LEGALISASI dan PELATIHAN P3A/GP3A/IP3A

Dari data yang diperoleh GP3A dan P3A belum mencakup keseluruhan Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Banjarnegara dan data-data yang diperoleh adalah data lama yang belum terupdate maka dari itu, data yang ada (eksisting) ditambah dengan P3A/GP3A yang belum terbentuk dengan asumsi bahwa Desa yang dilayani dengan Jaringan Irigasi di Kabupaten Banjarnegara perlu adanya P3A/GP3A maka dilakukan perencanaan Pembentukan legalisasi dan Pelatihan maka diperoleh rekapitulasi sebagai berikut :

- Kebutuhan P3A adalah 436 Kelompok dan 7 GP3A
- Jumlah Eksisting P3A dikabupaten Banjarnegara adalah 112 Kelompok dengan 6 GP3A kewenangan Daerah

Dari data tersebut diatas Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara bersama Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara merencanakan :

- Kebutuhan Reorganisasi sejumlah 420 kelompok

NAMA DI (PRIORITAS)	LUAS (ha)	JUMLAH DI PSETK	PROGRAM PENYUSUNAN PSETK (ha)	RENCANA PEMBENTUKAN/REVITALISASI P3A/GP3A/IP 3A (Unit)	RENCANA KONSTRUKSI PARTISIPATIF (Ha)				
					2022	2023	2024	2025	2026
JUMLAH :	1.431	33 DI	1.431	43	-	511	-	-	-
TAHUN (3) - 2024									
JUMLAH :	1.434	33 DI	1.434	39	-	-	506	-	-
TAHUN (4) - 2025									
JUMLAH :	1.451	33 DI	1.451	38	-	-	-	643	-
TAHUN (5) - 2026									
JUMLAH :	1.483	32 DI	1.483	43	-	-	-	-	576
JUMLAH :	7.237	2.663,06	7.237	204	426	511	506	643	576

b. Rencana Pengadaan TPM/Ka TPM

PENGADAAN TPM / KTPM														
2022			2023			2024			2025			2026		
TPM (orang)	KTPM (orang)	Jumlah TPM + KTPM	TPM (orang)	KTPM (orang)	Jumlah TPM + KTPM	TPM (orang)	KTPM (orang)	Jumlah TPM + KTPM	TPM (orang)	KTPM (orang)	Jumlah TPM + KTPM	TPM (orang)	KTPM (orang)	Jumlah TPM + KTPM
5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	1	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
5	1	6	5	1	6	5	1	6	5	1	6	6	1	7

8. FORMAT - 9.09 : DAFTAR DI PROGRAM PAI dan IKSI DALAM 5 TAHUN KEDEPAN

JUMLAH DI	LUAS REHAB (ha)	Program PAKSI dalam 5 Tahun Kedepan (Luas DI ha)					KETERANGAN
		2022	2023	2024	2025	2026	
TAHUN (1)							
109	759	759					Update Data E-PAKSI
Jumlah	759	759	-	-	-	-	
TAHUN (2)							
52	1.210,5		1.210,5				Update Data E-PAKSI
Jumlah	1.211	-	1.210,5	-	-	-	
TAHUN (3)							
61	1.265,7			1.265,7			Update Data E-PAKSI
Jumlah	1.266	-	-	1.265,7	-	-	
TAHUN (4)							
63	1.514,4				1.514,4		Update Data E-PAKSI
Jumlah	1.514	-	-	-	1.514,4	-	
TAHUN (5)							
57	1.450,4					1.450,4	Update Data E-PAKSI
Jumlah	1.450,4	-	-	-	-	1.450,4	
	6.199,6	758,6	1.210,5	1.265,7	1.514,4	1.450,4	

9. **FORMAT - 10.01: RENCANA KEGIATAN, HARGA SATUAN dan PEMBIAYAAN RENCANA PENGELOLAAN IRIGASI - KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI**

Ringkasan dari form 10.01 adalah total biaya kegiatan 5 tahun kedepan yaitu :

No.	KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN				
		2022 - Tahun ke 1 (Satu)	2023 - Tahun ke 2 (dua)	2024 - Tahun ke 3 (tiga)	2025 - Tahun ke 4 (empat)	2026 - Tahun ke 5 (lima)
		Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya
A	PEMBERDAYAAN KPI					
	Total A	20.000.000	1.055.000.000	1.155.000.000	880.000.000	820.000.000
B	EVALUASI KINERJA P3A/GP3A/IP3A					
	Total B	75.000.000	125.000.000	108.000.000	123.000.000	117.000.000
	TOTAL A+B	95.000.000	1.180.000.000	1.263.000.000	1.003.000.000	937.000.000

10. **FORMAT - 10.02: RENCANA KEGIATAN, HARGA SATUAN dan PEMBIAYAAN RENCANA PENGELOLAAN IRIGASI - OPERASI JARINGAN IRIGASI**

No.	KEGIATAN	Rencana Kegiatan				
		2022 - Tahun ke 1 (Satu)	2023 - Tahun ke 2 (dua)	2024 - Tahun ke 3 (tiga)	2025 - Tahun ke 4 (empat)	2026 - Tahun ke 5 (lima)
		Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya
A	PERENCANAAN OPERASI JARINGAN IRIGASI	15.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
B	PELAKSANAAN OPERASI JARINGAN IRIGASI	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000
C	PEMANFAATAN SUMBER AIR LAIN					
D	MONITORING dan EVALUASI	227.574.000	363.150.000	379.698.000	454.323.000	435.129.000
E	KELEMBAGAAN dan SUMBER DAYA MANUSIA	0	0	525.000.000	0	0
	TOTAL A+B+C+D	257.574.000	393.150.000	934.698.000	489.323.000	470.129.000

11. **FORMAT - 10.03: RENCANA KEGIATAN, HARGA SATUAN dan PEMBIAYAAN RENCANA PENGELOLAAN IRIGASI - PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI**

No.	KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN				
		2022 - Tahun ke 1 (Satu)	2023 - Tahun ke 2 (dua)	2024 - Tahun ke 3 (tiga)	2025 - Tahun ke 4 (empat)	2026 - Tahun ke 5 (lima)
		Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya
A	INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI	227.574.000	363.150.000	379.698.000	454.323.000	435.129.000
B	PERENCANAAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
C	PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	75.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000
D	PEMANTAUAN, EVALUASI dan PELAPORAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	TOTAL :	377.574.000	538.150.000	634.698.000	759.323.000	740.129.000

12. FORMAT - 10.04: RENCANA KEGIATAN, HARGA SATUAN dan PEMBIAYAAN RENCANA PENGELOLAAN IRIGASI - REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

No.	KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN				
		2022 - Tahun ke 1 (Satu)	2023 - Tahun ke 2 (dua)	2024 - Tahun ke 3 (tiga)	2025 - Tahun ke 4 (empat)	2026 - Tahun ke 5 (lima)
		Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya
1	Sosialisasi dan Konsultansi Publik	0	0	0	0	0
2	Survei, Investigasi dan Disain	0	878.081.979	708.400.000	710.400.000	563.600.000
3	Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0
4	Pelaksanaan Konstruksi	11.691.967.000	70.403.252.842	60.837.861.196	55.743.666.550	53.009.349.409
5	Persiapan Operasi dan Pemeliharaan		45.000.000	45.000.000	60.000.000	90.000.000
Total = Total 1 + 2 + 3 + 4 + 5		11.691.967.000	71.326.334.820	61.591.261.196	56.514.066.550	53.662.949.409

13. FORMAT - 10.05: RENCANA KEGIATAN, HARGA SATUAN dan PEMBIAYAAN RENCANA PENGELOLAAN IRIGASI - BAPPEDA (PEMBERDAYAAN TPM dan PENYUSUNAN PSETK)

No.	KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN				
		2022 - Tahun ke 1 (Satu)	2023 - Tahun ke 2 (dua)	2024 - Tahun ke 3 (tiga)	2025 - Tahun ke 4 (empat)	2026 - Tahun ke 5 (lima)
		Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya	Total Biaya
A	PEMBERDAYAAN KPI	205.000.000	410.000.000	225.000.000	210.000.000	60.000.000
B	PEMBERDAYAAN TPM	44.000.000	44.000.000	45.500.000	30.500.000	34.000.000
C	PELATIHAN DAN PENYUSUNAN PSETK	152.850.000	142.325.000	121.040.000	122.060.000	128.980.000
	TOTAL A+B+C =	401.850.000	596.325.000	391.540.000	362.560.000	222.980.000

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi) merupakan kerja kolaborasi dari para pihak terkait irigasi baik itu dari Pemerintah dan Non Pemerintah. Dari unsur pemerintah Bappelitbang, Dinas PUPR, dan Dinas Tankan KP masing-masing mempunyai tugas yang terbagi dalam dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini.

Bappelitbang merupakan SKPD yang mempunyai tugas diantaranya mewujudkan pembagian kewenangan pusat dan daerah dan penggalan sumber dana pengairan dan irigasi, mendorong adanya koordinasi antar dinas terkait/ sektor dan juga menata kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di daerah. Dalam melakukan fungsi tersebut Bappelitbang melakukan dengan beberapa kegiatan yang pembiayaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah diantaranya:

- Menyiapkan kerangka hukum PPSI, yang dalam hal ini melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Irigasi setelah disusun oleh Dinas PUPR dan ditetapkan menjadi Perda. Tahapan ini tentu memiliki kendala terkait waktu atau Proses dalam Penetapan Perda tidaklah sebentar dan perlu tahapan yang harus dilakukan yaitu Penyusunan Dokumen Naskah Akademis dan Penyusunan Raperda. Sehingga tentunya tahapan ini masih menunggu tahapan tersebut untuk dilaksanakan.
- Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi periode lima tahun berikutnya yang tentunya tahapannya bekerja bersama dengan Dinas PUPR dan DINTANKAN KP sebagai pelaksana penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi. Bappelitbang bertugas untuk Menyediakan SK Tim Penyusun dan juga mensosialisasikan Drafr Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sekaligus memfasilitasi proses penetapannya
- Fasilitasi Komisi Irigasi, yang terdiri dari tiga kegiatan utama yang difasilitasi oleh Bappelitbang yaitu Pembentukan dan Penetapan SK Bupati tentang Komisi Irigasi, Sidang Komisi Irigasi dan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 050/232 Tahun 2019 Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Banjarnegara, maka Bappelitbang melakukan fasilitasi pelaksanaan Sidang Komisi Irigasi paling sedikit dua kali dalam setahun dan melakukan evaluasi disetiap akhir tahun. Selain itu.
- Evaluasi kinerja PPSI merupakan tahapan evaluasi semua program terkait Kelembagaan Pengelolaan Irigasi. Evaluasi ini melibatkan semua unsur kelembagaan baik dari Pihak Pemerintah dan Non Pemerintah. Kegiatan ini direncanakan untuk dilakukan setiap tahun diakhir pelaksanaan semua kegiatan/akhir tahun.
- Pemberdayaan TPM, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) mempunyai tugas yang sangat penting dalam pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi petani didalam proses penguatan KPI, namun Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran untuk pengadaan dan Pelatihan TPM oleh karenanya Bappelitbang dalam Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini belum dapat merencanakan untuk melakukan perekrutan TPM untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan PSETK dan penguatan KPI.

- Penyusunan PSETK, PSETK dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan organisasi P3A/GP3A/IP3A menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif pada suatu daerah irigasi. Pada tahun 2021, PSETK Daerah Irigasi sudah memerlukan untuk direview untuk proses perencanaan selanjutnya terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Banjarnegara.

Sementara itu Dinas PUPR memiliki tugas dalam Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini dalam memastikan pelaksanaan dua hal pokok yaitu Pengembangan Irigasi dan Pengelolaan Irigasi. Pengembangan Irigasi memiliki beberapa tahapan yang dimulai dengan sosialisasi dan konsultasi Publik, survey, investigasi dan Desain, Pelaksanaan Konstruksi, dan Persiapan O&P. Sementara Pengelolaan Irigasi terdiri dari Operasi Jaringan Irigasi, Pemeliharaan jaringan irigasi, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Dalam proses pelaksanaannya Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi akan memiliki permasalahan terkait kendala terkait pendanaan karena besarnya dana yang dibutuhkan untuk Rehabilitasi, Peningkatan dan Pemeliharaan sangatlah besar. Untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi dalam Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini dibutuhkan sedikitnya pembiayaan sebesar Dua Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Lima Ribu Tiga Puluh Delapan Koma Empat Ratus Enam Puluh Dua dan untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi diperlukan sedikitnya Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu dalam Lima tahun rencana. Oleh sebabnya dalam rencana akan dilakukan skenario pembiayaan yang diharapkan memaksimalkan saluran Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Unsur Pemerintah berikutnya adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang mempunyai beberapa tugas yang telah dijabarkan dalam dokumen ini diantaranya:

- Pengembangan Pertanian melalui peningkatan kapasitas PPL sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas petani di lapangan.
- Pengembangan kelembagaan Poktan dan Gapoktan.
- Melakukan Rencana Tata Tanam Global dan Rencana Tata Tanam Detail
- Peningkatan Pendapatan Usaha tani melalui Fasilitasi akses informasi dan kredit bagi petani, bantuan teknis sistem stimulant seperti benih serta Bantuan teknis Prasarana Usaha Tani.
- Melakukan usaha dalam menjamin keberlanjutan pertanian di Kabupaten Banjarnegara melalui beberapa hal diantaranya Peningkatan daya guna lahan dan air serta melakukan usaha tani hemat air.

Usaha-usaha tersebut tentunya memiliki kendala dilapangan terutama terkait budaya dan kebiasaan masyarakat lokal yang tentunya membutuhkan penyuluhan sehingga petani bisa diyakinkan untuk keberlanjutan pertanian di Kabupaten Banjarnegara.

Dan yang paling utama sebagai kesimpulan bahwa kerja sama multi pihak dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi terutama dari sektor non pemerintah baik yang ada dalam Komisi Irigasi dan P3A sangat vital dan diperlukan sehingga bersinergi bersama untuk kemajuan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Banjarnegara.

B. SARAN

Penyusunan dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini telah tersusun dengan berupaya memperhatikan segala aspek yang dibutuhkan dalam proses penyusunannya. Adanya beberapa kendala terutam terkait ketersediaan data bisa diselesaikan dengan memaksimalkan dokumen Teknis Irigasi, hasil e-PAKSI (Pengelolaan Aset Irigasi Dan Kinerja Sistem Irigasi), Dokumen Pedoman Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) dan dokumen lainnya yang relevan. Meski demikian, masih disadari diperlukannya ketersediaan data yang lebih maksimal lagi sehingga disarankan untuk mengadakan Review beberapa dokumen yang dibutuhkan secara bertahap.

Dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini adalah dokumen strategis dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Banjarnegara karena memuat semua aspek yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam lima tahun kedepan baik itu rencana Daerah Irigasi prioritas, strategi dan pendaaannya. Oleh karenanya untuk memaksimalkan hasilnya maka dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi ini harus terintegrasi kedalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Banjarnegara yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

